

DISERTASI



**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

*COMMUNITY EMPOWERMENT IN DEVELOPMENT PLANNING AT
SIDENRENG RAPPANG REGENCY*

**AHMAD MUSTANIR
NIM: 181060501006**

**PROGRAM DOKTOR
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
2024**

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

Disertasi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar

Doktor

Program Studi

Ilmu Administrasi Publik

Disusun dan Diajukan oleh :

AHMAD MUSTANIR

Kepada :

**PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
2024**

LEMBAR PENGESAHAN UJIAN TUTUP

Judul : Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan
di Kabupaten Sidenreng Rappang
Nama : Ahmad Mustanir
Nomor Induk : 181060501006
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Menyetujui,

Prof. Dr. H. Hamsu Abdul Gani, M.Pd
Promotor

Prof. Dr. H. Rifdan, M.Si.
Kopromotor

Mengetahui:

Ketua
Program Studi
Ilmu Administrasi Publik



Prof. Dr. H. Rifdan, M.Si.
Nip.: 19631231 199103 1 027

Direktur
Program Pascasarjana
Universitas Negeri Makassar



Prof. Dr. H. Hamsu Abdul Gani, M.Pd
Nip.: 19601231 198503 1 029

PRAKATA

Bismillahirrahmanirrahim. Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah serta Karunia-Nya sehingga penelitian disertasi dengan judul “Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Sidenreng Rappang” ini dapat terselesaikan.

Butuh 5 orang yang berangkat ke Baitullah dengan titipan doa agar penulis mendapatkan ‘feeling’ dapat menyelesaikan disertasi ini. Dengan selesainya penyusunan dan penulisan disertasi ini, penulis sepenuhnya menyadari tidak terlepas dari bimbingan, arahan dan support yang tiada hentinya tercurah dari Promotor dan Kopromotor serta berbagai pihak lainnya, meskipun tanggung jawab akhir penulisan ini menjadi tanggung jawab penulis seutuhnya. Dalam kesempatan ini dari hati yang tulus, penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Bapak Prof. Dr. H. Rifdan, M.Si., yang dilanjutkan oleh Prof. Dr. H. Hamsu Abdul Gani, M.Pd selaku Promotor, motivator dan pemberi harapan bahwa kamu harus bisa buktikan untuk selesai. Bapak Almarhum Prof. Dr. Sulaiman Samad, M.Si selaku Kopromotor yang dilanjutkan oleh Prof. Dr. H. Rifdan, M.Si, penjaga marwah akademik, sumber rujukan kata inspiratif bagi penulis. Terima kasih atas bimbingan dan masukan yang diberikan dalam penyusunan dan penulisan disertasi ini. Serta selalu mengarahkan dan mendorong penulis agar senantiasa mengembangkan cakrawala berpikir secara rasional dan kritis serta bertindak lebih cermat dan teliti serta tidak patah arang dalam menyelesaikan disertasi ini. Semoga ilmu yang diberikan Almarhum kepada

penulis menjadi Amalan Jariah bagi beliau. Allah SWT menempatkan Almarhum di Surga-Nya. Maafkan Anak Didikmu jika ada yang salah.

Demikian halnya ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada tim pengujian internal, yaitu Bapak Prof. Dr. Hasnawi Haris, M.Hum, Ibu Dr. Risma Niswaty, S.S., M.Si yang selalu turut memberikan motivasi dan dorongan tak henti-hentinya, penyambung lidah dan harapan penulis, serta Bapak Dr. Muhammad Guntur, M.Si atas jasa dan kearifan beliau yang senantiasa memberikan saran dan masukan yang konstruktif demi kesempurnaan disertasi ini.

Dengan selesainya penyusunan disertasi ini, tak lupa diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor Universitas Negeri Makassar Bapak Prof. Dr. Ir. H. Husain Syam, M.TP., IPU., ASEAN. Eng
2. Direktur Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar Bapak Prof. Dr. H. Hamsu Abdul Gani, M.Pd
3. Rektor Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang Prof. Dr. H. Jamaluddin, S.Sos., M.Si,
4. Ketua Program Doktor Ilmu Administrasi Publik Bapak Prof. Dr. H. Rifdan, M.Si
5. Ketua KAPSIPI Prof. Dr. H. Achmad Nurmandi, M.Si dari UMY
6. Penguji Eksternal Prof. Dr. H. Muhlis Madani, M.Si dari Universitas Muhammadiyah Makassar
7. Drs. Andi Muhammad Arsjad, M.Si., Kepala Bappeda Kabupaten Sidenreng Rappang pada masanya

8. Kepala Desa Carawali Abd.Hafid Mekka AM.P.,S.IP

Serta seluruh pihak yang telah memberikan kesempatan dan memfasilitasi kebutuhan akademik penulis untuk belajar secara sungguh-sungguh yang pada akhirnya upaya belajar pada program ini dapat terselesaikan dengan baik.

Terima kasih pula kepada Para Guru Besar dan Dosen pada Program Doktor Ilmu Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar yang tidak sempat disebutkan satu-persatu yang telah banyak berkontribusi terhadap kemajuan paradigma berpikir, memotivasi, dan berdiskusi dengan penulis hingga selesainya penyusunan disertasi ini.

Ucapan terimakasih yang tak terhingga secara khusus disampaikan kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda Drs. H. M. Yunus Rafiq dan Ibunda Almarhumah Hj. Sitti Faika Tadjuddin, BA yang sangat berjasa telah melahirkan, membesarkan, mendidik dan memberikan kasih sayang dan atas doa serta dorongannya kepada penulis. Kedua Mertua Penulis Almarhum Drs. H. Madeali Jabbareng, M.Si dan Hj. Sitti Murniah. Untuk istri dan anakku ku tercinta Drg. Rasdiana Madeali, Abib Taqiy Ishar Tirafi, Aqiilah Khalilah yang menemani dalam suka dan duka kehidupan serta senantiasa memberikan spirit kepada penulis. Saudara-Saudariku tercinta Sitti Nurmaidah - Khattab Said, Hj. Sitti Mufidah, ST. M.Si. - Nanang, ST, MT., dr. Sitti Fitriani, Sp.M., M.Kes – Muzakkir Ali Djamil, ST., Muhyiddin, SE. Ipar dan lagoku Prof. Dr. Adnan, M.S dan Dra. Sitti Marliyah., Abdul Haris, ST dan Dr. Irmawati Madeali, M.Si, Yuliati, SE dan dr. Ahmad Dahlan. Kerabat tercinta, yang tidak sempat disebutkan satu per-satu terima

kasih atas dukungan, bantuan dan doanya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan studi program doktor ini.

Rekan-rekan mahasiswa Program Doktor Ilmu Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar dan sahabat yang tidak sempat penulis sebutkan satu per-satu, terima kasih atas kebersamaan, motivasi dan spirit dalam penyelesaian disertasi ini. Semoga semua bantuan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang tak terhingga dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Pemilik apa yang ada di Langit dan di Bumi. Aamiin.

Rappang, 6 Januari 2024

Ahmad Mustanir

PERNYATAAN KEORISINILAN DISERTASI

Saya, Ahmad Mustanir. NIM: 181060501006, Menyatakan bahwa disertasi yang berjudul Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Sidenreng Rappang. Seluruh ide yang ada dalam disertasi ini, kecuali yang saya nyatakan sebagai kutipan, merupakan ide yang saya susun sendiri. Selain itu, tidak ada bagian dari disertasi ini yang telah saya gunakan sebelumnya untuk memperoleh gelar atau sertifikat akademik.

Jika pernyataan di atas terbukti sebaliknya, maka saya bersedia menerima sanksi yang ditetapkan oleh PPs Universitas Negeri Makassar.

Rappang, 24 Desember 2023

Yang menyatakan



Ahmad Mustanir

ABSTRAK

AHMAD MUSTANIR, 2024. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Sidenreng Rappang (Promotor Hamsu Abdul Gani dan Kopromotor Rifdan).*

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketidakberdayaan masyarakat dalam perencanaan pembangunan sehingga dibutuhkan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat melalui model baru pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Jenis penelitian kualitatif. Tipe penelitian *deskriptif explanatory* yang merupakan kombinasi antara penelitian *deskriptif* dan penelitian *explanatory*, untuk menemukan jawaban yang menyeluruh atas pertanyaan penelitian. Sumber dan informan penelitian adalah kepala desa dan tokoh masyarakat serta Kepala Bappeda Kabupaten Sidenreng Rappang. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam dan wawancara bertahap, observasi serta dokumen yang terkait dengan penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan. Validitas data menggunakan teknik triangulasi. Teknik dalam analisis data adalah analisis data model interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program-program yang ada di tingkat desa bukan merupakan cerminan usulan warga yang berbasis tingkatan bawah. Upaya-upaya dan metode pemerintah desa dalam memberikan kemampuan kepada masyarakat masih sangat minim yang hanya berupa pelatihan peningkatan kapasitas Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Dusun serta dalam bentuk pengarahan dalam musyawarah. Metode yang digunakan oleh pemerintah daerah dalam menggali aspirasi seharusnya menggunakan metode partisipatif. Namun kenyataannya partisipasi masyarakat hanya didasarkan pada buku pedoman bukan sebuah metode partisipatif. Model baru pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan pembangunan khususnya pada kegiatan musyawarah warga dalam pembahasan program rencana pembangunan seharusnya melibatkan semua partisipasi masyarakat yang ada di desa. Pelaksanaan musyawarah warga ini haruslah dilaksanakan di tingkatan terendah yang ada di desa, yaitu tingkatan kelompok-kelompok warga. Pelaksanaan harus dilaksanakan secara terbuka dan bukan perwakilan. Pelaksanaan menggunakan metode *Participatory Rural Appraisal (PRA)*.

Kata Kunci : Pemberdayaan Masyarakat, Perencanaan Pembangunan, Musrenbang, Participatory Rural Appraisal

ABSTRACT

AHMAD MUSTANIR, 2024. *Community Empowerment in Development Planning at Sidenreng Rappang Regency (Promotor Hamsu Abdul Gani and Copromotor Rifdan)*.

This research aims to determine community powerlessness in development planning so that community empowerment efforts are needed through a new model of community empowerment in development planning. Type of qualitative research. This type of descriptive explanatory research is a combination of descriptive research and explanatory research, to find comprehensive answers to research questions. The research sources and informants were village heads and community leaders as well as the Head of the Sidenreng Rappang Regency Bappeda. Data collection techniques use in-depth and staged interviews, observations, and documents related to holding development planning deliberations. Data validity uses the triangulation technique. The technique in data analysis is interactive model data analysis. The research results show that the programs at the village level are not a reflection of the proposals of residents based at lower levels. The village government's efforts and methods in providing skills to the community are still very minimal, only in the form of training to increase the capacity of the Village Consultative Body, Hamlet Heads, and in the form of guidance in deliberations. The method used by local governments in exploring aspirations should use participatory methods. However, community participation is only based on a guidebook, not a participatory method. The new model of community empowerment in development planning, especially in community deliberation activities in discussing development planning programs, should involve all community participation in the village. The implementation of this community deliberation must be carried out at the lowest level in the village, namely the level of community groups. Implementation must be carried out openly and not by proxy. The implementation uses the Participatory Rural Appraisal (PRA) method.

Key Words: Community Empowerment, Development Planning, Musrenbang, Participatory Rural Appraisal

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PRAKATA	iv
PERNYATAAN KEORISINILAN DISERTASI	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Hasil Penelitian	10
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pemberdayaan Masyarakat	11
B. Perencanaan Pembangunan	14
C. Musyawarah Perencanaan Pembangunan	17
1. Tujuan Musrenbang Desa	19
2. Manfaat Musrenbang Desa	20
D. Konsep Partisipasi Masyarakat	21
E. Tingkatan Partisipasi Masyarakat	24

F. Metode Partisipatif Pemberdayaan Masyarakat	27
1. Participatory Rural Appraisal (PRA)	27
2. Tujuan PRA	29
3. Pentingnya PRA	30
4. Landasan PRA	30
5. Kajian/Tools PRA	32
5.1. Transek	32
5.2. Pemetaan Swadaya	35
G. Hasil-Hasil Penelitian yang Relevan dan State of The Art	36
H. Kerangka Konseptual	46

BAB III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian	48
1. Jenis Penelitian	48
2. Lokasi Penelitian	48
B. Pendekatan Penelitian	49
C. Sumber Data dan Informan	50
1. Sumber Data	50
2. Informan Penelitian	51
D. Fokus dan Deskripsi Fokus Penelitian	52
1. Fokus Penelitian	52
2. Deskripsi Fokus	52
E. Instrumen Penelitian	53
F. Teknik Pengumpulan dan Pengabsahan Data	54
1. Teknik Pengumpulan Data	54
2. Teknik Pengujian Validitas dan Realibilitas	56
G. Teknik Analisis Data	57

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Wilayah Penelitian	60
1. Gambaran Umum Kabupaten Sidenreng Rappang	60

2. Gambaran Umum Desa Carawali	67
B. Hasil Penelitian	71
1. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan	72
2. Upaya Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan	77
3. Model Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan	97
C. Pembahasan Penelitian	102
1. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan	102
2. Upaya Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan	111
3. Model Baru Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan	118
BAB V. PENUTUP	
A. Kesimpulan	123
B. Saran dan Rekomendasi	125
1. Saran	125
2. Rekomendasi	126
DAFTAR PUSTAKA	130
LAMPIRAN	136 - 238

DAFTAR TABEL

Nomor		Halaman
2.1	Penelitian-Penelitian Terdahulu yang Relevan	36
4.1	Distribusi Luas Wilayah per Kecamatan di Kabupaten Sidenreng Rappang	62
4.2	Distribusi Penduduk Per Kecamatan di Kabupaten Sidenreng Rappang	63
4.3	Rasio Penduduk berdasarkan Gender per Kecamatan di Kabupaten Sidenreng Rappang	64
4.4	Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Sidenreng Rappang	65
4.5	Struktur Organisasi Kantor Desa Carawali Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang	68
4.6	Batas Desa Carawali Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang	68
4.7	Luas Wilayah Desa Carawali Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang	69
4.8	Gambaran Umum Demografis Desa Carawali Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang	69
4.9	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Pekerjaan Desa Carawali Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang	70
4.10	Jumlah Penduduk Menurut Agama Yang Dipeluk di Desa Carawali Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang	71

DAFTAR GAMBAR

Nomor		Halaman
2.1	Network Visualization 2020-2023	43
2.2	Network Visualization 2020-2023	43
2.3	Overlay Visualization 2020-2023	44
2.4	Density Visualization 2020-2023	45
2.5	Kerangka Konseptual (Fish Bone)	47
3.1	Komponen Analisis Data Model Interaktif (<i>Interactive Model</i>)	58
4.1	Peta Administrasi Kabupaten Sidenreng Rappang	61
4.2	Model Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Desa Sampai Tingkat Nasional	98
4.3	Model Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Desa Sampai Tingkat Kabupaten	99
4.4	Model Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Desa	100
4.5	Model Musyawarah Perencanaan Pembangunan Lainnya Tingkat Desa	101
4.6	Model Baru Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Di Desa	119

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor	Halaman
1. Foto Dokumentasi Kegiatan dan Pengambilan Data di Desa Carawali	136
2. Ijin Penelitian Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan	140
3. Ijin Penelitian Program Pascasarjana UNM	141
4. Undangan Ujian Prelium Lisan (Gagasan Disertasi)	142
5. Undangan Ujian Seminar Proposal	143
6. Undangan Ujian Seminar Hasil Penelitian	144
7. Undangan Ujian Tutup Disertasi	145
8. Timbang Bersama Kelayakan Ujian Promosi	146
9. Undangan Ujian Promosi Doktor	147
10. Berita Acara Daftar Hadir Kegiatan Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Carawali	148
11. Panduan Wawancara	157
12. Daftar Riwayat Hidup	160
13. Analisis Data Wawancara (Tabel Reduksi, Display, Conclusion)	188

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam sistem perencanaan pembangunan nasional Indonesia saat ini meliputi pendekatan *Top down* dan *Bottom up*, sepertinya akan menjamin adanya keseimbangan antara prioritas nasional dengan aspirasi lokal dalam perencanaan pembangunan di daerah. Namun, kenyataannya banyak daerah belum sepenuhnya mampu mengakomodir aspirasi masyarakat. Aspirasi masyarakat pun belum dilakukan dengan memperhatikan prinsip metode partisipatif yang akan menjamin terlaksananya pemberdayaan masyarakat. Apalagi dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kebijakan otonomi daerah dengan konsep sistem pemerintahan desentralisasi memberikan ruang kepada warga masyarakat untuk ikut berpartisipasi dan mengambil peran yang lebih besar dalam merumuskan kebijakan-kebijakan daerahnya (Luturmas *et al.*, 2023) (Holle *et al.*, 2023). Kondisi faktual empirik pemberdayaan masyarakat melalui metode partisipatif dalam perencanaan pembangunan melalui mekanisme musyawarah di desa masih sebatas menjadi retorika, karena kondisi faktual ini berakibat timbulnya beberapa kekecewaan di tingkat desa yang sudah memenuhi kewajiban membuat program rencana pembangunan tapi realisasinya sangat minim dan jauh dari aspirasi masyarakat.

Dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 (penjelasan pasal 2 ayat 4 huruf d) partisipasi masyarakat diterjemahkan sebagai keikutsertaan masyarakat

untuk mengakomodasikan kepentingan mereka dalam proses penyusunan rencana pembangunan.

Perencanaan pembangunan partisipatif merupakan salah satu pendekatan perencanaan pembangunan di daerah yang mewajibkan keberdayaan masyarakat melalui keterlibatan masyarakat. Keterlibatan masyarakat ini diperlukan dengan tujuan agar program dan kegiatan pembangunan yang diambil oleh pemerintah sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Banyak program pembangunan yang digulirkan oleh pemerintah daerah kurang memberdayakan masyarakat khususnya optimalisasi pelibatan masyarakat dalam perencanaan sampai evaluasi pembangunan di desa, sehingga muncul berbagai kesenjangan persepsi antara masyarakat dengan pemerintah. Hal tersebut mengakibatkan rendahnya kepedulian masyarakat itu sendiri, yang pada akhirnya mengakibatkan rendahnya tingkat pemberdayaan masyarakat. Hal ini dapat terbukti dengan rendahnya proses pemberdayaan masyarakat mulai dari tingkat partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan, karena tanpa disadari sebenarnya peranan pemerintah masih jauh lebih besar, meskipun tidak secara fisik, akan tetapi dalam wujud regulasi pengambilan kebijakan yang kurang memberi keleluasaan bagi masyarakat secara optimal untuk terlibat. Kondisi tersebut tercermin dari perencanaan pembangunan di desa.

Beberapa peraturan yang dibuat secara lokal juga telah menyimpang dari semangat pemberdayaan dan upaya pengembangan partisipatif yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004. Tidak adanya pedoman tentang bagaimana melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan telah

menghasilkan perbedaan jenis musyawarah perencanaan pembangunan. Beberapa desa menerapkan pertemuan terbuka, sementara yang lain menerapkan pertemuan perwakilan (Maharjan and Sutiyo, 2017).

Pengikutsertaan masyarakat dalam proses penentuan kebijakan dianggap sebagai salah satu cara yang efektif guna menampung dan mengakomodasi berbagai kepentingan yang beragam tersebut. Munzwa, et al. dalam (Enos, 2013) menyatakan bahwa tanpa adanya keterlibatan masyarakat maka seluruh hasil adalah usaha dan pemborosan sumber daya.

Peranan masyarakat tersebut sangatlah penting karena dalam perencanaan pembangunan, masyarakatlah yang mengetahui permasalahan yang dihadapi dan kebutuhan yang mereka kehendaki, sehingga keikutsertaan dan peran aktif masyarakat dapat mengakomodasi kepentingan mereka dalam proses penyusunan rencana pembangunan. Sebagai akibat dari kurang aktifnya masyarakat dalam proses musrenbang serta kegiatan perencanaan pembangunan lainnya sehingga daftar prioritas rencana pembangunan yang seharusnya diusulkan dan diajukan langsung oleh masyarakat cenderung diambil alih tugasnya oleh elit yang ada di desa. Sehingga demikian dapat dikatakan bahwa partisipasi masyarakat yang sesungguhnya masih jauh dari harapan (Haryadi Ahmad, 2016).

Masalah dan kendala lain dalam Musrenbang dimana forum Musrenbang selama ini terbukti mengandung sejumlah kelemahan di hampir semua levelnya. Pada level bawah proses musrenbang telah pula mengalami distorsi dalam pelaksanaannya. Dapat dilihat kendala utama di tingkat desa adalah menyangkut

kurangnya dilibatkan berbagai unsur (stakeholders) di tingkat desa di dalam penyusunan Musrenbang Desa (Sadikin, Marsuq and Jamiah, 2019).

Secara umum pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di wilayah perdesaan selama ini kurang optimal disebabkan belum adanya penyerahan kewenangan dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa, belum adanya dukungan anggaran serta pendekatan pembangunan masih bersifat top down. Sedangkan pemerintah desa dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat memerlukan dukungan politik (political will) dari pemerintah provinsi, kabupaten/kota sehingga pemerintah desa memiliki kewenangan dan dukungan anggaran yang jelas serta mengedepankan pendekatan *bottom up system* (Ahfan, Asrori and Sipahutar, 2015). Selain itu pemerintah desa dekat dengan masyarakat dan karena itu dapat memperoleh informasi yang mereka butuhkan dalam membuat sebuah perencanaan dan penganggaran melalui metode partisipatif (Aklamavo *et al.*, 2000).

Eksistensi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa secara tegas menjelaskan mengenai pemberdayaan masyarakat sebagaimana tertuang dalam pasal 1 ayat 12. Pasal tersebut berbunyi: “pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa”. Lebih lanjut dalam pasal 18 disebutkan: “Kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan

masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat desa”.

Paradigma perencanaan dan pemberdayaan masyarakat yang sentralistik dimana program dirancang dari atas tanpa melibatkan masyarakat, harus diubah kearah peningkatan partisipasi masyarakat lokal secara optimal atau secara partisipatif.

Keberdayaan masyarakat dapat diwujudkan melalui partisipasi aktif masyarakat yang difasilitasi dengan adanya pelaku pemberdayaan. Sasaran utama pemberdayaan masyarakat adalah mereka yang lemah dan tidak memiliki daya, kekuatan atau kemampuan mengakses sumberdaya produktif atau masyarakat yang terpinggirkan dalam pembangunan. Tujuan akhir dari proses pemberdayaan masyarakat adalah untuk memandirikan warga masyarakat agar dapat meningkatkan taraf hidup keluarga dan mengoptimalkan sumberdaya yang dimilikinya.

Berdasarkan hasil pengamatan dan observasi pada beberapa kegiatan kemasyarakatan di Desa Carawali, peneliti menemukan permasalahan yang muncul berkaitan dengan upaya pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan-kegiatan perencanaan pembangunan di desa.

Das Sein nya, peneliti mengamati pada saat pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan di desa, keberdayaan masyarakat dalam keterlibatan kehadiran dalam kegiatan tersebut sangat minim. Pada saat pelaksanaan musyawarah tingkat desa sudah ada upaya dari pemerintah desa mengundang tokoh-tokoh masyarakat untuk hadir dalam kegiatan, akan tetapi tokoh-tokoh

masyarakat yang hadir tidak maksimal dan tidak mencerminkan representasi warga masyarakat secara keseluruhan. Misalnya pada musrembang RKAD hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 masyarakat yang hadir adalah 41 orang. Selintas masyarakat yang hadir sudah cukup tetapi tidak mewakili unsur-unsur kelompok yang ada di masyarakat Desa Carawali. Apalagi jika pelaksanaan musyawarah ini dilaksanakan dengan sistem terbuka bukan perwakilan. Begitupula dalam kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan lainnya seperti kegiatan program kerja mahasiswa tanggal 17 Juli 2020 hanya 15 orang masyarakat yang hadir, evaluasi program kerja dan sosialisasi aplikasi SIBERAS dan Agribisnis Store tanggal 15 Agustus 2020 hanya 22 orang masyarakat yang hadir. Juga yang terakhir saat menghadiri kegiatan sosialisasi pemanfaatan pekarangan dalam mendukung ketersediaan pangan rumah tangga tanggal 5 Nopember 2020, masyarakat yang hadir hanya 17 orang dalam satu dusun saja yaitu dari Dusun Cenrana.

Pelaksanaan kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan tidak dilaksanakan mulai dari tingkatan terbawah sehingga program-program yang ada di tingkat desa bukan merupakan cerminan usulan warga yang berbasis tingkatan terbawah atau *bottom up*. Bahkan menurut pengamatan peneliti saat hadir dalam kegiatan musrembang RKAD hari selasa tanggal 28 Januari 2020 program-program yang dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan tingkat desa adalah program yang sudah ada di atas kertas yang dibawa oleh dinas terkait di kabupaten.

Pada saat pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan, sudah ada upaya dari pemerintah desa untuk memberdayakan dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat menyampaikan program-program usulan di tingkat

desa, akan tetapi masyarakat juga tidak memanfaatkan kesempatan tersebut dengan baik. Hanya beberapa orang saja dari masyarakat yang menyampaikan aspirasi mereka pada saat pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan di desa selebihnya masyarakat cenderung bersifat pasif. Masyarakat cenderung hanya menerima apa yang diputuskan dalam rapat.

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 hasil dari pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tahun 2020 ada 6 program prioritas daerah Kabupaten Sidenreng Rappang yang terjabarkan dalam 67 program besar yang rencananya akan didanai.

Dari program-program tersebut tertuang dalam usulan program/kegiatan pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2021 dalam 1.303 sasaran kegiatan namun hanya 15 program sasaran kegiatan yang berasal dari Desa Carawali dengan 1 program sasaran kegiatan saja yang akan di danai yaitu kursus menjahit dengan nilai yang sangat kecil Rp. 75 juta.

Sedangkan dalam daftar usulan Musrenbang Kabupaten Sidenreng Rappang dari 1.716 sasaran kegiatan, hanya ada 11 program sasaran kegiatan yang berasal dari Desa Carawali dengan 6 program sasaran kegiatan saja yang akan di danai. Ini semua menunjukkan ketidakberdayaan masyarakat dalam perencanaan pembangunan di desanya.

Selain itu pembahasan di dalam musyawarah perencanaan pembangunan juga menggunakan metode yang tidak jelas yang bisa menjadi ukuran penilaian sebuah program menjadi sebuah prioritas kebutuhan masyarakat. Kebanyakan metode pelaksanaan musyawarah hanya menggunakan ceramah yang bersifat satu

arah sehingga upaya memberdayakan masyarakat akan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan prioritas usulan kebijakan masih jauh dari yang diharapkan. Hal ini melalui pengamatan peneliti saat hadir dalam kegiatan musrenbang RKAD hari selasa tanggal 28 Januari 2020.

B. Rumusan Masalah

Salah satu kegiatan perencanaan pembangunan yang rutin dilakukan oleh pemerintahan desa adalah musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) disamping kegiatan perencanaan pembangunan lainnya di luar musrenbang. Dalam panduan pelaksanaan musrenbang kajian desa secara lengkap dan menyeluruh dilakukan dengan metode partisipatif misalnya dengan Participatory Rural Appraisal (PRA) namun kenyataannya masih banyak daerah/desa yang cenderung mengabaikan metode ini. Pelaksanaan cenderung hanya berupa diskusi ataupun musyawarah dengan tidak memperhatikan prinsip-prinsip partisipatif seperti yang ada dalam PRA, keterlibatan masyarakat sangat minim dengan hanya orang-orang tertentu yang diundang dengan tidak melibatkan masyarakat banyak, keputusan program dalam perencanaan banyak diintervensi dan lain sebagainya yang jauh upaya memberdayakan masyarakat.

Oleh karena itu metode partisipatif seperti Participatory Rural Appraisal (PRA) perlu menjadi rujukan wajib dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan seperti musrenbang dan juga pelaksanaan perencanaan pembangunan lainnya di

luar musrenbang, karena dalam PRA keberdayaan masyarakat berupa pelibatan peran serta masyarakat akan maksimal dalam memahami keadaan perdesaan dan proses-proses pemikiran yang berlangsung pada setiap daur program, ataupun kegiatan perencanaan pembangunan. Dengan metode PRA juga akan mengedepankan proses dalam memberdayakan masyarakat karena akan meningkatkan kemampuan dan percaya diri masyarakat dalam mengidentifikasi serta menganalisa keadaan wilayah mereka, baik potensi maupun permasalahannya.

Atas dasar inilah maka peneliti ingin melakukan penelitian disertasi dengan rumusan masalah :

1. Mengapa masyarakat kurang diberdayakan dalam perencanaan pembangunan di Desa Carawali ?
2. Bagaimana upaya pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Desa Carawali ?
3. Bagaimana model baru pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan pembangunan ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk kepentingan akademik, diharapkan dapat memberikan kontribusi konstruktif terhadap model pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah maka tujuan pertanyaan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengkaji dan menganalisis kurangnya masyarakat diberdayakan dalam perencanaan pembangunan.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis upaya pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan pembangunan
3. Untuk menemukan model baru yang lebih optimal pada pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan pembangunan.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran dan manfaat yang bersifat teoritis dan praktis sebagai berikut :

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan akan memberikan kontribusi konstruktif untuk dunia akademik dalam upaya pengembangan *public policy* pada pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan pembangunan.
2. Secara praktis, melalui penelitian ini akan memberikan masukan bagi pemerintah desa dan daerah dalam melaksanakan proses perencanaan pembangunan dengan memberdayakan masyarakatnya secara partisipatif untuk memecahkan masalah yang dihadapi agar mencapai kondisi yang diharapkan berdasarkan kebutuhan dan kemampuan masyarakat secara mandiri.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat. Desa yang otonom memberikan ruang gerak yang luas dalam perencanaan pembangunan sebagai kebutuhan nyata masyarakat dan tidak banyak dibebani oleh program kerja dari dinas atau instansi pemerintah. Upaya pemberdayaan dapat mempercepat proses penyiapan masyarakat melalui berbagai cara dan pendekatan yang mampu mawadahi seluruh komponen sumber daya manusia dan kelembagaan (Sumpeno, 2011b). Jadi pemberdayaan adalah upaya yang ditujukan agar suatu tatanan dapat mencapai suatu kondisi yang memungkinkan untuk membangun dirinya sendiri.

Terdapat dua prinsip dasar yang selayaknya dianut dalam proses pemberdayaan. Pertama, menciptakan ruang atau peluang bagi masyarakat untuk mengembangkan dirinya secara mandiri dan menurut cara yang dipilihnya sendiri. Kedua, mengupayakan agar masyarakat memiliki kemampuan untuk memanfaatkan ruang atau peluang yang tercipta (Sumpeno, 2011b).

Menurut Edi Suharto dalam (Bancin, 2011) Pemberdayaan masyarakat adalah suatu upaya untuk memberikan energi atau daya kepada masyarakat, khususnya masyarakat yang rentan atau lemah yang ditujukan agar masyarakat

tersebut bisa mengakses seluas-luasnya yang menjadi haknya demi tercapainya suatu kondisi sosial, ekonomi, dan kualitas kehidupan yang lebih baik. Pemberdayaan adalah memberikan energi agar yang bersangkutan mampu untuk bergerak secara mandiri. (Kam, 2002) dalam (Rezaul Islam, 2014) merumuskan pemberdayaan adalah untuk membantu orang-orang yang tidak berdaya memandang diri mereka sebagai individu-individu yang mampu, mau dan mampu mengendalikan kehidupan mereka, selaku pelaku aktif yang menggunakan pengaruhnya pada perumusan kebijakan, keputusan, dan proses yang mempengaruhi kehidupan mereka.

(Adamson and Bromiley, 2013) dan Sulistiyani dalam (Widjajanti, 2011) menjelaskan lebih rinci bahwa secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata dasar "daya" yang berarti kekuatan atau kemampuan. Bertolak dari pengertian tersebut, maka pemberdayaan dimaknai sebagai proses untuk memperoleh daya, kekuatan atau kemampuan, dan atau proses pemberian daya, kekuatan atau kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya.

Pemberdayaan masyarakat sesungguhnya merangkum nilai-nilai sosial. Pemberdayaan sebagai suatu proses dipandang sebagai pengembangan kapasitas, kompetensi, keterampilan dan kesadaran kritis dalam masalah-masalah masyarakat (Erdiaw-Kwasie and Acheampong, 2018).

Tetapi sejak awal bahwa pemberdayaan individu dipelajari dalam konteks kolektif, dan termasuk pengetahuan, keterampilan, aspirasi, dan konsep diri tentang

bagaimana bekerja sama dengan orang lain, bagaimana melakukan tindakan kolektif yang efektif (Cislaghi, Gillespie and Mackie, 2016).

Dari beberapa pengertian pemberdayaan masyarakat diatas dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah memberikan kemampuan kepada masyarakat untuk dapat mengembangkan kapasitas, kompetensi, keterampilan dan kesadaran kritis untuk kehidupan bersama yang lebih baik.

Perencanaan pembangunan yang tidak memperhatikan semua aspek atau sektor pemberdayaan karena bersifat *topdown planning* yang menempatkan warga masyarakat desa sebagai objek bukan pelaku (subjek). Rencana program pengembangan masyarakat biasanya dibuat di tingkat Pusat (atas) dan dilaksanakan oleh instansi propinsi dan kabupaten. Masyarakat sering kali diikutkan tanpa diberikan pilihan dan kesempatan untuk memberi masukan. Dalam konteks ini masyarakat ditempatkan pada posisi yang membutuhkan bantuan dari luar hanya akan menjadikan kegagalan dalam perencanaan pembangunan.

Pemberdayaan memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat. Desa yang otonom memberikan ruang gerak yang luas dalam perencanaan pembangunan sebagai kebutuhan nyata masyarakat dan tidak banyak dibebani oleh program kerja dari dinas atau instansi pemerintah. Upaya pemberdayaan dapat mempercepat proses penyiapan masyarakat melalui berbagai cara dan pendekatan yang mampu mewadahi seluruh komponen sumber

daya manusia dan kelembagaan. Proses yang dilakukan melibatkan masyarakat dan *stakeholders* agar perencanaan dan proses pemberdayaan berjalan secara terpadu.

B. Perencanaan Pembangunan

Salah satu tahapan penting dalam pembangunan adalah perencanaan. Perencanaan pembangunan daerah menurut Wrihatnolo dalam (Akadun, 2011) adalah suatu proses perencanaan pembangunan yang dimaksudkan untuk melakukan perubahan menuju arah perkembangan yang lebih baik bagi suatu komunitas masyarakat, pemerintah, dan lingkungannya dalam wilayah/daerah tertentu, dengan memanfaatkan atau mendayagunakan berbagai sumber daya yang ada, dan harus memiliki orientasi yang bersifat menyeluruh, lengkap, tapi tetap berpegang pada asas prioritas.

Arthur W. Lewis (Lewis, 2005) mendefinisikan perencanaan pembangunan suatu kumpulan kebijaksanaan dan program pembangunan untuk merangsang masyarakat dan swasta untuk menggunakan sumber daya yang tersedia secara lebih produktif

Menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, bahwa pembangunan desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Perencanaan pembangunan desa merupakan suatu panduan atau model penggalian potensi dan gagasan pembangunan desa yang menitik beratkan pada peranserta masyarakat dalam keseluruhan proses pembangunan. Konsep ini dilandasi oleh nilai-nilai dan semangat gotong royong yang telah mengakar dalam budaya

masyarakat Indonesia. Gotong royong bertumpu pada keyakinan bahwa setiap warga mempunyai hak untuk memutuskan dan merencanakan apa yang terbaik bagi diri dan lingkungan serta cara terbaik dalam upaya mewujudkannya.

Menurut Sumpeno (Sumpeno, 2011b) kegiatan perencanaan meliputi tiga aspek, yaitu;

1. Analisis, yaitu kajian atau usaha untuk mengetahui dan menguraikan arti suatu keadaan. Data atau bahan mengenai suatu keadaan diurai dan diteliti untuk mengetahui keterkaitannya satu dengan lainnya. Analisis berarti melakukan proyeksi atau perkiraan masa depan yang bertitik tolak dari keadaan masa kini. Analisis wilayah merupakan cara pandang berbagai faktor dalam skala wilayah
2. Kebijakan (policy) yaitu, pemilihan rencana yang terbaik untuk pelaksanaan pembangunan meliputi pengetahuan mengenai tujuan, kriteria dan metode untuk menelaah alternatif rencana.
3. Rancangan atau desain (design) yaitu rumusan atau sajian rencana.

Perencanaan pembangunan desa merupakan suatu panduan atau model penggalian potensi dan gagasan pembangunan desa yang menitikberatkan pada peranserta masyarakat dalam keseluruhan proses pembangunan (Sumpeno, 2011b).

Perencanaan pembangunan desa tersebut di lakukan dengan metode partisipatif. Perencanaan partisipatif adalah usaha yang dilakukan masyarakat untuk memecahkan masalah yang dihadapi agar mencapai kondisi yang diharapkan berdasarkan kebutuhan dan kemampuan secara mandiri (Maryati, Isya and Azmeri, 2018) (Latif, Mustanir and Irwan, 2019) (Latif *et al.*, 2019).

Tujuan dari perencanaan partisipatif tidak hanya untuk menginformasikan kepada masyarakat tentang kegiatan yang direncanakan tetapi juga untuk bekerjasama dengan masyarakat dan untuk berbagi pengetahuan dan gagasan dalam masyarakat (Enos, 2013). Secara umum perencanaan desa dimaksudkan untuk membantu menemukenali kebutuhan, merumuskan strategi dan mengelola perubahan masyarakat dalam kerangka perbaikan kesejahteraan dan kualitas hidup di masa depan.

Secara khusus tujuan dari perencanaan desa sebagai berikut;

1. Meningkatkan kemampuan kelembagaan masyarakat ditingkat desa dalam menyusun perencanaan pembangunan secara partisipatif.
2. Meningkatkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam memberikan makna dalam perencanaan pembangunan.
3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pembangunan
4. Menghasilkan keterpaduan antarbidang/sector dan kelembagaan dalam kerangka

Secara garis besar perencanaan pembangunan di desa menurut Sumpeno (Sumpeno, 2011b) mengandung pengertian sebagai berikut;

1. Perencanaan sebagai serangkaian kegiatan analisis mulai dari identifikasi kebutuhan masyarakat hingga penetapan program pembangunan.
2. Perencanaan pembangunan lingkungan; semua program peningkatan kesejahteraan, ketentraman, kemakmuran dan perdamaian masyarakat di lingkungan pemukiman dari tingkat RT/RW, dusun dan desa

3. Perencanaan pembangunan bertumpu pada masalah, kebutuhan, aspirasi dan sumber daya masyarakat setempat.
4. Perencanaan desa menjadi wujud nyata peran serta masyarakat dalam membangun masa depan.
5. Perencanaan yang menghasilkan program pembangunan yang diharapkan dapat memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan, kemakmuran dan perdamaian masyarakat dalam jangka panjang.

Dengan demikian perencanaan pembangunan desa yang melibatkan partisipasi masyarakat ini adalah usaha dari masyarakat untuk dapat memecahkan masalah yang ada pada mereka berdasarkan kebutuhan, kemampuan, pengetahuan dan gagasan dalam masyarakat tersebut. Perencanaan partisipatif ini tidak dapat diintervensi dari luar tetapi tetap membutuhkan masukan-masukan dari luar atas kesepakatan masyarakat dalam penentuan keputusannya.

C. Musyawarah Rencana Pembangunan

Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) berperan dalam menyerap aspirasi masyarakat dalam pembangunan dari tingkat desa/kelurahan sampai ke tingkat kabupaten. Hal ini dapat dikatakan bahwa forum Musrenbang merupakan wadah yang representatif bagi masyarakat di desa/kelurahan guna menyalurkan aspirasi masyarakat agar dapat disampaikan kepada pemerintah tingkat yang lebih atas untuk dapat diakomodir. Dalam Musrenbang ini seluruh elemen masyarakat di desa/kelurahan dapat

menyampaikan berbagai permasalahan dan usulan kegiatan yang menjadi kebutuhan masyarakat (Enos, 2013).

Zainuddin mengemukakan bahwa partisipasi masyarakat dalam kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan adalah bentuk partisipasi masyarakat yang bisa disumbangkan dalam perencanaan pembangunan berbentuk tingkat kehadiran, memberikan ide atau gagasan dalam penentuan usulan prioritas. Ide atau gagasan disampaikan melalui musyawarah perencanaan pembangunan, dan hasil ide-ide tersebut akan diusulkan dalam penetapan usulan. Bentuk partisipasi masyarakat diberikan dalam bentuk sumbangan pikiran, saran, usulan maupun kritik dalam pertemuan atau rapat yang diadakan untuk membicarakan kegiatan yang akan dilaksanakan (Samad, Mustanir and Pratama, 2019) (Mustanir and Razak, 2017).

Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan Nasional dan rencana pembangunan Daerah. Musrenbang Desa adalah forum rembug warga yang dilakukan untuk membicarakan masalah dan potensi desa agar teridentifikasi dengan baik untuk memberikan arah yang jelas atas tindakan yang layak menurut skala prioritas dan dilaksanakan dalam mengatasi masalah atau memaksimalkan potensi yang dimiliki sebagai dasar program kerja pemerintah desa melaksanakan penganggaran dan kegiatan tahunan Desa (Uceng *et al.*, 2019) (Mustanir, Sellang, *et al.*, 2018).

Musyawarah rencana pembangunan merupakan Perencanaan Pembangunan Bersama Masyarakat adalah panduan atau model pembangunan desa yang menitikberatkan pada peran serta masyarakat dalam keseluruhan proses

pembangunan (Mustanir and Yasin, 2018). Pendekatan ini dilandasi oleh nilai-nilai dan semangat gotong-royong yang telah mengakar dalam budaya masyarakat Indonesia. Gotong-royong bertumpu pada keyakinan bahwa setiap warga masyarakat memiliki hak untuk memutuskan dan merencanakan apa yang terbaik bagi diri dan lingkungan serta cara terbaik dalam upaya mewujudkannya. Secara garis besar musyawarah rencana pembangunan mengandung pengertian sebagai berikut: 1) Perencanaan sebagai serangkaian kegiatan analisis mulai dari indentifikasi kebutuhan masyarakat hingga penetapan program pembangunan. 2) Perencanaan pembangunan lingkungan, semua program peningkatan kesejahteraan, ketenteraman, kemakmuran dan perdamaian masyarakat di lingkungan pemukiman dari tingkat RT/RW, dusun dan kelurahan. 3) Perencanaan yang dilaksanakan berdasar pada masalah, kebutuhan, aspirasi dan sumber daya masyarakat sendiri. 4) Terwujud peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan (Ahmad and Muhammad, 2019) (Mustanir and Abadi, 2017).

1. Tujuan Musrenbang Desa

Secara umum tujuan PRA untuk mengetahui dan mengkaji fenomena, peristiwa, kapasitas, dan kehidupan sosial untuk membangun aksi bersama. Secara umum maksud diselenggarakannya musrenbang untuk memfasilitasi keterlibatan berbagai pihak melalui proses dialog, berdiskusi dan memformulasikan berbagai persoalan yang dihadapi terkait kebutuhan, masa depan dan rencana pembangunan desa. Secara khusus tujuan Musrenbang desa, yaitu;

- a. Menyetujui prioritas kebutuhan atau kegiatan desa yang akan menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa);
- b. Menyetujui prioritas kegiatan desa yang akan dilaksanakan desa sendiri dan dibiayai melalui dana swadaya desa/masyarakat;
- c. Menyetujui prioritas kegiatan desa yang akan dilaksanakan desa sendiri yang dibiayai melalui Alokasi Dana Desa (ADD) yang berasal yang berasal dari APBD kabupaten/kota atau sumber dana lain;
- d. Menyetujui prioritas kegiatan desa yang akan diusulkan melalui musrenbang kecamatan untuk menjadi kegiatan pemerintah daerah dan dibiayai melalui APBD kab./kota atau APBD provinsi; dan
- e. Menyetujui Tim Delegasi Desa yang akan memaparkan persoalan daerah yang ada di desanya pada forum musrenbang kecamatan untuk penyusunan program pemerintah daerah/SKPD pada tahun berikutnya (Sumpeno, 2011b).

2. Manfaat Musrenbang Desa

- a. Musrenbang memberikan kesempatan kepada berbagai pemangku kepentingan khususnya kelompok marjinal dan perempuan untuk mengemukakan ide, gagasan, harapan dan perubahan desa ke depan.
- b. Setiap warga desa mendapat peluang yang sama untuk mengemukakan pendapatnya dalam forum musyawarah.

- c. Manfaat diskusi dan curah pendapat (*brainstorming*) dapat menjadi kesempatan untuk belajar merumuskan strategi alternatif dan mendesain skenario pembangunan yang diharapkan masyarakat.
- d. Proses pembelajaran dalam pembuatan kebijakan yang melibatkan beragam pemangku kepentingan yang berusaha untuk mempengaruhi isi dan bentuk kebijakan secara interaktif.
- e. Pembuatan kebijakan sebagai upaya untuk menanggapi tuntutan dari berbagai kelompok kepentingan dengan cara bargaining, negosiasi, mediasi dan kompromi.
- f. Membangun forum dialog lintas pelaku dalam rangka meningkatkan kohesi sosial dan penyelesaian masalah melalui pendekatan tanpa kekerasan dan non litigasi (Sumpeno, 2011b).

D. Konsep Partisipasi Masyarakat

Konsep awal partisipasi mulai dikenal dalam teori organisasi behavioral sebagai bagian dari paradigma ilmu administrasi publik sebagai ilmu administrasi (Holle *et al.*, 2023). Keith Davis dan Newstrom (1972) dalam (Mardiyanta, 2013) menempatkan konsep partisipasi dalam proses pengambilan keputusan administrasi dalam organisasi. Sejalan dengan perkembangan teori organisasi buku Keith Davis walaupun mengalami metamorfosis sampai edisi kedelapan, namun konsep partisipasi tetap sama, yakni : *...participation is mental and emotional involvement of person in group situation that encourage them to contribute to group goals and*

share responsibility fot them. Ide utamanya tetap tiga hal yaitu : *involvement*, *contribution* dan *responsibility*. Dengan demikian maka partisipasi menimbulkan rasa harga diri dan kemampuan pribadi untuk dapat turut serta dalam keputusan penting yang menyangkut kehidupan masyarakat.

Partisipasi masyarakat dapat diartikan bahwa pembuat keputusan menyarankan kelompok atau masyarakat ikut terlibat dalam bentuk penyampaian saran dan pendapat, barang, keterampilan, bahan dan jasa (Usia and Pribadi, 2014a).

Menurut Theodorson dalam (Mardikanto and Soebiato, 2015) (Latif, Irwan and Mustanir, 2019) partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan seseorang didalam kelompok sosial untuk mengambil bagian peran dari kegiatan masyarakatnya, di luar pekerjaan atau profesinya. Keikutsertaan tersebut, dilakukan sebagai akibat adanya interaksi sosial antara individu yang bersangkutan dengan anggota masyarakat yang lainnya. Perencanaan pembangunan yang tidak memperhatikan partisipasi masyarakat akan menjadi perencanaan hanya di atas kertas saja.

Strategi pembangunan berbasis masyarakat perdesaan harus berakar pada proses partisipatif yang melibatkan penduduk setempat (Cernea 1985) dalam (Green, 2013). Partisipasi masyarakat merupakan modal utama dalam upaya dalam pencapaian sasaran program pemerintah diseluruh wilayah Republik Indonesia (Hiernimawati, Nielwaty and Aliyana, 2018).

Berikut ini dikemukakan beberapa alasan mengapa partisipasi itu penting dalam proses pembangunan (Sumpeno, 2011b);

- 1) Partisipasi dalam praktek yang sederhana telah lama terbangun dalam pemahaman, kesadaran dan kehidupan masyarakat.
- 2) Partisipasi memungkinkan perubahan yang lebih besar dalam cara berfikir, bersikap dan bertindak manusia. Hal ini sulit dilakukan jika perubahan ini hanya dilakukan oleh sebagian kecil atau kelompok tertentu yang tidak terlibat langsung.
- 3) Pemecahan permasalahan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat secara menyeluruh hanya dapat dilakukan melalui proses interaksi, kerjasama dan berbagi peran.
- 4) Penggunaan sumber daya dan pelayanan bagi masyarakat tidak dapat tercapai oleh gagasan yang dibangun oleh pemerintah atau pengambil kebijakan saja, karena sumber daya pendukung lebih banyak dimiliki oleh individu, kelompok atau organisasi masyarakat. Oleh karena itu, kontribusi dan kerangka mekanisme pelayanan harus melibatkan masyarakat sebagai pemilik dan pengguna pelayanan itu.
- 5) Partisipasi merupakan suatu proses pelibatan orang lain terutama kelompok masyarakat yang terkena langsung untuk merumuskan masalah dan mencari solusi secara bersama.
- 6) Masyarakat memiliki informasi yang sangat penting untuk merencanakan program yang lebih baik, termasuk tujuan, pengetahuan, situasi, struktur sosial dan pengalaman menggunakan teknologi untuk kepentingannya.
- 7) Masyarakat akan lebih termotivasi untuk berkerja sama dalam program pembangunan, jika ikut terlibat dan bertanggungjawab di dalamnya.

- 8) Dalam kehidupan demokratis, secara umum masyarakat menerima bahwa mereka berhak berpartisipasi dalam keputusan mengenai tujuan dan harapan yang ingin dicapai.
- 9) Banyak permasalahan pembangunan dibidang pertanian, kesehatan, ekonomi, pendidikan dan kelembagaan yang tidak mungkin dipecahkan dengan pengambilan keputusan perorangan. Partisipasi kelompok sasaran dalam keputusan kolektif sangat dibutuhkan.

Partisipasi didefinisikan sebagai proses di mana individu, kelompok, dan organisasi memilih untuk mengambil peran aktif dalam membuat keputusan yang memengaruhi mereka (Usadolo and Caldwell, 2016).

Dengan demikian dapat diartikan bahwa partisipasi masyarakat adalah sebuah proses keterlibatan aktif anggota masyarakat dalam membuat keputusan yang nantinya akan mempengaruhi kehidupan mereka.

E. Tingkatan Partisipasi Masyarakat

Menurut Sherry R. Arnstein yang dikutip oleh (Wijaksono, 2013) membagi jenjang partisipasi masyarakat terhadap pembangunan dalam 8 tingkat partisipasi masyarakat (*ladder of participation*) dengan berdasarkan kekuasaan yang diberikan kepada masyarakat. Tingkat partisipasi tersebut adalah :

- 1) *Citizen Control* yaitu masyarakat dapat berpartisipasi di dalam dan mengendalikan seluruh proses pengambilan keputusan. Pada tingkatan ini masyarakat memiliki kekuatan untuk mengatur program atau kelembagaan

yang berkaitan dengan kepentingan mereka. Masyarakat memiliki kewenangan dan dapat mengadakan negosiasi dengan pihak luar yang hendak melakukan perubahan tersebut. Usaha bersama warga ini langsung berhubungan dengan sumber dana tanpa bantuan atau melalui pihak ketiga.

- 2) *Delegated Power*, tingkatan ini masyarakat diberi kewenangan untuk membuat keputusan sesuai dengan rencananya. Untuk menyelesaikan permasalahan, pemerintah harus mengadakan negosiasi dengan masyarakat dan tidak memberikan tekanan, masyarakat juga mempunyai tingkat kendali atas keputusan pemerintah.
- 3) *Partnership*, dalam tingkatan ini masyarakat berhak berunding dengan pemerintah, atas kesepakatan kekuasaan dibagi antara masyarakat dengan pemerintah. Dalam tingkatan ini adanya kesepakatan saling membagi tanggung jawab dalam perencanaan, pengendalian keputusan, penyusunan kebijakan serta penyelesaian masalah.
- 4) *Placation*, pemerintah akan menunjuk sejumlah orang dari bagian masyarakat yang dipengaruhi untuk menjadi anggota suatu badan publik, Di mana mereka mempunyai akses tertentu pada proses pengambilan keputusan. Walaupun dalam pelaksanaannya usulan masyarakat tetap diperhatikan, akan tetapi karena kedudukannya yang relatif rendah dan jumlahnya lebih sedikit dari anggota pemerintah maka masyarakat tidak mampu mengambil keputusan.
- 5) *Consultation*, masyarakat tidak hanya diberitahu tetapi juga diundang untuk berbagi pendapat, walaupun tidak ada jaminan bahwa pendapat yang dikemukakan akan menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

- 6) *Informing*, pemegang kekuasaan hanya memberikan informasi kepada masyarakat terkait proposal kegiatan, masyarakat tidak diberdayakan untuk mempengaruhi hasil informasi. Informasi diberikan pada tahapan akhir perencanaan dan masyarakat hanya memiliki sedikit kesempatan untuk mempengaruhi rencana yang telah disusun.
- 7) *Therapy*, Pemerintah berpura-pura melibatkan masyarakat. Meskipun terlibat dalam kegiatan, tujuannya hanya untuk merubah pola pikir masyarakat daripada mendapat masukan dari masyarakat itu sendiri.
- 8) *Manipulation*, adalah tingkatan partisipasi yang paling rendah dimana masyarakat hanya dipakai namanya saja. Kegiatan untuk melakukan manipulasi informasi untuk memperoleh dukungan publik dan menjanjikan keadaan yang lebih baik meskipun tidak akan pernah terjadi.

Delapan tingkatan partisipasi yang berkaitan dengan tipologi di atas terbagi dalam 3 kelompok besar (Wijaksono, 2013), yaitu tidak ada partisipasi sama sekali (*non participation*), yang meliputi *manipulation dan therapy*. Partisipasi masyarakat dalam bentuk tinggal menerima beberapa ketentuan (*degrees of tokenism*) meliputi *informing, consultation dan placation*. Partisipasi dalam bentuk masyarakat mempunyai kekuasaan (*degrees of citizen power*) meliputi *partnership, delegated power, dan citizen power*.

Delapan tingkat partisipasi yang telah dijelaskan akan menjelaskan bahwa terdapat kemungkinan untuk memanipulasi program partisipasi masyarakat menjadi suatu cara yang mengelabui dan mengurangi kemampuan masyarakat dalam mempengaruhi proses pengambilan keputusan.

F. Metode Partisipatif Pemberdayaan Masyarakat

1. Participatory Rural Appraisal (PRA)

Robert Chambers dalam (Supriatna, 2014b) mengemukakan istilah PRA sebenarnya sudah cukup lama diterapkan di Indonesia, namun bagi beberapa kalangan tampaknya masih belum familiar. Mungkin karena banyaknya model pendekatan pengkajian perencanaan yang digunakan. Kalimat Participatory Rural Appraisal sama saja artinya dengan “Pemahaman Kondisi Pedesaan Secara Partisipatif”, yakni merupakan metode dalam merumuskan perencanaan dan kebijakan di wilayah pedesaan dengan cara melibatkan masyarakat seefektif mungkin.

PRA sering digambarkan sebagai metode. Metode tersebut secara kritis mencakup perilaku, sikap, analisis dan tindakan partisipatif. Metode ini biasanya melibatkan, tetapi tidak terbatas pada kelompok kecil di masyarakat (Narayanasamy, 2009) (Chambers, 2012).

Tujuan penerapan metode PRA adalah untuk memberikan dukungan yang efektif dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan dengan berwawasan lingkungan serta berbasis konteks local (Afriansyah *et al.*, 2023). Dalam konteks UU Desa maka PRA dapat memberikan pemahaman kepada para aparatur pemerintahan desa dalam melakukan proses identifikasi potensi dan permasalahan di desanya (Supriatna, 2014b) (Mustanir, Yasin, *et al.*, 2018).

PRA sebagai metode partisipatif yang menekankan pengetahuan lokal dan memungkinkan masyarakat setempat untuk melakukan penilaian, analisis

dan perencanaan mereka sendiri. PRA menggunakan visualisasi dan latihan untuk memfasilitasi berbagi informasi, analisis dan tindakan antara para stake holders. PRA memberikan ruang yang luas kepada masyarakat sebagai pelaku aktif atau subjek dalam mengambil inisiatif, melaksanakan proses dan aksi tindak. Dengan kata lain “menyerahkan pengelolaan kepada orang dalam”, peran orang luar sebagai “fasilitator dan katalisator” proses di komunitas yang siap melakukan perubahan (Uddin and Anjuman, 2014) (Mustanir and Lubis, 2017) (Mustanir, Ahmad; Barisan, Barisan; Hamid, 2017).

The World Bank Explained that PRA is a process which extends into analysis, planning and action. defines PRA as a ‘family of participatory approaches and methods which emphasize local knowledge and enable local people to do their own appraisal, analysis, and planning. PRA adalah sebuah proses dalam menganalisis, perencanaan dan tindakan. Bank Dunia mendefinisikan PRA sebagai metode partisipatif yang menekankan pengetahuan lokal dan memungkinkan masyarakat setempat untuk melakukan penilaian, analisis dan perencanaan mereka sendiri (Mustanir and Lubis, 2017).

PRA is the most suitable and appropriate method to indentify the existing situation of the community. Bahwa PRA merupakan metode yang paling cocok dan sesuai untuk mengidentifikasi situasi yang ada di masyarakat (Alam and Ishan, 2012).

Robert Chambers (Chambers, 1994) memperkenalkan metode *PRA* sebagai alternative bagi para praktisi pembangunan yang memerlukan sebuah metodologi ‘penelitian’ yang bisa membantu mereka memahami masyarakat

secara cepat, dengan informasi aktual, dan biaya murah, serta bisa mengajak masyarakat sebagai pelaku penelitian itu sendiri.

2. Tujuan PRA

Secara umum tujuan PRA untuk mengetahui dan mengkaji fenomena, peristiwa, kapasitas, dan kehidupan sosial untuk membangun aksi bersama dengan menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan. Aspek strategis dalam PRA antara lain;

- a. Menempatkan anggota masyarakat sebagai penentu, subjek dan peran utama dalam pembangunan.
- b. Menempatkan pihak luar sebagai fasilitator proses.
- c. Meningkatkan kapasitas masyarakat melalui aksi bersama dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan.
- d. Proses pembelajaran bagi masyarakat dalam menganalisis situasi dan mengidentifikasi kebutuhan, desain dan melaksanakan pembangunan.
- e. Meningkatkan interaksi dan perilaku masyarakat dalam kegiatan pembangunan

Secara praktis tujuan PRA untuk mengidentifikasi masalah, kebutuhan, potensi, sumber daya dan aksi bersama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Mustanir, Hamid and R. N. Syarifuddin, 2019) (Mustanir, Hamid and rifni N. Syarifuddin, 2019).

3. Pentingnya PRA

PRA dikembangkan berdasarkan suatu pengalaman, tradisi dan metode yang telah dikembangkan sebelumnya. Kepopuleran metode ini tidak lepas dari kritik dari berbagai kalangan akademisi maupun praktisi serta pengujian terhadap kehandalan dan kekinian sebagai suatu cara/metode dalam perencanaan pembangunan berbasis masyarakat. Perjalanan panjang dalam suatu proses pengembangan metodologi, PRA mengalami perubahan dari segi konsep dan penerapan di lapangan (Sumpeno, 2011b).

4. Landasan PRA

PRA dibangun diatas tiga landasan yaitu; (a) Berbagi peran, pengetahuan dan pengalaman, (b) Sikap dan perilaku, serta (c) Metode dan teknik. PRA mendorong optimalisasi keterlibatan masyarakat dalam berbagai peran dan tindakan, pengetahuan dan pengalaman merupakan proses belajar yang dilakukan untuk meningkatkan kapasitas pemahaman tentang apa yang ingin diketahui, pengalaman apa yang dimiliki, siapa saja yang terlibat, informasi apa yang dibutuhkan, dan pelajaran apa yang bermanfaat untuk menentukan solusi dan alternatif tindakan yang diperlukan (Sumpeno, 2011b).

PRA dalam proses perencanaan bermanfaat untuk membangun kebersamaan dan kesamaan pandangan masyarakat tentang keputusan yang akan diambil melalui forum diskusi atau interaksi pelaku yang merepresentasikan seluruh elemen yang ada dalam masyarakat itu. Pada tahap perencanaan, penerapan PRA dilakukan untuk hal-hal berikut :

- 1) Memformulasikan usulan dan prioritas kegiatan pembangunan
- 2) Menyediakan informasi yang lebih rinci tentang kelayakan kegiatan yang diusulkan masyarakat.
- 3) Menyediakan informasi untuk menetapkan strategi atau bentuk intervensi berdasarkan kebutuhan dan masalah yang telah teridentifikasi.
- 4) Menentukan aksi bersama baik dalam aspek pencapaian strategis jangka pendek maupun jangka panjang.

Hasil perencanaan yang telah disusun, ditindaklanjuti dengan proses pengorganisasian kegiatan menyangkut siapa saja yang perlu terlibat dan peran yang dimainkan serta sumber daya apa saja yang akan digunakan untuk merealisasikan rencana yang telah dibuat. Betapapun baiknya sebuah rencana program yang disusun akan bermakna apabila seluruh komponen yang telah dirumuskan dilaksanakan melalui pengorganisasian dan pengelolaan yang memadai.

Application Theory pemberdayaan masyarakat dalam penelitian ini : Pemberdayaan masyarakat sesungguhnya merangkum nilai-nilai sosial. Pemberdayaan sebagai suatu proses dipandang sebagai pengembangan kapasitas, kompetensi, keterampilan dan kesadaran kritis dalam masalah-masalah masyarakat (Erdiaw-Kwasie and Acheampong, 2018).

Sedangkan *Application Theory* perencanaan pembangunan dalam penelitian ini melihat kegiatan perencanaan pembangunan meliputi tiga aspek, yaitu :

1. Analisis, yaitu kajian atau usaha untuk mengetahui dan menguraikan arti suatu keadaan. Data atau bahan mengenai suatu keadaan diurai dan diteliti untuk mengetahui keterkaitannya satu dengan lainnya. Analisis berarti melakukan proyeksi atau perkiraan masa depan yang bertitik tolak dari keadaan masa kini. Analisis wilayah merupakan cara pandang berbagai faktor dalam skala wilayah
2. Kebijakan (*policy*) yaitu, pemilihan rencana yang terbaik untuk pelaksanaan pembangunan meliputi pengetahuan mengenai tujuan, kriteria dan metode untuk menelaah alternatif rencana.
3. Rancangan atau desain (*design*) yaitu rumusan atau sajian rencana.

Perencanaan pembangunan desa merupakan suatu panduan atau model penggalan potensi dan gagasan pembangunan desa yang menitikberatkan pada peranserta masyarakat dalam keseluruhan proses pembangunan (Sumpeno, 2011b).

5. Kajian/Tools PRA

5.1. Transek

Dalam mengamati secara langsung keadaan lingkungan dan sumber daya di Desa, digunakan Teknik Penelusuran Lokasi (Transek). Arti harfiah (terjemahan lurus) dari “Transek” itu sendiri adalah gambar irisan muka bumi. Pada awalnya, transek dipergunakan oleh para ahli lingkungan untuk mengenali dan mengamati “wilayah-wilayah Ekologi” (pembagian wilayah lingkungan alam berdasarkan sifat khusus keadaannya). Teknik Penelusuran Lokasi (Transek) adalah teknik PRA untuk melakukan pengamatan langsung lingkungan dan sumber daya masyarakat, dengan cara berjalan menelusuri wilayah desa mengikuti suatu lintasan tertentu

yang disepakati. Hasil pengamatan dan lintasan tersebut, kemudian dituangkan ke dalam bagan atau gambar irisan muka bumi untuk didiskusikan lebih lanjut.

Jenis-jenis Transek berdasarkan jenis informasi (topik kajian) terdiri dari tiga jenis yaitu Transek Sumber Daya Desa yang bersifat umum, Transek Sumber Daya Alam dan Transek untuk Topik Topik Khusus. Uraian singkat ketiga jenis transek tersebut adalah:

Pertama, Transek Sumber Daya Desa. Penelusuran desa adalah pengamatan sambil berjalan melalui daerah pemukiman desa yang bersangkutan guna mengamati dan mendiskusikan berbagai keadaan. Keadaan-keadaan yang diamati yaitu pengaturan letak perumahan dan kondisinya, pengaturan halaman rumah, pengaturan air bersih untuk keluarga, keadaan sarana MCK (mandi-cuci-kakus), sarana umum desa (antara lain sekolah, tembok dan gapura desa, tiang listrik, puskesmas, dan sebagainya), juga lokasi kebun dan sumber daya pertanian secara garis besar. Kajian transek ini terarah terutama pada aspek-aspek umum pemukiman desa tersebut, terutama sarana-sarana yang dimiliki desa, sedangkan keadaan sumber daya alam dan bukan alam dibahas secara garis besarnya saja. Kajian ini akan sangat membantu dalam mengenal desa secara umum dan beberapa aspek lainnya dari wilayah pemukiman yang kurang diperhatikan.

Kedua, Transek Sumber Daya Alam. Transek ini dilakukan untuk mengenal dan mengamati secara lebih tajam mengenai potensi sumberdaya alam serta permasalahan-permasalahannya, terutama sumber daya pertanian. Seringkali, lokasi kebun dan lahan pertanian lainnya milik masyarakat berada di batas dan luar desa, sehingga transek sumber daya alam ini bisa sampai keluar desa.

Ketiga, Transek untuk Topik Topik Khusus. Transek juga bisa dilakukan untuk mengamati dan membahas topik-topik khusus. Misalnya: transek yang dilakukan khusus untuk mengamati sarana kesehatan dan kondisi kesehatan lingkungan desa, transek wilayah persebaran hama, atau transek khusus untuk mengamati sumber air dan sistem pengelolaan aliran air serta irigasi, pendidikan dasar dan sebagainya.

Tujuan Penelusuran lokasi (Transek) dilakukan untuk memfasilitasi masyarakat agar mendiskusikan keadaan sumber-sumber daya dengan cara mengamati langsung hal yang didiskusikan di lokasinya.

Manfaat Transek bagi masyarakat penelusuran lokasi ini akan menimbulkan perasaan senang karena mereka dapat mengenal langsung desanya, keadaan, pengetahuan dan keterampilan mereka kepada sesama petani/nelayan dan orang luar. Bagi 'orang luar' untuk melihat dengan jelas mengenai kondisi alam dan rumitnya sistem yang ada dan pemeliharaan sumber daya alam yang dijalankan oleh masyarakat. Kita dapat belajar tentang cara masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya alam. Di dalam perencanaan program, transek dipergunakan untuk observasi langsung bagi kegiatan penjajagan kebutuhan dan potensi. Sedangkan dalam evaluasi program, teknik ini dapat dimanfaatkan untuk mengetahui fakta-fakta dan perubahan yang telah terjadi.

5.2. Pemetaan Swadaya

Pemetaan adalah teknik PRA yang digunakan untuk memfasilitasi diskusi mengenai keadaan wilayah tertentu beserta lingkungannya. Keadaan-keadaan tersebut digambarkan ke dalam peta atau sketsa wilayah.

Tujuan kajian pemetaan ini adalah memfasilitasi masyarakat untuk mengungkapkan keadaan kelurahan/desanya. Memfasilitasi masyarakat untuk mengkaji perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungannya, serta sebab dan akibat dari perubahan tersebut.

Manfaat kajian pemetaan bagi masyarakat telah turun temurun hidup dan bekerja di wilayahnya, sehingga mereka jarang memikirkan kembali seluruh keadaan lingkungannya karena telah terlalu terbiasa. Dengan membuat peta, masyarakat mengambil 'jarak' dari lingkungannya. Mereka dapat merenungkan dan memikirkan kembali keadaan-keadaan yang dipetakan itu, serta merencanakan arah perubahan. Bagi 'orang luar' pemetaan bermanfaat untuk mengetahui gambaran tentang keadaan wilayah, termasuk berbagai kejadian, masalah, hambatan, dan sumber daya yang ada di masyarakat. Selain itu pembuatan peta akan membantu 'orang luar' untuk menyelami cara berpikir masyarakat, prioritas-prioritas mereka, alasan-alasan mereka melakukan pekerjaan tertentu, cara mereka mengatasi masalah, dan sebagainya.

Manfaat-manfaat pemetaan yang lainnya adalah : Kegiatan pemetaan bersama masyarakat dapat menimbulkan partisipasi yang sangat baik karena kegiatan ini cukup mudah dan mengasyikan dilakukan oleh berbagai lapisan masyarakat. Dengan demikian, kegiatan pemetaan juga merupakan bagian dari

proses penyadaran. Selain itu, informasi yang didapat dalam pemetaan dapat menjadi dasar dari pemilihan dan penggalan informasi dengan teknik – teknik yang lainnya. Biasanya pemetaan dilakukan untuk dasar perencanaan dan evaluasi program di waktu-waktu mendatang.

G. Hasil-Hasil Penelitian Yang Relevan dan State of The Art

Untuk mengetahui posisi teoritik penelitian (*theoretical positioning*) ini dapat dikemukakan dengan melihat perbandingannya melalui penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya sebagaimana disajikan pada Tabel 2.1 berikut ini:

Tabel 2.1 Penelitian-Penelitian Terdahulu yang Relevan

NO	PENELITIAN TERDAHULU	ASPEK YANG DITELITI	TEMUAN
1	(Chaudhuri, 2016) Understanding 'Empowerment'	Konteks kekuasaan dalam pemberdayaan masyarakat pada pembangunan	Pentingnya peran kekuasaan dalam mengatur para praktisi, pengambil kebijakan pembangunan dan lainnya untuk membantu masyarakat dalam upaya pemberdayaannya.
2	(Atikalani, 2012) Perencanaan Pembangunan Desa Dalam Perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Studi Tentang Perencanaan	Proses penyusunan perencanaan pembangunan desa. Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat	Dasar perencanaan pembangunan desa masih kurang kuat. Proses perencanaan dilakukan evaluasi internal. Faktor pendukung : partisipasi masyarakat, adanya fasilitator. Faktor penghambat : Kemampuan aparat desa, kemampuan manajerial, terbatasnya sarana dan

NO	PENELITIAN TERDAHULU	ASPEK YANG DITELITI	TEMUAN
	Pembangunan Desa di Kabupaten Barito Selatan)	penyusunan perencanaan pembangunan desa	prasarana, lemahnya lembaga perundangan daerah
3	(Ahfan, Asrori and Sipahutar, 2015). Pemberdayaan Masyarakat Pada Program PNPM MP, Desa Peradaban, CSR dan Posdaya (Konteks lahirnya UU No. 6 Tahun 2014)	Metode pendekatan dengan mobilisasi dan pendekatan partisipatif serta keterlibatan kelembagaan pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat	Keterlibatan kelembagaan pemerintah desa dalam pemberdayaan secara struktural masih lemah. Pemerintah desa belum melakukan fungsi pemberdayaan masyarakat disebabkan belum adanya pelimpahan kewenangan dan pembiayaan dari pemerintah kabupaten. Sementara pemberdayaan masyarakat desa yang sesuai dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 menekankan pada aspek: keterlibatan aktor penyelenggara; Arah; Aspek kolaboratif pembangunan desa; Pelaksana; Pelembagaan percepatan; dan Etika/ norma pemberdayaan masyarakat.
4	(Adamson and Bromiley, 2013). Community Empowerment: Learning From Practice In Community Regeneration	Peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam pengambilan keputusan di United Kingdom	Kebijakan belum mengarah pada pemberdayaan masyarakat
5	(Quimbo, Perez and Tan, 2018). Community Development Approaches and Methods: Implications For Community Development Practice and	Model terpadu dari praktik pengembangan masyarakat di Filipina	Pendidikan dan pengorganisasian masyarakat tetap menjadi strategi populer untuk intervensi pada pembangunan yang berhasil

NO	PENELITIAN TERDAHULU	ASPEK YANG DITELITI	TEMUAN
	Research. Journal Community Development		
6	(Wulandari, 2017). Strategi Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Sukaresik Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran	Strategi perencanaan pembangunan desa, hambatan-hambatannya dan upaya mengatasi hambatan	Strategi perencanaan pembangunan desa belum optimal karena hambatan pemahaman dan kesadaran masyarakat yang rendah, minimnya partisipasi, minimnya sumber anggaran, tarik menarik dalam pengambilan keputusan, keterbatasan ekonomi dan SDM. Upaya dilakukan memberikan pemahaman dan mengajak partisipasi masyarakat, menambah jumlah anggaran operasional serta pengaturan jadwal pembangunan.
7	(Rezaul Islam, 2014). Non-Governmental Organizations' Role for Social Capital and Community Empowerment in Community Development: Experience from Bangladesh	Kontribusi oleh organisasi non-pemerintah (LSM) pada modal sosial dan pemberdayaan masyarakat yang memfasilitasi pengembangan masyarakat	Temuan menunjukkan bahwa LSM memainkan peran penting dalam pengembangan modal sosial dan pemberdayaan masyarakat terhadap pengembangan masyarakat. Temuan penelitian ini akan memberikan masukan yang berharga untuk bidang pengembangan masyarakat.
8	(Maryati, Isya and Azmeri, 2018). Studi Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar	Proses perencanaan pembangunan & faktor penyebab tidak optimalnya partisipasi masyarakat	Proses perencanaan pembangunan tidak optimal dimana penetapan prioritas tidak melibatkan masyarakat. Perencanaan partisipatif rendah dilihat pada fokus perencanaan, partisipatoris, sinergitas, legalitas. Faktor penyebab internal masyarakat mengharapkan pemberian insentif, tidak mau berkorban, kurang peduli dan merasa kurang penting. Faktor eksternal

NO	PENELITIAN TERDAHULU	ASPEK YANG DITELITI	TEMUAN
			tidak ada kesepakatan masyarakat dalam mewujudkan kebutuhan, kurang terbukanya para pelaku pembangunan dalam menyelenggarakan proses
9	(Woodyard, Przybyla and Hallam, 2015) A Community Health Needs Assessment Using Principles of Community-Based Participatory Research in A Mississippi Delta Community: A Novel Methodological Approach	Pendekatan metodologis untuk melakukan penilaian kebutuhan kesehatan masyarakat dengan menggunakan prinsip-prinsip penelitian partisipatif berbasis masyarakat	Temuannya mengidentifikasi masalah kesehatan sebagai prioritas, kebutuhan, dan adanya kesenjangan layanan. Temuan ini akan digunakan untuk menginformasikan perencanaan, pengembangan, implementasi, dan evaluasi program di masa depan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat.
10	(Haryadi Ahmad, 2016). Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan Silae Kecamatan Ulujadi Kota Palu	Partisipasi Masyarakat Dalam Musrenbang	3 (tiga) tahapan partisipasi yaitu tahapan perencanaan, tahapan pelaksanaan dan tahapan pengawasan terhadap pelaksanaan Musrenbang. Semua tahapan belum berjalan maksimal. Penyebabnya karena kurangnya sosialisasi informasi dan pendampingan dari pihak SKPD terkait mengenai mekanisme Musrenbang dan sinkronisasi program prioritas pembangunan
11	(Fadil, 2013). Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan Kotabaru Tengah	Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dan peran pemerintah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam	Bentuk partisipasi dilihat dari representasi peserta yang hadir, kehadiran pada pelaksanaan, pemberian usulan masyarakat. Peran pemerintah sebagai regulator untuk melahirkan kebijakan-kebijakan dan mekanisme-mekanisme perencanaan yang tepat untuk menumbuhkan partisipasi

NO	PENELITIAN TERDAHULU	ASPEK YANG DITELITI	TEMUAN
		pelaksanaan Musrenbang	masyarakat serta menciptakan ruang partisipasi, juga melakukan sosialisasi dan pelaksanaan musrenbang kelurahan.
12	(Akbar, Suprpto and Surati, 2018). Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Jatimulya Kabupaten Boalemo	Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	Faktor yang mempengaruhinya adalah faktor kepemimpinan yang sudah baik, komunikasi yang baik dan pendidikan.

Sumber : Olahan Data Sekunder, 2023

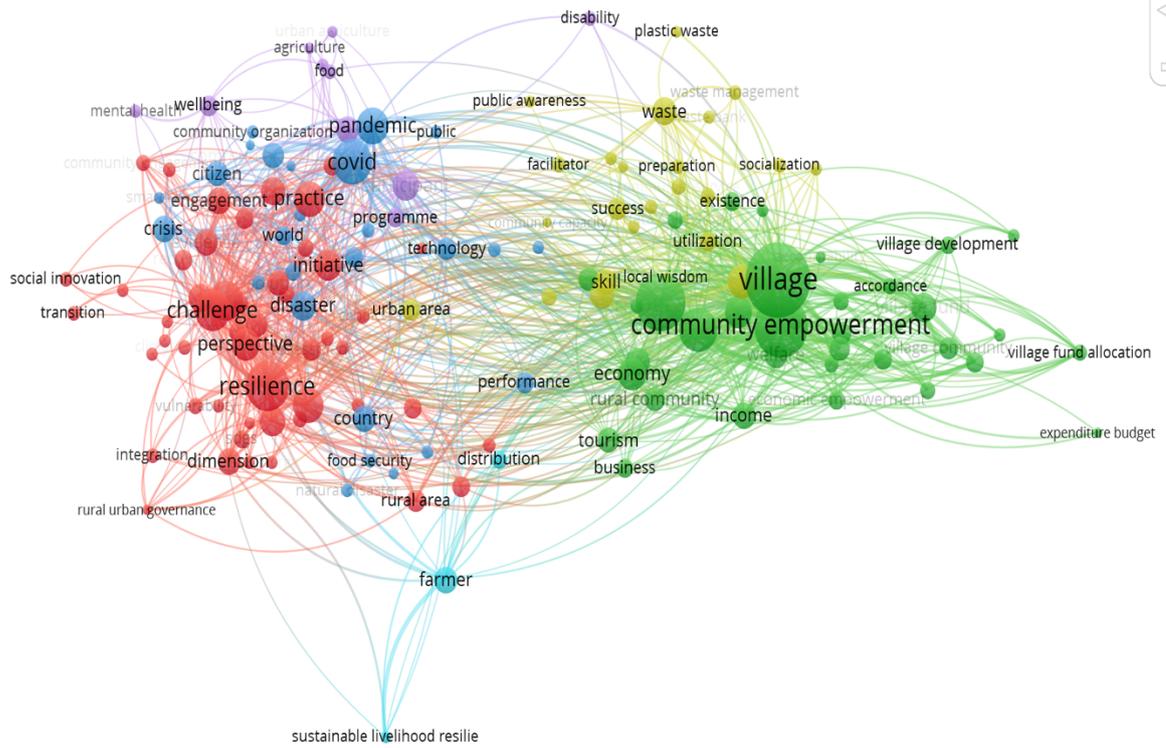
Berbagai hasil penelitian terdahulu yang dipaparkan dalam tabel 2.1 diatas dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan (Chaudhuri, 2016). Menekankan pada konteks kekuasaan dalam pemberdayaan masyarakat pada pembangunan sosial.
2. Penelitian (Atikalani, 2012) di Kabupaten Barito Selatan. Menekankan pada proses penyusunan perencanaan pembangunan desa dengan faktor-faktor yang mendukung dan menghambat penyusunan perencanaan pembangunan desa tersebut pada perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.
3. Penelitian (Ahfan, Asrori and Sipahutar, 2015). Menekankan pada metode dengan mobilisasi dan pendekatan partisipatif serta keterlibatan kelembagaan pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat.

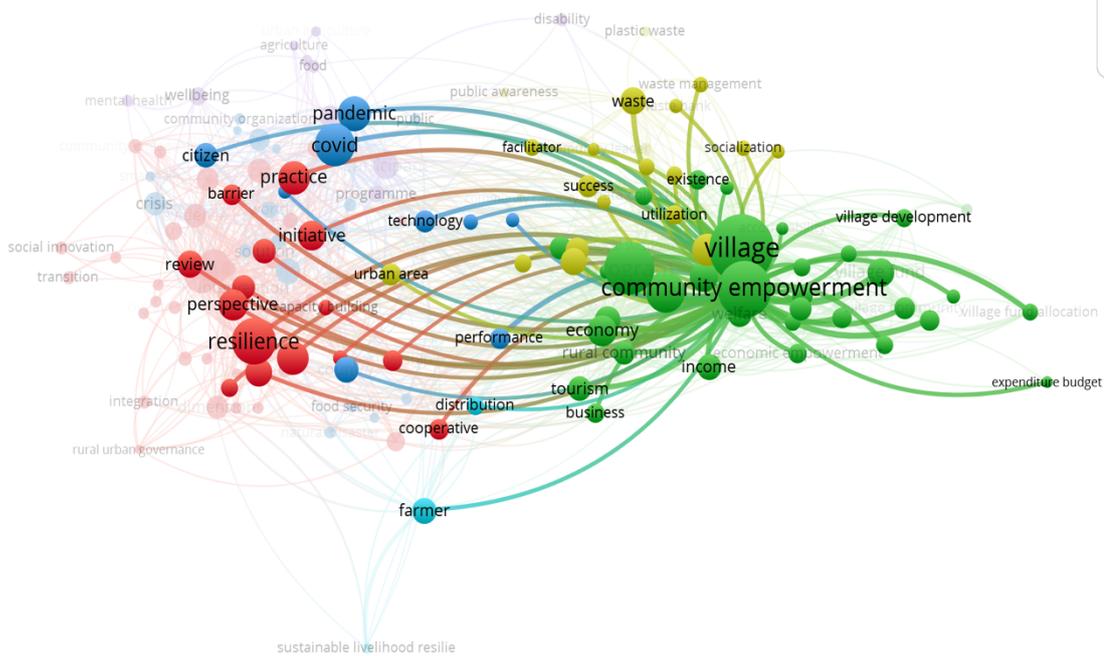
4. Penelitian yang dilakukan (Adamson and Bromiley, 2013) pada aspek peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan di United Kingdom khususnya pada program Communities First Negara Wales yang bertujuan memberdayakan komunitas lokal.
5. Penelitian yang dilakukan (Quimbo, Perez and Tan, 2018). Penelitian meneliti pada 217 studi pengembangan masyarakat dan merekomendasikan model terpadu dari praktik pengembangan masyarakat di Filipina. Serta menjadikan pendidikan dan pengorganisasian masyarakat tetap menjadi strategi populer sebagai intervensi pada pencapaian pembangunan yang berhasil.
6. Penelitian (Wulandari, 2017) Di Desa Sukaresik Kabupaten Pangandaran. Menekankan pada aspek strategi perencanaan pembangunan desa, hambatan-hambatannya dan upaya mengatasi hambatan tersebut.
7. Penelitian (Rezaul Islam, 2014) di Bangladesh menekankan pada aspek kontribusi oleh organisasi non-pemerintah (LSM) pada modal sosial dan pemberdayaan masyarakat yang memfasilitasi pengembangan masyarakat.
8. Penelitian (Maryati, Isya and Azmeri, 2018) di Aceh Besar. Melihat pada aspek studi partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan & faktor penyebab tidak optimalnya partisipasi masyarakat.
9. Penelitian (Woodyard, Przybyla and Hallam, 2015) di Charleston, Mississippi menekankan pada aspek pendekatan metodologis untuk melakukan penilaian kebutuhan kesehatan masyarakat dengan menggunakan prinsip-prinsip penelitian partisipatif berbasis masyarakat.

10. Penelitian (Haryadi Ahmad, 2016) di Kota Palu. Melihat aspek partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan dengan 3 (tiga) tahapan partisipasi yaitu tahapan perencanaan, tahapan pelaksanaan dan tahapan pengawasan terhadap pelaksanaan Musrenbang.
11. Penelitian (Fadil, 2013) Di Kotabaru Tengah. Melihat bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dan peran pemerintah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pelaksanaan Musrenbang.
12. Penelitian (Akbar, Suprpto and Surati, 2018) di Kabupaten Boalemo. Menekankan pada aspek faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan.

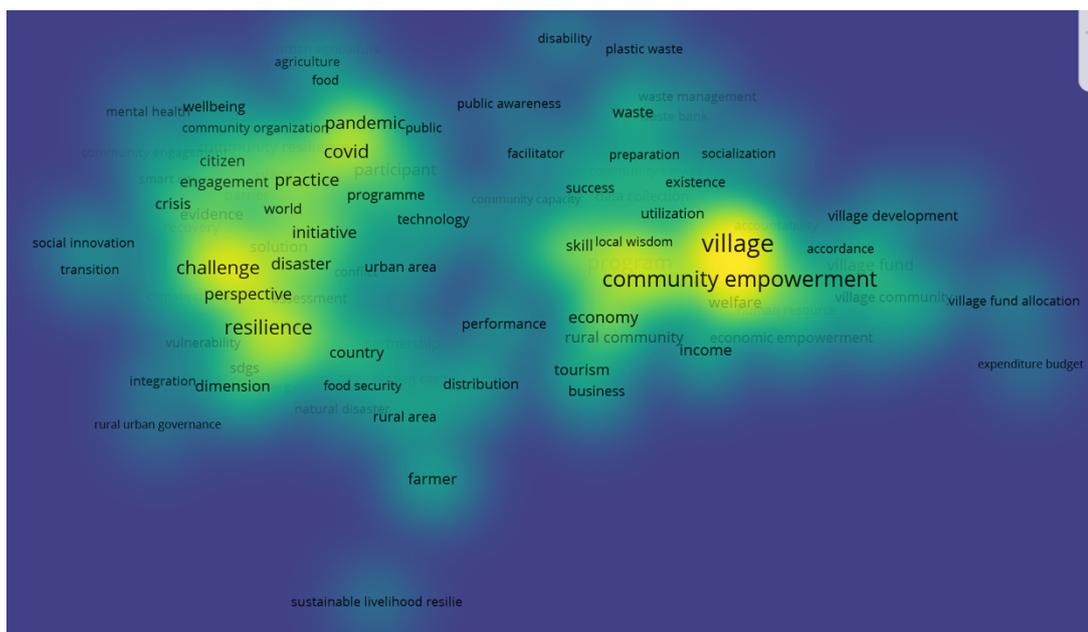
Peneliti juga mencoba memastikan bahwa penelitian dalam bentuk artikel pada jurnal dan prosiding internasional bereputasi yang terindeks pada basis data Scopus dan WoS dalam empat tahun terakhir 2020 sd 2023 melalui bantuan aplikasi **Dimensions**, ditemukan Judul Artikel dan konten dalam Abstrak “*Community Empowerment*” sebanyak 2628 judul. Selanjutnya menggunakan bantuan aplikasi **VOSviewer** menemukan bahwa **belum ada** artikel yang membahas hubungan antara *Community Empowerment* dengan *Development Planning*, sehingga konsep Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan cocok digunakan dalam riset pemberdayaan masyarakat untuk menemukan Novelty. Sehingga **State of The Art** dan **Novelty** dalam penelitian ini yang diharapkan menjadi model baru pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Penjelasan ini dapat dilihat pada gambar 2.1 dan gambar 2.2 di bawah ini.



Gambar 2.1. Network Visualization 2020-2023



Gambar 2.2. Network Visualization 2020-2023



Gambar 2.4. Density Visualization 2020-2023

Dari studi literatur (*Literature Study*) tinjauan penelitian sebelumnya diatas, maka ditemukan celah penelitian (*Research Gap*) yang diangkat menjadi rumusan masalah. *State of The Art* dalam penelitian penulisan disertasi ini penulis melihat sejauh mana penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan berhubungan dengan pemberdayaan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan yang melibatkan warga masyarakat khususnya teori-teori yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat dengan metode partisipatif. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang kami sampaikan diatas, dalam penelitian kami secara khusus tidak hanya melihat bagaimana pemberdayaan masyarakat dilakukan, teori perencanaan pembangunan ataupun partisipasi masyarakat semata. Tetapi lebih jauh dari itu mencoba menelusuri pelibatan masyarakat tersebut sebagai upaya memberdayakan masyarakat sebagai subjek pembangunan, upaya-upaya

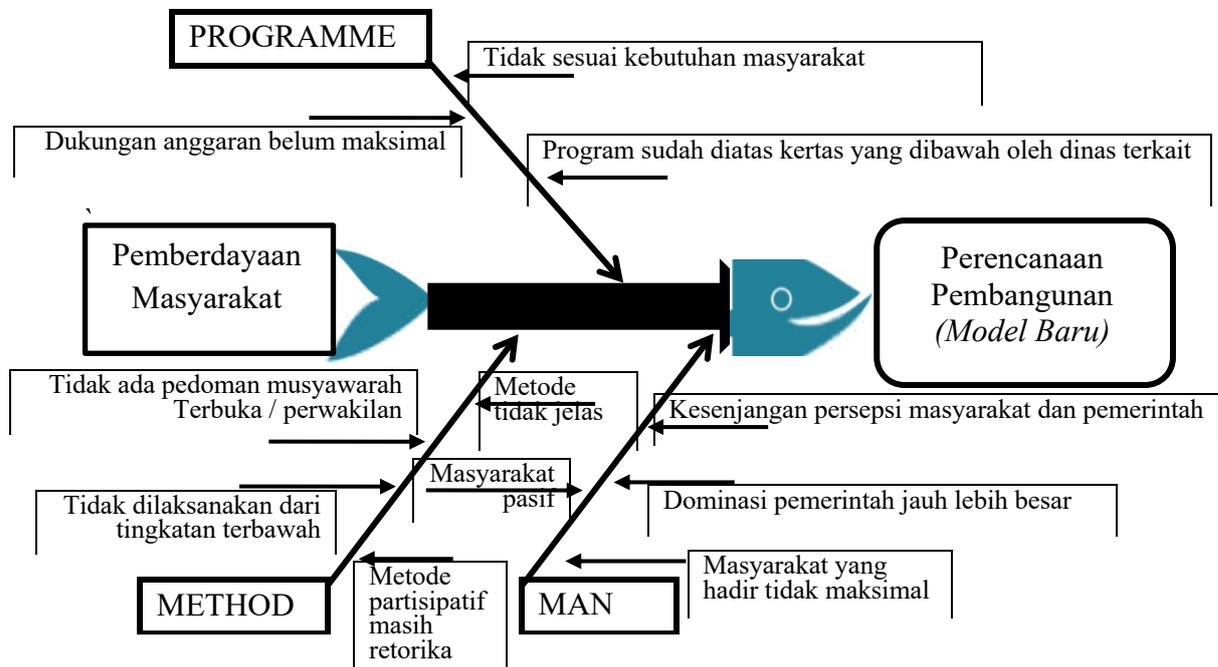
pemberdayaan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan berdasarkan berdasarkan teori yang ada. Inilah titik tegas yang menunjukkan *State of The Art* dalam rencana penelitian ini.

Akhirnya jika penelitian ini berjalan sesuai dengan alur dari kerangka konseptual, nantinya diharapkan temuan penelitian melahirkan sebuah gambaran model baru pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan pembangunan sebagai sebuah model untuk dapat memecahkan masalah yang ada pada masyarakat dalam melakukan penilaian, analisis berdasarkan kebutuhan, kemampuan, pengetahuan dan gagasan dalam masyarakat tersebut, menyusun skala prioritas dalam perencanaan pembangunan dengan upaya memberdayakannya.

H. Kerangka Konseptual

Pemikiran dari penelitian ini dikembangkan dengan *State of The Art* untuk memperoleh *model baru* dengan melihat sejauh mana penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan berhubungan proses perencanaan pembangunan yang melibatkan warga masyarakat khususnya teori-teori pemberdayaan masyarakat dengan metode partisipatif. Oleh karena itu dibuat kerangka konseptual dalam bentuk *Fish Bone* untuk lebih memudahkan pemahaman dari penelitian ini.

Kerangka konseptual secara ringkas dapat dilihat pada Gambar 2.5 :



Gambar 2.5 Kerangka Konseptual (Fish Bone)

Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan berhubungan dengan proses perencanaan pembangunan yang melibatkan warga masyarakat khususnya teori-teori pemberdayaan masyarakat dengan metode partisipatif serta temuan-temuan peneliti menemukan permasalahan yang muncul berkaitan dengan upaya pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan-kegiatan perencanaan pembangunan di desa. Permasalahan-permasalahan tersebut diidentifikasi sebagai sebab potensial dari satu masalah dan menganalisis masalah tersebut dalam bentuk Fish Bone. Masalah di golongan menjadi sejumlah kategori yang berkaitan, mencakup Manusia (Man), Metode (Method), Prosedur/Kebijakan (Programme).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan melihat pemberdayaan masyarakat pada proses menuju perencanaan pembangunan di Desa Carawali. Dengan metode ini dihasilkan pandangan mendalam, sistemik dalam melihat sejumlah hal yang terkait, pengumpulan data, analisa informasi dan pelaporan hasil yang diperoleh. Dengan demikian akan diperoleh pemahaman yang baik dan mendalam mengenai objek penelitian.

Penelitian kualitatif ini dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data secara spesifik dan partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema yang umum, serta menafsirkan makna dalam bentuk parafrasa. Siapapun yang terlibat dalam penelitian kualitatif ini menerapkan perspektif atau cara pandang penelitian yang bergaya induktif, berfokus terhadap makna individual, dan menterjemahkan kompleksitas suatu persoalan.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di Kabupaten Sidenreng Rappang dengan studi kasus pada pemberdayaan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan yang

dilaksanakan di Desa Carawali Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang. Pemilihan lokasi berdasarkan alasan-alasan yang telah di uraikan pada latar belakang masalah. Selain itu penelitian dilakukan secara kedalaman khusus pada Desa Carawali, dimana peneliti menjadi salah satu Instrumen Kunci (*researcher as key instrument*) untuk mengumpulkan data melalui berbagai instrument yang ada. Dari sini akan diperoleh gambaran utuh Desa Carawali pada pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan pembangunan.

B. Pendekatan Penelitian

Tipe penelitian deskriptif *explanatory* yang merupakan kombinasi antara penelitian deskriptif dan penelitian *explanatory*, untuk menemukan jawaban yang menyeluruh atas pertanyaan penelitian (Punch, 2006) Keith Punch menuturkan : *A descriptive set out to collect, organize and summarize information about the matter being studied while an explanatory study is on the other hand, sets out to explain and account for the descriptive information. Description is a more restricted purpose than explanation.*

Penjelasannya, penelitian deskriptif ditujukan untuk menjawab pertanyaan “apa”, sementara penelitian eksplanasi akan menjawab pertanyaan “mengapa” dan “bagaimana”. Kedua tipe penelitian ini digunakan untuk menemukan jawaban yang menyeluruh atas pertanyaan penelitian dalam mengidentifikasi dan mengeksplorasi.

Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif. (Creswell, 2013) mengemukakan menggunakan metode kualitatif karena pendekatan ini memiliki kelebihan dalam mengungkap fenomena atau studi kasus, mempunyai fleksibilitas yang tinggi bagi peneliti ketika menentukan langkah penelitian. Fenomena yang dimaksud dalam penelitian ini adalah fenomena yang berkaitan pemberdayaan masyarakat menuju proses perencanaan pembangunan yang ada di Desa Carawali.

Penelitian ini akan mencoba mendeskripsikan dan mengeksplorasi minimnya pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan perencanaan pembangunan didesanya, mendeskripsikan dan mengeksplorasi upaya-upaya pemberdayaan masyarakat sebagai partisipan subjek dalam perencanaan pembangunan, mendeskripsikan sejauhmana penggunaan metode pemberdayaan diterapkan dan dijalankan dalam perencanaan pembangunan. Hingga akhirnya melahirkan sebuah gambaran model baru pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Desa Carawali.

C. Sumber Data dan Informan

1. Sumber Data

Lofland dalam (Moleong, 2006) sumber utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain yaitu: *Person, Place, dan Paper*.

Person adalah informan yaitu Bappeda, Kepala Desa, aparatur desa dan tokoh masyarakat untuk menggali informasi mendalam mengapa masyarakat

kurang diberdayakan dalam kegiatan perencanaan pembangunan bagaimana upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Sumber data *Place* adalah Desa Carawali berupa kegiatan-kegiatan perencanaan pembangunan yang telah dilaksanakan. Sedangkan *Paper* adalah berita acara, daftar hadir dan dokumen sekunder lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan perencanaan pembangunan.

2. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah mereka yang termasuk subjek penelitian yang memahami informasi objek penelitian baik pelaku maupun orang lain yang memahami objek penelitian. Jadi yang menjadi informan penelitian ini adalah Dinas Bappeda yang berkaitan dengan pengambilan kebijakan perencanaan pembangunan serta tokoh yang terlibat atau memahami perencanaan pembangunan yang ada di Desa Carawali. Peneliti membagi tiga informan dalam penelitian ini yakni informan kunci (*key person*), informan utama dan informan pendukung. *Key person* yang dianggap mengetahui lebih jauh mengenai penyelenggaraan perencanaan pembangunan di desa. Termasuk didalamnya bagaimana upaya pelibatan pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Informan utama adalah mereka yang memahami secara teknis pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Informan pendukung adalah mereka yang dapat memberikan informasi tambahan.

Informasi yang diperoleh dalam wawancara mendalam meliputi minimnya pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan perencanaan pembangunan didesanya, upaya-upaya pemberdayaan masyarakat sebagai partisipan subjek dalam perencanaan pembangunan, serta penggunaan metode pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan pembangunan.

D. Fokus dan Deskripsi Fokus Penelitian

1. Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian ini adalah :

- a. Pemberdayaan masyarakat.
- b. Perencanaan pembangunan.
- c. Upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan pembangunan.
- d. Model baru pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan pembangunan.

2. Deskripsi Fokus

Penelitian ini berfokus untuk dideskripsikan pada hal-hal sebagai berikut :

- a. Pemberdayaan masyarakat. Diukur melalui indikator keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan, tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan, masyarakat sebagai subjek atau pelaku utama dalam kegiatan perencanaan pembangunan.

- b. Perencanaan pembangunan. Diukur melalui kegiatan musyawarah warga dalam rangka penggalian potensi dan gagasan pembangunan desa yang menitikberatkan pada peran serta masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan desanya.
- c. Upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Diukur melalui indikator seperti cara-cara dan metode partisipatif pemerintah desa dalam melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan dengan memberikan kemampuan kepada masyarakat untuk dapat mengembangkan kapasitas, kompetensi, keterampilan dan kesadaran kritisnya.
- d. Model baru pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Indikator untuk model baru akan lahir dari proses riset setelah memperoleh hasil pada konsep pemberdayaan masyarakat dan konsep perencanaan pembangunan. Model baru disini adalah gambaran temuan pemberdayaan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan di Desa Carawali dan rekomendasi model pemberdayaan dalam perencanaan pembangunan.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen dalam penelitian ini adalah :

1. Pedoman Wawancara, berupa pedoman wawancara mendalam kepada para informan untuk memperoleh informasi terkait pemberdayaan masyarakat khususnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan,

tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan, masyarakat sebagai subjek atau pelaku utama dalam kegiatan perencanaan pembangunan, kegiatan musyawarah warga dalam rangka penggalan potensi dan gagasan pembangunan desa yang menitikberatkan pada peranserta masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan desanya, cara-cara dan metode partisipatif pemerintah desa dalam melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan dengan memberikan kemampuan kepada masyarakat untuk dapat mengembangkan kapasitas, kompetensi, keterampilan dan kesadaran kritisnya.

2. Pedoman Observasi, dilakukan dengan melakukan kunjungan kelokasi dalam mengidentifikasi aparat dan masyarakat yang pernah terlibat dalam proses kegiatan perencanaan pembangunan secara langsung seperti kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan.
3. Catatan dokumen terdiri dari data yang terkait dengan penyelenggaraan perencanaan pembangunan seperti berita acara pelaksanaan, daftar hadir, undangan dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan.

F. Teknik Pengumpulan dan Pengabsahan Data

1. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang di pergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Wawancara mendalam (*Indepth Interview*) dan Wawancara Bertahap

Wawancara mendalam adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan informan atau orang yang diwawancarai dengan atau tanpa menggunakan pedoman. Sedangkan wawancara bertahap sedikit lebih formal dan sistematis bila dibandingkan dengan wawancara mendalam (*indepth interview*). Wawancara ini sedikit lebih dilaksanakan secara bebas dan juga mendalam tetapi kebebasan ini tetap tidak terlepas dari pokok permasalahan yang akan ditanyakan kepada responden atau informan (Bungin, 2017).

Untuk lebih akuratnya informasi yang diperoleh, maka selama proses wawancara akan digunakan alat perekam dan pencatatan serta disiapkan *interview guide* (panduan wawancara).

b. Observasi

Observasi atau pengamatan dalam penelitian ini adalah pengamatan yang digunakan dalam penelitian dan telah direncanakan secara serius sebelumnya pengamatan ini berkaitan dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan, pengamatan dicatat secara sistematis dan dihubungkan dengan proposisi umum (Bungin, 2017).

c. Dokumen

Dokumen yang terkait dengan penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan seperti berita acara pelaksanaan, daftar hadir,

undangan dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan.

2. Teknik Pengujian Validitas dan Realibilitas Data

Keabsahan data dalam penelitian kualitatif merupakan faktor penting, adalah satu teknik yang digunakan untuk mengetahui validitas data adalah model yang dikembangkan oleh Patton dalam (Moleong, 2006) yaitu triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu diluar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data. Teknik triangulasi yang umum digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya (Moleong, 2006).

Menurut Patton dalam (Moleong, 2006) triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dengan cara :

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang yang dikatakan sepanjang tertentu.
4. Membandingkan keadaan perspektif seseorang tentang berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang berpendidikan rendah, orang berada, orang pemerintahan dan lain-lain.

5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan. Dalam hal ini jangan banyak mengharapkan bahwa hasil perbandingan tersebut merupakan kesamaan pandangan, pendapat, atau pemikiran yang penting disini ialah bisa mengetahui adanya alasan-alasan terjadinya perbedaan tersebut.

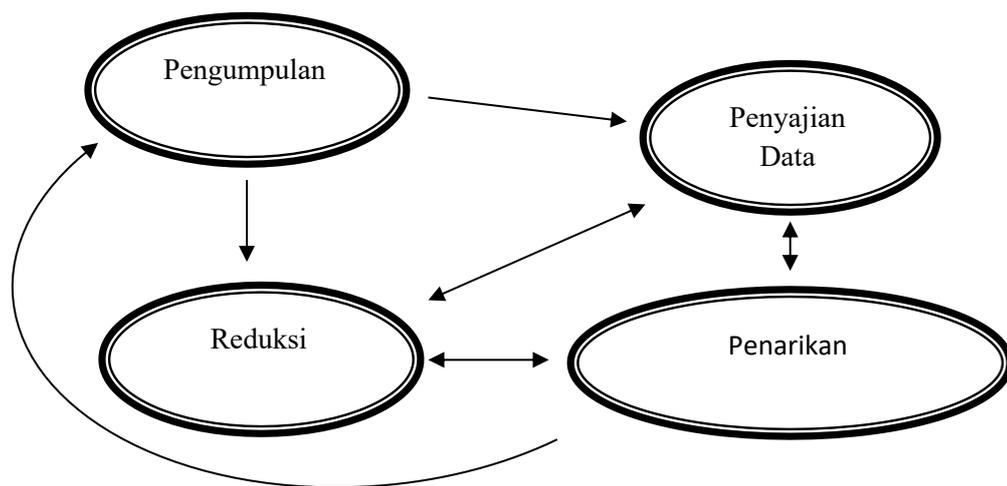
Sedangkan konsep reliabilitas tidak dapat terpisahkan dari validitas karena validitas penelitian akan melahirkan reliabilitas penelitian. Seorang ahli penelitian kualitatif Patton dalam (Bandur, 2019) menegaskan bahwa reliabilitas merupakan faktor yang sangat penting untuk dipertimbangkan para peneliti kualitatif dalam mendesain, menganalisis, dan melaporkan hasil penelitian kualitatif.

G. Teknik Analisis Data

Data yang telah diperoleh dari lapangan didukung dengan teori dan kajian pustaka yang mendasari penelitian, diolah, dan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif.

Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan terutama berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data yang diperoleh di lapangan selanjutnya dianalisis dengan pemaparan serta interpretasi (penafsiran) secara mendalam. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Data Model Interaktif (*Interactive Model Of Analysis*) yang

dikembangkan oleh Miles dan Huberman (Sugiyono, 2015). Teknik tersebut mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu *Collection Data* (Pengumpulan Data), *Reduction Data* (Data Reduksi), *Display Data* (Penyajian Data), dan *Conclusion Drawing/Verifyng* (Penarikan Kesimpulan).



Gambar 3.1. Komponen Analisis Data Model Interaktif (*Interactive Model*)

Sumber : Miles dan Huberman, (Sugiyono : 2015)

Adapun penjelasan dari gambar analisis data dan model interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data (*Collection Data*)

Peneliti melakukan pengumpulan data awal atau data mentah. Analisis dalam penelitian ini dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Data awal yang dikumpulkan adalah data yang berasal dari hasil wawancara dengan para informan.

2. Reduksi Data (*Reduction Data*)

Peneliti mereduksi (menyortir/memeriksa) data awal yang didapatkan dengan merangkum hasil studi dokumentasi dan hasil wawancara dengan memfokuskan pada hal-hal yang penting, kemudian menyederhanakan serta membuat abstraksi agar didapatkan data yang dibutuhkan sehingga dapat ditarik kesimpulannya atau dibuktikan sendiri oleh peneliti.

3. Penyajian Data (*Display Data*)

Penyajian data ini dilakukan dengan melakukan penarikan kesimpulan dari pengambilan tindakan atas sekumpulan informasi yang telah dipilih. Artinya peneliti mengambil tindakan menyajikan data untuk memahami peristiwa yang terjadi dan mengarah pada analisis atau tindakan lebih lanjut berdasarkan pemahaman yang telah didapatkan sebelumnya.

4. Menarik Kesimpulan (*Conclution Drawing/ Verifying*)

Peneliti menarik kesimpulan dari data yang telah diproses dan telah disusun, kemudian diambil suatu kesimpulan atau makna dari data yang telah disederhanakan untuk disajikan dan sekaligus untuk memprediksikan melalui pengamatan dari data yang telah diperoleh.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Wilayah Penelitian

1. Gambaran Umum Kabupaten Sidenreng Rappang

Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan salah satu dari 32 kabupaten yang ada di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan luas 188.325 km² terbagi dalam 11 Kecamatan, terdiri dari 38 Kelurahan dan 68 Desa. Secara geografis terletak kira-kira 183 Km di sebelah Utara Kota Makassar (Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan). Secara astronomis, terletak antara 3°43' - 4°09' Lintang Selatan dan 119°41'-120°10' Bujur Timur. Wilayah Kabupaten Sidrap masing-masing berbatasan: sebelah utara dengan Kabupaten Enrekang dan Kabupaten Pinrang, sebelah timur dengan Kabupaten Luwu dan Kabupaten Wajo, sebelah selatan dengan Kabupaten Barru dan Kabupaten Soppeng serta sebelah barat dengan Kota Pare-pare dan Kabupaten Pinrang.

Secara geografis, wilayah Kabupaten Sidrap merupakan daerah yang berada pada wilayah bagian utara Provinsi Sulawesi Selatan dan dapat dilihat pada peta administrasi pada gambar 4.1

Tabel 4.1 Distribusi Luas Wilayah per Kecamatan di Kabupaten Sidenreng Rappang

No	Nama Kecamatan	Luas Wilayah (KM2)	Kepadatan/KM2
1	2	3	4
1	Panca Lautang	15.393	124.60
2	Tellulimpoe	10.320	249.28
3	Watang Pulu	15.131	245.76
4	Baranti	5.389	617.11
5	Panca Rijang	3.402	934.98
6	Kulo	7.500	185.85
7	Maritenggae	6.590	823.84
8	Watang Sidenreng	12.081	167.21
9	Pitu Riawa	21.043	140.96
10	Dua Pitue	6.999	448.48
11	Pitu Riase	84.477	27.64
Kabupaten Sidenreng Rappang		188.325	169.64

Sumber: di olah dari Data BPS 2023

Keadaan demografi atau jumlah penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2020 adalah sebanyak 319.990, dimana jumlah penduduk terbesar terdapat di Kecamatan Maritenggae sebanyak 54.291 atau 16,97% dari keseluruhan penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang yang ada di Kecamatan lainnya. Sedangkan Kecamatan Baranti yang menjadi tempat pengambilan data jumlah penduduknya 33.256 atau 10,39%. Distribusi penduduk per kecamatan di Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dilihat pada Tabel 4.2 dibawah ini.

Tabel 4.2 Distribusi Penduduk Per Kecamatan di Kabupaten Sidenreng Rappang

No	Nama Kecamatan	Jml Penduduk	% /Kecamatan
1	2	3	4
1	Panca Lautang	19.179	5,99
2	Tellu Limpoe	25.726	8,04
3	Watang Pulu	37.186	11,62
4	Baranti	33.256	10,39
5	Panca Rijang	31.808	9,94
6	Kulo	13.939	4,36
7	Maritengngae	54.291	16,97
8	Watang Sidenreng	20.201	6,31
9	Pitu Riawa	29.663	9,27
10	Dua Pitue	31.389	9,81
11	Pitu Riase	23.350	7,30
Kabupaten Sidenreng Rappang		319.990	100,00

Sumber: di olah dari Data BPS 2023

Ditinjau dari rasio perbandingan jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki dan perempuan, secara umum setiap kecamatan memiliki rasio berimbang antara penduduk berjenis kelamin laki-laki dengan penduduk berjenis kelamin perempuan seperti ditunjukkan dalam tabel 4.3 dibawah.

Tabel 4.3 Rasio Penduduk berdasarkan Gender per Kecamatan di Kabupaten Sidenreng Rappang

No	Nama Kecamatan	LK	Pr	Rasio (Lk/Pr)
1	2	3	4	5
1	Panca Lautang	9471	9708	97,56
2	Tellu Limpoe	12586	13142	95,77
3	Watang Pulu	18554	18632	99,58
4	Baranti	16462	16794	98,02
5	Panca Rijang	15662	16146	97,00
6	Kulo	6930	7009	98,87
7	Maritengngae	26639	27652	96,34
8	Watang Sidenreng	10010	10191	98,22
9	Pitu Riawa	14773	14890	99,21
10	Dua Pitue	15367	16022	95,91
11	Pitu Riase	11949	11401	104,81
Kabupaten Sidenreng Rappang		158403	161587	98,03

Sumber : diolah dari Data BPS Tahun 2023

Sedangkan jumlah desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dilihat pada Tabel 4.4 dibawah ini.

Tabel 4.4 Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Sidenreng Rappang

No	Nama Kecamatan	Kelurahan	Desa
1	2	3	4
1	Panca Lautang	3	7
2	Tellu Limpoe	6	3
3	Watang Pulu	5	5
4	Baranti	5	4
5	Panca Rijang	4	4
6	Kulo	0	6
7	Maritengngae	7	5
8	Watang Sidenreng	3	5
9	Pitu Riawa	2	10
10	Dua Pitue	2	8
11	Pitu Riase	1	11
Kabupaten Sidenreng Rappang		38	68

Sumber : diolah dari Data BPS Tahun 2023

Saat ini Kabupaten Sidenreng Rappang dipimpin oleh Bupati Ir. H. Dollah Mando dan Wakil Bupati Ir. H. Mahmud Yusuf, M.Si., merupakan hasil pemilukada tahun 2019 dengan mengusung Visi; “Terwujudnya Kabupaten Sidenreng Rappang Sebagai Daerah Agrobisnis Yang Maju Dengan Masyarakat Religius, Aman, Adil dan Sejahtera”. Untuk mengimplementasikan Visinya, Bupati dan wakil Bupati mengusung misi yang merupakan penjabaran dari Visi yang telah dicanangkan sebagai berikut;

- 1) Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan publik (kesehatan, pendidikan, Penyediaan lapangan kerja) dan pelayanan kebutuhan dasar

lainnya dalam rangka peningkatan indeks kualitas hidup (kesejahteraan) masyarakat.

- 2) Memajukan usaha agrobisnis, UKMK, dan pengembangan industri pengolahan hasil usaha pertanian dengan penerapan konsep petik, olah, kemas, dan jual.
- 3) Meningkatkan dan mengembangkan jaringan kerjasama (*networking*) dalam rangka peningkatan kinerja investasi dan penanaman modal di daerah.
- 4) Mengembangkan dan meningkatkan kinerja pembangunan infrastruktur (jalan, jembatan, irigasi, pasar dan telekomunikasi) untuk memperlancar mobilitas arus barang dan jasa.
- 5) Memajukan dan meningkatkan kinerja birokrasi pemerintahan daerah dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas, disiplin dan profesional dengan konsep *good governance* dan *electronic governance*.
- 6) Optimalisasi sumber daya daerah berbasis pemberdayaan masyarakat pedesaan melalui penerapan konsep desa cerdas (*smart village*) sehat, mandiri, serta pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
- 7) Mewujudkan dan menciptakan kondisi kehidupan beragama yang religius, serta meningkatkan kualitas budaya lokal sebagai basis nilai dalam menciptakan kehidupan sosial masyarakat yang, aman, kondusif dan harmonis.

2. Gambaran Umum Desa Carawali

Carawali adalah sebuah desa yang merupakan penggabungan dua Kampung Cenrana yang termasuk wilayah Pemerintahan Distrik Guru, Swapraja Sidenreng, kewedanan Sidenreng Rappang. Demi kesempurnaan dan kelancaran roda pemerintahan setelah pembentukan daerah tingkat I Sulawesi Selatan termasuk daerah tingkat II Sidenreng Rappang maka terbentuk pula Desa Carawali yang disebut Wanua Carawali (Dua Limpoe) yang akhirnya dirubah menjadi Desa Carawali sampai sekarang yang meliputi Dusun Carawali dan Dusun Cenrana. Desa Carawali Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang yang letaknya berada pada jalur pariwisata Makassar-Tanah Toraja. Desa Carawali sebagai desa singgah bagi wisatawan domestik maupun manca negara, selain itu terdapat pula pusat kerajinan tenun tradisional Lipa Sabbe (Sarung Sutra), monumen pahlawan A Cammi tempat yang bersejarah, sungai Celli'e, keindahan binatang iguana dan ekosistem di dalamnya dan hamparan sawah yang membentang sangat luas, maka Desa Carawali sebagai desa agrowisata menuju Desa wisata lingkungan. Desa Carawali merupakan salah satu tempat para pejuang di Sidenreng Rappang pada masa perlawanan melawan penjajah untuk menyusun taktik dan strategi, sehingga nama Carawali tetap dipertahankan sampai sekarang.

Struktur Organisasi Kantor Desa Carawali Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 4.5 dibawah.

**Tabel 4.5 Struktur Organisasi Kantor Desa Carawali
Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang**

Nama	Jabatan
1	2
Abd.Hafid Mekka AM.P.,S.IP	Kepala Desa
Sirajuddin S.IP	Sekretaris
Purqan Hafid S.Pi	Kasi Pemerintahan
Putri Ekawati S.IP	Kasi Kesejahteraan
Ayu Lestari M. Saleh	Kasi Pelayanan
Ika Paramita. M	Kaur Keuangan
Risnawati	Kaur Umum
Yahya S.Pd	Kaur Perencanaan
Sahruni S.Pd	Staf Kaur Perencanaan
Hariana	Staf Kaur Keuangan
Muhammad Saleh	Kepala Dusun II
H. Abd. Latif. S	Kepala Dusun I

Sumber Data : Kantor Desa Carawali, 2022

Kondisi umum Desa terdiri dari batas wilayah, luas wilayah, demografis, iklim, jumlah penduduk menurut jenis pekerjaan, jumlah penduduk menurut agama, berikut akan di jelaskan secara rinci :

**Tabel 4.6 Batas Desa Carawali Kecamatan Watang Pulu
Kabupaten Sidenreng Rappang**

Batas	Desa Kelurahan	Kecamatan
1	2	3
Sebelah Utara	Kelurahan Manisa	Baranti
Sebelah Selatan	Kelurahan Arawa	Watang Pulu
Sebelah Timur	Desa Sereang	Maritengngae
Sebelah Barat	Desa Ciro-ciroe	Watang Pulu

Sumber Data : Kantor Desa Carawali, 2022

Tabel 4.7 Luas Wilayah Desa Carawali Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang

1) Luas pemukiman	33,20 Ha
2) Luas persawahan	806,41 Ha
3) Luas perkebunan	63,64 Ha
4) Luas pekarangan	58 Ha
5) Perkantoran	6,58 Ha
6) Luas prasarana umum lainnya	16,17 Ha
7) Total lainnya	984 Ha

Sumber Data : Kantor Desa Carawali, 2022

Tabel 4.8 Gambaran Umum Demografis Desa Carawali Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang

Tingkat Penduduk	Jumlah (Jiwa)
Jumlah Penduduk Desa Carawali	1991
Jumlah Menurut Jenis Kelamin	
Laki-laki	964
Perempuan	1027
Jumlah Menurut Kepala Keluarga	596 KK

Sumber Data : Kantor Desa Carawali, 2022

**Tabel 4.9 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Pekerjaan Desa Carawali
Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang**

Pekerjaan	Jumlah
1	2
Mengurus Rumah Tangga	541
Pelajar	510
Pensiunan	10
PNS	38
TNI	2
Perdagangan	7
Petani	286
Peternak	1
Nelayan	1
Industri	1
Transpormasi	8
Karyawan Swasta	21
Karyawan BUMN	3
Karyawaan BUMD	13
Karyawan Honoror	11
Tukang Cukur	10
Tukang Batu	21
Penata Rambut	3
Anggota DPRD prov	2
Anggota DPRD Kab	10
Konsultan	2
Dokter	1
Pelaut	4
Wiraswasta	200
Jumlah	1991

Sumber Data : Kantor Desa Carawali, 2022

Tabel 4.10 Jumlah Penduduk Menurut Agama Yang Dipeluk di Desa Carawali Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang

Agama	Jumlah Penganut
1	2
Islam	1986
Kristen	-
Hindu	5
Jumlah	1991

Sumber Data : Kantor Desa Carawali, 2022

B. Hasil Penelitian

Sebagaimana yang telah di uraikan pada bab sebelumnya pemberdayaan masyarakat yang dimaksudkan adalah pelibatan masyarakat sebagai upaya memberdayakan masyarakat sebagai subjek pembangunan, upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan berdasarkan teori yang ada.

Dengan penekanan pada fokus penelitian yang mendeskripsikan pada hal-hal pemberdayaan masyarakat dengan diukur melalui indikator keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan, tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan, masyarakat sebagai subjek atau pelaku utama dalam kegiatan perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan dengan diukur melalui kegiatan musyawarah warga dalam rangka penggalian potensi dan gagasan pembangunan desa yang menitikberatkan pada peranserta masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan desanya. Upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Diukur

melalui indikator seperti cara-cara dan metode partisipatif pemerintah desa dalam melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan dengan memberikan kemampuan kepada masyarakat untuk dapat mengembangkan kapasitas, kompetensi, keterampilan dan kesadaran kritisnya. Dengan akhir model baru pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan pembangunan yang mana indikator untuk model baru akan lahir dari proses riset setelah memperoleh hasil pada konsep pemberdayaan masyarakat dan konsep perencanaan pembangunan. Model baru disini adalah gambaran temuan pemberdayaan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan di Desa Carawali dan rekomendasi model pemberdayaan dalam perencanaan pembangunan.

Maka untuk menjawab hal tersebut akan diuraikan dalam variable dibawah ini :

1. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan

Pemberdayaan masyarakat dengan diukur melalui indikator keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan, tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan, masyarakat sebagai subjek atau pelaku utama dalam kegiatan perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan dengan diukur melalui kegiatan musyawarah warga dalam rangka penggalan potensi dan gagasan pembangunan desa yang menitikberatkan pada peranserta masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan desanya.

Dengan melihat tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan khususnya kehadiran masyarakat dalam musyawarah-musyawarah

yang membicarakan perencanaan pembangunan serta masyarakat sebagai subjek atau pelaku utama dalam kegiatan perencanaan pembangunan. Dapat dilihat pada beberapa kegiatan seperti pada musrenbang RKAD hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 masyarakat yang hadir adalah 41 orang. Begitupula dalam kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan lainnya seperti kegiatan program kerja mahasiswa tanggal 17 Juli 2020 hanya 15 orang masyarakat yang hadir. Evaluasi program kerja dan sosialisasi aplikasi SIBERAS dan Agribisnis Store tanggal 15 Agustus 2020 hanya 22 orang masyarakat yang hadir. Juga kegiatan sosialisasi pemanfaatan pekarangan dalam mendukung ketersediaan pangan rumah tangga tanggal 5 Nopember 2020, masyarakat yang hadir hanya 17 orang dalam satu dusun saja yaitu dari Dusun Cenrana. Sekilas beberapa pertemuan musyawarah warga nampak cukup dihadiri oleh warga masyarakat Desa Carawali. Tetapi masyarakat yang hadir bukanlah merupakan representasi perwakilan warga. Bahkan jika kita melihat persentasi dari jumlah warga Desa Carawali secara keseluruhan yaitu 1.991 nampak masih sangat minim.

Terdapat dua prinsip dasar yang selayaknya dianut dalam proses pemberdayaan. Pertama, menciptakan ruang atau peluang bagi masyarakat untuk mengembangkan dirinya secara mandiri dan menurut cara yang dipilihnya sendiri. Kedua, mengupayakan agar masyarakat memiliki kemampuan untuk memanfaatkan ruang atau peluang yang tercipta. Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memberikan energi atau daya kepada masyarakat, khususnya masyarakat yang rentan atau lemah yang ditujukan agar masyarakat tersebut bisa mengakses seluas-luasnya yang menjadi haknya demi tercapainya

suatu kondisi sosial, ekonomi, dan kualitas kehidupan yang lebih baik. Pemberdayaan adalah memberikan energi agar yang bersangkutan mampu untuk bergerak secara mandiri, membantu orang-orang yang tidak berdaya memandang diri mereka sebagai individu-individu yang mampu, mau dan mampu mengendalikan kehidupan mereka, selaku pelaku aktif yang menggunakan pengaruhnya pada perumusan kebijakan, keputusan, dan proses yang mempengaruhi kehidupan mereka. Pelibatan masyarakat selaku pelaku aktif artinya memberdayakan masyarakat agar menjadi subyek dari perencanaan pembangunan.

Atas prinsip dasar yang selayaknya dianut dalam proses pemberdayaan agar masyarakat dapat memanfaatkan ruang atau peluang yang tercipta dalam berpartisipasi pada perencanaan pembangunan. Ini kami coba tanyakan kepada salah satu informan yaitu Bapak Amir yang merupakan tokoh masyarakat serta salah satu anggota BPD yang bertempat tinggal di Dusun Cenrana Desa Carawali pada hari Senin, 15 Maret 2021. Saat ditanyakan bagaimana pemberdayaan masyarakat dengan melihat tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan perencanaan pembangunan? Beliau menjawab :

Partisipasi masyarakat itu betul-betul tinggi karena usulan-usulan mereka di desa apabila diundang untuk mengikuti musyawarah dusun antusias datang, memang betul-betul ingin membangun desa ini karena usulannya itu dia pertahankan sampai di RKP bagaimana usulannya supaya dikerjakan cepat supaya bisa bermanfaat di desanya. (Wawancara 15 Maret 2021).

Dengan pertanyaan yang sama saat ditanyakan kepada Kepala Desa Carawali Bapak Abd. Hafid Mekka tanggal 4 Januari 2021 dan Ketua BUMDesa Anugerah Mandiri Bapak Rudianto tanggal 2 Maret 2021 mereka menjawab :

Alhamdulillah peserta musrembang tentu mewakili seluruh unsur masyarakat, kita melihat yang ada adalah mewakili masyarakat kurang mampu bahkan ada yang mewakili pelajar, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidik, kepala dusun dan seluruh staf desa. Untuk musrembang tokoh tokoh yang dipilih adalah tokoh masyarakat dan tokoh perempuan (Wawancara dengan Kepala Desa Carawali Bapak Abd. Hafid Mekka tanggal 4 Januari 2021)

Kalau saat ini alhamdulillah yang dilakukan Pemerintah Desa Carawali dengan melibatkan seluruh tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Desa Carawali misalkan dari tokoh pemuda, tokoh agamanya, tokoh yang lansia juga di undang untuk membahas semua agenda-agenda perencanaan yang akan dilakukan di Desa Carawali. Kalau selama ini yang saya lihat peserta yang menghadiri musyawarah sudah mewakili masyarakat karena meskipun sebenarnya pada saat musrenbang itu dilakukan mungkin ada yang merasa tidak terwakili tetapi Pak Kepala Desa memberikan undangan kepada yang di tokohkan di masyarakat itu. (Wawancara dengan Ketua BUMDesa Anugerah Mandiri Bapak Rudianto 2 Maret 2021)

Masih dalam hal partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan seperti yang disampaikan oleh Kepala Bappeda Sidrap Bapak Andi Muhammad Arsjad saat wawancara di ruang kerja beliau tanggal 5 Mei 2021, beliau menyampaikan :

Kalau berdasarkan pengalaman kami masyarakat yang hadir dalam musyawarah tersebut sudah mewakili. Cuma yang menjadi masalah saat menetapkan delegasi yang mewakili mereka ke tingkat yang lebih tinggi misalnya tingkat kecamatan dan kabupaten, saat ada diskusi dalam pembagian komisi, mereka yang menjadi delegasi tidak mengetahui dengan persis usulan-usulan yang telah dibahas di tingkatan sebelumnya (desa). Motivasi terbesar dari masyarakat yang hadir dalam musyawarah nampaknya didasarkan keinginan atas harapan yang sangat besar atas program-program pembangunan di wilayah mereka. (Wawancara 5 Mei 2021).

Dalam hal pelibatan masyarakat sebagai pelaku utama atau subyek dalam perencanaan pembangunan khususnya memutuskan program kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan Ketua BUMDesa Anugerah Mandiri Bapak Rudianto menjawab:

Sangat-sangat dilibatkan karena di desa itu keputusan tertinggi ada di musyawarah desa apalagi kalau musrenbang ini segala bentuk ide dan partisipasi itu tergantung dari keputusan musyawarah tersebut jadi kehadiran atau keterlibatan masyarakat itu sangat-sangat penting dalam memutuskan atau pengambilan keputusan. (Wawancara 2 Maret 2021)

Saat ditanyakan kepada Kepala Bappeda Sidrap Bapak Andi Muhammad Arsjad saat wawancara di ruang kerja beliau tanggal 5 Mei 2021, bagaimana pelibatan masyarakat sebagai subyek atau pelaku dalam perencanaan pembangunan khususnya dalam musyawarah perencanaan pembangunan, beliau menyampaikan :

Masyarakat yang diundang hadir dalam musrenbang di tingkat kecamatan biasanya tidak hadir sehingga hanya diwakili oleh perangkat desa. Sehingga apa yang sudah disampaikan dibawah biasanya terputus lagi keatas. Saat ditanyakan ke mereka bagaimana usulanmu ini, bagaimana kondisinya mereka tidak punya data dan tidak lengkap, sehingga dinas opd terkait akhirnya mengambil alih. (Wawancara 5 Mei 2021).

Pelaksanaan kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan tidak dilaksanakan mulai dari tingkatan terbawah sehingga program-program yang ada di tingkat desa bukan merupakan cerminan usulan warga yang berbasis tingkatan terbawah atau *bottom up*. Bahkan menurut pengamatan peneliti saat hadir dalam kegiatan musrenbang RKAD hari selasa tanggal 28 Januari 2020 program-program yang dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan tingkat desa adalah program yang sudah ada di atas kertas yang dibawa oleh dinas terkait di kabupaten.

2. Upaya Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan

Upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Diukur melalui indikator seperti cara-cara dan metode partisipatif pemerintah desa dalam melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan dengan memberikan kemampuan kepada masyarakat untuk dapat mengembangkan kapasitas, kompetensi, keterampilan dan kesadaran kritisnya.

Pemberdayaan masyarakat sesungguhnya merangkum nilai-nilai sosial. Pemberdayaan sebagai suatu proses dipandang sebagai pengembangan kapasitas, kompetensi, keterampilan dan kesadaran kritis dalam masalah-masalah masyarakat.

Tetapi sejak awal bahwa pemberdayaan individu dipelajari dalam konteks kolektif, dan termasuk pengetahuan, keterampilan, aspirasi, dan konsep diri tentang bagaimana bekerja sama dengan orang lain, bagaimana melakukan tindakan kolektif yang efektif.

Saat ditanyakan bagaimana upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dengan meningkatkan kompetensi dan kemampuan masyarakat dalam mengidentifikasi masalah dan kebutuhan mereka pada saat perencanaan pembangunan. Bapak Amir yang merupakan tokoh masyarakat serta salah satu anggota BPD yang bertempat tinggal di Dusun Cenrana Desa Carawali pada hari Senin, 15 Maret 2021, memberikan jawaban :

Di dusun kami itu sebelum ada perencanaan pembangunan desa kami selaku anggota BPD dan kepala desa mengadakan musyawarah dusun untuk apa-apa kebutuhan masyarakat yang paling pokok yang perlu diajukan saat musyawarah desa nanti. Apakah itu masalah pemberdayaan masyarakat ataukah pembangunan fisik misalnya pembuatan talud. Kalau perlu talud itu misalnya dapat digunakan dalam pemberdayaan masyarakat misalnya ada tambahan penghasilan dari situ perlu dimusyawarahkan.

Bagaimana nanti pemberdayaan supaya tidak mengambil atau tidak dikerjakan dari orang lain/orang luar dusun atau jika perlu jangan pakai alat berat kalau bisa supaya masyarakat diberdayakan ada tambahan penghasilan disitu.

Penjelasan dari Bapak Amir yang merupakan salah seorang informan dalam penelitian kami ini sebenarnya ingin menunjukkan bahwa ada upaya dari Pemerintah Desa Carawali agar dana yang sudah berada di desa dapat dimaksimalkan untuk pemberdayaan masyarakat setempat dan tidak keluar dari desa mereka. Lanjut beliau menjelaskan :

Saya lihat ini masyarakat betul-betul mengusulkan apa-apa yang memang dibutuhkan dalam masyarakat sehingga dia bisa nanti berpartisipasi apa-apa yang kita bangun nanti disitu, apakah dia ikut dengan tenaga, pemikiran bahkan dengan materi dan sebagainya.

Kalau upaya pemerintah desa dalam proses pembangunan ini banyak. Upaya pemerintah desa itu biasa mengadakan pelatihan peningkatan kapasitas BPD, peningkatan kapasitas kepala dusun supaya nanti dalam pembangunan ini masyarakat bisa juga turut berpartisipasi dalam pembangunan tersebut.

Dari penjelasan Bapak Amir diatas upaya dari Pemerintah Desa Carawali mengembangkan kapasitas, kompetensi dan keterampilan sudah ada. Hanya saja temuan peneliti dalam peningkatan kapasitas berupa pelatihan-pelatihan lebih ditujukan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Dusun yang mewakili masyarakat. Belum menyentuh kepada khalayak masyarakat banyak yang berbasis kelompok. Padahal dalam esensi pemberdayaan menekankan keterlibatan masyarakat banyak. Selanjutnya Bapak Amir menjelaskan lagi :

Masyarakat saya lihat itu kalau ada rapat musyawarah dusun memang betul-betul diundang dan diberi pemahaman bagaimana nanti pembangunan ini dilanjutkan dan bisa bermanfaat sehingga kapasitas masyarakat itu bisa dimanfaatkan atau bisa mengetahui apa tujuan dan maksud pembangunan nanti ini supaya respon pembangunan ini tidak pro kontra.

Masyarakat ini memang sangat dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan supaya pembangunan ini tidak berpihak ke pribadi karena apabila masyarakat ini tidak diaktifkan dalam pembangunan ini nanti pembangunan ini banyak yang memprotes atau tidak setuju sehingga terjadilah pro/kontra di masyarakat, dalam perencanaan pembangunan. Pemerintah itu memang betul-betul melibatkan masyarakat dusun supaya usulan-usulan mereka di dusun itu dapat diterima di musyawarah desa nanti. (Wawancara 15 Maret 2021).

Saya mencoba mengajukan beberapa pertanyaan lebih mendalam tentang hal ini kepada Ketua BUMDes Anugerah Mandiri Bapak Rudianto menyangkut kompetensi atau kemampuan masyarakat. Berikut dapat dilihat hasil wawancara menyangkut indikator seperti cara-cara dan metode partisipatif pemerintah desa dalam melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan dengan memberikan kemampuan kepada masyarakat untuk dapat mengembangkan kapasitas, kompetensi, keterampilan dan kesadaran kritisnya.

Bagaimana menurut bapak kemampuan masyarakat didalam mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan yang mereka butuhkan pada saat kegiatan-kegiatan perencanaan pembangunan ?

Beliau menjawab :

Kalau misalkan kemampuan masyarakat memiliki masalah dan kebutuhan kita tahu kalau di masyarakat untuk setiap masalah sebenarnya kalau kita mau identifikasi semua masalah dalam perencanaan anggaran, dalam perencanaan pemberdayaan mungkin tidak bisa tercover semua karena setiap masyarakat atau anggota masyarakat itu memiliki keinginan dan

kebutuhan yang berbeda-beda tapi analisisnya kita identifikasi dari segi yang urgensinya dulu mana yang lebih penting untuk didahulukan seperti itu jadi untuk kemampuan masyarakat mungkin sangat-sangat mampu pak untuk mengidentifikasi masalahnya di lingkungan Carawali.

Penjelasan dari Ketua BUMDes Anugerah Mandiri Bapak Rudianto diatas menyangkut kemampuan masyarakat diatas hampir sejalan dengan apa yang telah disampaikan sebelumnya oleh Bapak Amir dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menyangkut kompetensi atau kemampuan masyarakat. Peningkatan kompetensi atau kemampuan masyarakat lebih pada hanya pemberian pemahaman saat musyawarah warga. Temuan peneliti peningkatan kompetensi atau kemampuan masyarakat yang sesungguhnya melalui upaya pelatihan-pelatihan sangat minim. Apalagi jika berbicara peningkatan kompetensi sumber daya manusia masyarakat desa dalam hal keilmuan dan metode dalam perencanaan pembangunan. Peneliti dalam berbagai kegiatan perencanaan pembangunan di masyarakat belum pernah melihat dan mendengar bahwa ada kegiatan khusus dalam pendampingan masyarakat yang berupaya memahamkan kepada masyarakat bagaimana metode partisipatif dalam perencanaan pembangunan.

Saya mencoba bertanya kembali kepada Ketua BUMDes Anugerah Mandiri Bapak Rudianto atas upaya pemberdayaan masyarakat dalam hal peningkatan kompetensi atau kemampuan masyarakat ini.

Apa upaya atau solusi kira-kira yang sudah dilakukan pemerintah desa didalam meningkatkan kompetensi masyarakat tadi didalam proses perencanaan pembangunan?

Jawab : Seperti kalau solusi dari desa pak, misalkan itu tadi kalau sudah diberikan pemberdayaan pasti dikasih pelatihan itu dari segi keterampilan, kalau misalkan dari segi pembangunan fisik seperti jalan atau area itu sudah baik dilalui, otomatis sangat mempengaruhi kegiatan perekonomian di desa Carawali.

Dari penjelasan Ketua BUMDes Anugerah Mandiri Bapak Rudianto atas upaya pemberdayaan masyarakat dalam hal peningkatan kompetensi jelas bahwa tidak ada upaya khusus di masyarakat yang berupaya memahamkan kepada masyarakat bagaimana metode partisipatif dalam perencanaan pembangunan. Peningkatan yang dimaksud oleh informan diatas lebih kepada pelatihan-pelatihan keterampilan berkaitan dengan kegiatan fisik di desa.

Atas dasar tersebut peneliti mencoba mengetahui apa kendala dan hambatan pemerintah desa dalam hal peningkatan kompetensi masyarakat dalam perencanaan pembangunan.

Adakah hambatan yang dialami pemerintah desa dalam meningkatkan kemampuan masyarakat pada kegiatan proses perencanaan pembangunan?

Jawab : Kalau hambatan yang dialami pemerintah dalam meningkatkan kompetensi atau kemampuan masyarakat pada proses perencanaan pembangunan mungkin agak minim untuk hambatan karena tadi kita sudah diskusikan di musyawarah jadi otomatis kita disitu bisa menilai karena sebelum juga perencanaan biasanya ada dibentuk tim untuk menggarap semua itu mulai dari tingkat dusun naik ketingkat desa kemudian dimusyawarahkan di desa jadi untuk hambatan-hambatan itu sudah memang diminimalisir di dusun masing-masing.

Dari penjelasan Ketua BUMDes Anugerah Mandiri Bapak Rudianto semakin mempertegas bahwa upaya pemerintah desa dalam pemberdayaan

masyarakat khususnya peningkatan kompetensi atau kemampuan masyarakat lebih kepada pemberian pemahaman dalam musyawarah-musyawarah. Sekalipun demikian penjelasan dari Bapak Rudianto mengatakan ada pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam pemberian skill fisik kepada masyarakat. Hanya saja memang tidak pernah ada peningkatan kompetensi atau kemampuan masyarakat dalam pemberian pengetahuan metode dalam perencanaan pembangunan sesuai dengan temuan peneliti.

Peneliti selaku instrument dalam penelitian ini yang mengikuti berbagai kegiatan-kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan di Desa Carawali antara lain kegiatan musrenbang, PH2D, Sosialisasi Kegiatan Pemanfaatan Pekarangan dalam Mendukung Ketersediaan Agenda Pangan Rumah Tangga dan lain sebagainya. Melihat bahwa memang belum ada upaya peningkatan kapasitas dan keterampilan berkaitan pemberian pengetahuan metode dalam perencanaan pembangunan. Padahal kegiatan-kegiatan tersebut adalah kegiatan yang sangat mendukung pemberdayaan masyarakat dan membutuhkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai pemberian pengetahuan metode dalam perencanaan pembangunan.

Saat peneliti mencoba menanyakan lebih lanjut tentang faktor-faktor penyebab hal ini kepada informan Ketua BUMDes Anugerah Mandiri Bapak Rudianto.

Faktor-faktor yang mempengaruhi upaya meningkatkan kemampuan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan apa saja pak?

Jawab : Kalau faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan kompetensi kemampuan masyarakat dalam proses perencanaan itu tadi dari masyarakat tadi dan misalkan kalau pelatihan agak terbatas dan ini yang terutama karena masyarakat biasanya yang kendalanya kalau sudah perencanaan bagus pak tapi nanti kalau sudah pada saat sudah dibagikan untuk eksekusinya itu barang mungkin sudah jarang yang ingin melanjutkan artinya kalau perencanaan dari segi biaya memang sudah di anggarkan di desa mulai dari peralatan, kelengkapan, perlengkapan untuk administrasi yang lain-lain.

Atau mungkin faktornya justru mendorong, kita ini lancar pak karena ada potensi sehingga masyarakat bukan saja faktor menghambat justru faktor pendorong sehingga bagus, ada kita identifikasi kira-kira itu tadi?

Jawab : Kalau untuk faktor-faktor seperti itu pak mungkin belum ada yang saya temukan artinya seperti itu karena yang paling utama itu tadi artinya kalau kita tahu dari perencanaan memang sudah bagus tapi nanti eksekusinya biasanya terdapat masalah.

Informan Ketua BUMDes Anugerah Mandiri Bapak Rudianto berusaha menyampaikan bahwa dari sisi perencanaan pembangunan sudah baik hanya saja pelaksanaan setelah perencanaan itu yang bermasalah. Sekalipun diakui oleh informan bahwa pelatihan agak terbatas diberikan kepada masyarakat.

Pencapaian dari pemberdayaan masyarakat dengan upaya peningkatan kapasitas dan keterampilan sebenarnya bagian dari upaya partisipasi masyarakat dimana partisipasi merupakan sebuah upaya proses menjadikan masyarakat ‘stakeholders’ yang terlibat dalam mempengaruhi dan mengendalikan pembangunan di wilayah mereka masing-masing. Masyarakat secara aktif turut serta dalam memprakarsai kehidupan mereka melalui proses perencanaan pembuatan keputusan dan pemanfaatannya.

Peneliti mencoba mendalami menyangkut konsep pemberdayaan masyarakat, khususnya indikator kesadaran kritis yang dimiliki masyarakat terkait perencanaan pembangunan di Desa Carawali dengan menanyakan beberapa poin kepada Ketua BUMDes Anugerah Mandiri Bapak Rudianto.

Menyangkut kesadaran kritis bagaimana respon masyarakat terhadap proses perencanaan pembangunan?

Jawab : Kalau respon masyarakat terhadap proses perencanaan pembangunan pasti dia merespon sangat baik karena dilibatkan dalam proses perencanaan tersebut sehingga diundang mengikuti kegiatan perencanaan malahan untuk penetapan pun diundang.

Secara umum masyarakat memiliki kepedulian berupa kesadaran dalam mengikuti proses-proses perencanaan pembangunan. Tetapi temuan peneliti masyarakat sering kecewa jika proses perencanaan pembangunan yang telah terlaksana tidak mengakomodir sumbangsih pemikiran dan program-program yang telah diusulkannya.

Peneliti mencoba bertanya kepada Ketua BUMDes Anugerah Mandiri Bapak Rudianto dengan kondisi tersebut, apakah tetap mengakomodir seluruh aspirasi dan harapan masyarakat.

Apakah perencanaan pembangunan yang dilaksanakan selama ini bisa mengakomodir semua pemikiran-pemikiran masyarakat?

Jawab : Untuk mengakomodir semua sumbangsih-sumbangsih pemikiran masyarakat itu tadi dilihat dari faktor, kembali lagi kita liat mulai dari mana tingkat urgensinya atau tingkat kepentingan dari hal itu mana yang lebih penting diutamakan, kalau masyarakat itu menginginkan sesuatu pasti dilihat dari segi kepentingannya dulu.

Ternyata memang hasil wawancara dan temuan peneliti dilapangan bahwa pemerintah desa berusaha mengkomodir seluruh harapan-harapan warga masyarakatnya. Akan tetapi hal itu tetap memperhatikan kemendesakan sebuah program. Disinilah peneliti melihat betapa pentingnya sebuah metode partisipatif digunakan untuk menentukan apakah sebuah program layak menjadi prioritas atau tidak. Ini yang belum dijalankan di Desa Carawali.

Disini memang penyadaran kritis dan pembentukan kompetensi menuju perilaku sadar dan peduli dibutuhkan. Peneliti melihat bahwa pihak pemerintah desa dan daerah harus memfasilitasi dan menciptakan prakondisi agar masyarakat memperoleh proses pemberdayaan yang efektif. Sehingga perlu intervensi di masyarakat pada kemampuan efektifnya dalam mencapai kesadaran kritis yang diharapkan. Seutuhnya penyadaran kritis ini akan membuka keinginan dan kesadaran kritis masyarakat tentang kondisinya saat ini. Sehingga nantinya masyarakat merasa perlu untuk memperbaiki kondisi yang lebih baik.

Berkaitan dengan kesadaran kritis ini peneliti mencoba menanyakan kepada Ketua BUMDes Anugerah Mandiri Bapak Rudianto tentang upaya dari pemerintah desa.

Apa kira-kira upaya yang dilakukan pemerintah desa misalnya untuk meningkatkan supaya masyarakat itu tumbuh kesadaran kritisnya misalnya tingkat kehadiran mereka dalam perencanaan-perencanaan musyawarah itu selalu ada, apa upaya yang dilakukan pemerintah desa?

Jawab : Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terlibat langsung di perencanaan itu bagaimana sebisa mungkin masyarakat-masyarakat itu

diberikan undangan dan pemahaman bahwa jika anda tidak menghadiri musyawarah itu berarti untuk selanjutnya dalam penetapan perencanaan itu tidak ada keterlibatan langsung oleh masyarakat pak artinya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat itu sendiri harus di edukasi-edukasi masyarakat bahwa ini demi kepentingan masyarakat juga jadi harus menghadiri atau hadir dalam perencanaan ini.

Upaya membangun kesadaran kritis masyarakat agar turut berpartisipasi dengan menghadiri musyawarah-musyawarah perencanaan pembangunan di desa sudah ada dalam bentuk undangan untuk menghadiri kegiatan tersebut. Akan tetapi temuan peneliti undangan hanya ditujukan kepada tokoh masyarakat tertentu dengan sistem perwakilan bukan dengan sistem terbuka.

Peneliti akhirnya mencoba menanyakan kepada Ketua BUMDes Anugerah Mandiri Bapak Rudianto kendala yang dihadapi pemerintah desa dalam upaya menumbuhkan kesadaran kritis ini.

Adakah hambatan yang dialami oleh pemerintah desa dalam menumbuhkan sikap kritis tadi itu?

Jawab : Misalkan hambatan yang dialami pemerintah desa dalam menumbuhkan sikap kritis kita tau bahwa di desa itu adalah jabatan kepala desa adalah jabatan politik jadi misalkan hambatannya untuk mengedukasi orang-orang yang biasanya yang tidak pro dengan kepala desa ini itulah yang menjadi hambatan sebenarnya pak karena biasanya kita ingin menginginkan untuk A dia sangat menginginkan untuk B nya tapi kita harus edukasi-edukasi juga bagaimana yang baiknya.

Nampak bahwa pemerintah desa memiliki kendala dalam menumbuhkan sikap kritis masyarakat secara menyeluruh. Aspek politik ternyata menjadi salah satu faktor penyebabnya. Dari sini terlihat dibutuhkan sebuah perumusan kebijakan

dan sebuah perencanaan sosial dengan beberapa strategi pendekatan mengenai hal ini. Sistem atau metode yang memandang masyarakat sebagai orang yang memiliki kompetensi untuk memahami situasi-situasi mereka sendiri.

Selanjutnya peneliti menanyakan kepada Ketua BUMDes Anugerah Mandiri Bapak Rudianto mengenai kemampuan masyarakat mengidentifikasi masalah dan kebutuhan mereka.

Bagaimana keterampilan masyarakat pada proses perencanaan-perencanaan pembangunan misalnya musyawarah warga, keterampilan yang kita maksudkan disini adalah kemampuan masyarakat bisa mengidentifikasi masalah dan kebutuhannya mereka itu?

Jawab : Untuk keterampilan masyarakat atau kemampuan masyarakat dalam mengidentifikasi masalah dan kebutuhan itu yang pertama, itu tadi kepala dusun besertakan, memang seperti setiap tahunnya artinya ada yang ingin dibantu untuk proses perencanaan ini karena mulai dari dusun dulu pak, jadi keterampilan masyarakat dalam mengidentifikasi masalah dan kebutuhan itu sudah tercover pada saat perencanaan mulai dari tingkat dusun itu pak.

Kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat dalam mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan mereka bukan lahir dari upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah desa dan pemerintah daerah. Kemampuan masyarakat dalam mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan masih minim dan lebih dominan dengan menggunakan metode musyawarah. Minim yang dimaksud disini adalah tanpa menggunakan metode yang mempunyai alat ukur. Walaupun pengalaman peneliti berada di lingkungan masyarakat Desa Carawali saat menggunakan salah satu metode partisipatif seperti PRA, masyarakat dengan sangat mudah menjalankannya.

Apalagi penumbuhan partisipasi masyarakat sangat penting karena anggota masyarakatlah yang mengetahui sepenuhnya tentang permasalahan dan kepentingan atau kebutuhan mereka. Mereka yang memahami tentang keadaan lingkungannya. Mereka yang mampu merumuskan solusi dalam mengatasi permasalahan-permasalahan mereka sendiri.

Berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan mereka. Saya coba bertanya kepada Ketua BUMDes Anugerah Mandiri Bapak Rudianto mengenai cara atau metode yang sering digunakan.

Menurut Bapak ketua bumdes apakah metode yang digunakan dalam proses perencanaan pembangunan di desa Carawali itu sudah partisipatif dalam artian kalau partisipatif ini dalam bahasa ilmiahnya kita disini adalah masyarakatlah pelaku utamanya?

Jawab : Kalau metode yang digunakan dalam proses perencanaan pembangunan memang fokus utamanya kita libatkan dari ide-ide pemikiran atau sumbangsih pemikiran dari masyarakat, sumbangsih-sumbangsih dari dusun ini kemudian diakomodir dari ada yang memang dibentuk sebagai tim untuk mengcover apa-apa yang akan dilakukan di dusun itu dari ini bisa kita lihat bahwa partisipasi masyarakat ini memang sangat pelaku utama artinya dia memang yang mau diberikan pelayanan yang baik dari desa tersendiri.

Metode yang digunakan oleh pemerintah desa sebenarnya berupaya untuk melibatkan masyarakat secara partisipatif. Akan tetapi tidak ada aparat pemerintah desa dan daerah yang memiliki waktu dan mungkin juga pengetahuan untuk mentransfer metode partisipatif itu seperti apa.

Peneliti mencoba menanyakan kembali tentang metode ini kepada Ketua BUMDes Anugerah Mandiri Bapak Rudianto.

Metode apa sebenarnya yang digunakan dalam musrenbang yang kita tahu atau perencanaan pembangunan apakah musyawarah saja atau ada sebuah tools yang diberikan oleh pemerintah kabupaten pakai ini untuk menggali aspirasi atau bagaimana?

Jawab :Kalau menurut saya selama ini untuk metode yang digunakan dalam musyawarah perencanaan hanya melibatkan dari beberapa aspirasi-aspirasi masyarakat, lebih dominan musyawarah karena kita menganggap dengan musyawarah itu bahwa bukan kepala desa yang penentu kebijakan itu tapi dari keputusan musyawarahlah fokus tertinggi dari penentuan kebijakan-kebijakan yang ada di desa.

Apakah untuk mengetahui masalah dan kebutuhan untuk menyelesaikan masalah tadi di masyarakat itu, bagaimana biasa caranya kita mengetahui pak, misalnya ada masalah 1,2,3,4,5 ternyata akhirnya kita memprioritaskan dari 5 permasalahan ini yang kita mau prioritaskan misalnya dari 5 masalah yaitu masalah nomor 4 adakah semacam cara untuk mengetahui bahwa inilah yang paling tepat menjadi prioritas?

Jawab : Untuk mengetahui atau menggali masalah tersebut atau caranya kita hanya mungkin dari segi kebutuhan masyarakat itu sendiri misalkan pembangunan jalan ini jika tidak dilakukan maka akan banyak mempengaruhi kegiatan-kegiatan ekonomi yang ada di desa sedangkan misalkan perencanaan yang satu hanya misalkan kalau tidak dikerjakan itu berdampak ekonomi kepada masyarakat tidak terlalu mempengaruhi tapi kalau misalkan ini yang satu tidak dikerjakan sangat-sangat banyak aktivitas masyarakat Carawali yang terhambat dengan hal yang ini jika kita tidak kerjakan artinya prioritas kepentingan lagi, mana yang lebih penting untuk sangat-sangat dibutuhkan di masyarakat.

Metode partisipatif pada hakekatnya berupaya menggerakkan peran serta masyarakat (seluruh stakeholders) untuk berperan aktif dalam program pembangunan. Mendorong pembelajaran dalam upaya peningkatan kapasitas masyarakat. Serta merupakan cara efektif untuk menghasilkan usulan program

pembangunan yang berbasis kebutuhan, masalah, tujuan dan potensi setempat. Hal ini disadari oleh pemerintah Desa Carawali. Akan tetapi tidak adanya fasilitator dalam masyarakat yang konsen terhadap hal ini serta sudah menjadi pembiasaan dimasyarakat dalam merumuskan sebuah perencanaan hanya menggunakan musyawarah tanpa tools yang jelas.

Mengenai mekanisme yang dijalankan didesa dalam merumuskan sebuah program kebijakan atau program pembangunan. Peneliti bertanya kepada Ketua BUMDes Anugerah Mandiri Bapak Rudianto.

Bagaimana mekanisme pembangunan di desa sebenarnya kita tahu pak ketua untuk misalnya kita mau melahirkan sebuah keputusan kebijakan itu bagaimana mekanisme yang diambil?

Jawab : Kalau mekanismenya sebenarnya sebelum ditetapkan bahwa apa yang direncanakan itu dibentuk dulu tim, ada memang tim yang di bentuk untuk tim perencanaan ini, untuk mengcover aspirasi-aspirasi atau apa-apa yang akan dimasyarakat itu atau di desa itu jadi setelah ada timnya kemudian dia turun ke mulai dusun kemudian dicover lagi masalah itu naik di musyawarahkan di perencanaan setelah dimusyawarahkan di perencanaan dan disepakati kemudian dilakukan lagi musyawarah penetapan, ditetapkan itu apa yang telah direncanakan.

Untuk hal yang sama saya mencoba mengajukan beberapa pertanyaan lebih mendalam juga kepada Kepala Desa Carawali Bapak Abd. Hafid Mekka menyangkut kompetensi atau kemampuan masyarakat. Berikut dapat dilihat hasil wawancara menyangkut indikator seperti cara-cara dan metode partisipatif pemerintah desa dalam melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan dengan memberikan kemampuan kepada masyarakat

untuk dapat mengembangkan kapasitas, kompetensi, keterampilan dan kesadaran kritisnya. Wawancara dilakukan tanggal 4 Januari 2021.

Apakah metode-metode yang digunakan dalam proses perencanaan pembangunan di desa sudah partisipatif dengan menjadikan masyarakat sebagai pelaku utama?

Jawab : Ya. Ada beberapa metode yang kami gunakan yaitu musyawarah dalam perencanaan RPJMDes seterusnya dalam jangka waktu 1 periode dan musyawarah RKP (Rencana Kerja Pembangunan) untuk jangka waktu 1 tahun berikutnya, kemudian penetapan APBDes untuk perencanaan pembangunan dan pemberdayaan untuk 1 tahun yang akan dilaksanakan.

Hampir sama dengan penjelasan Ketua BUMDes Anugerah Mandiri Bapak Rudianto. Kepala Desa Carawali Bapak Abd. Hafid Mekka juga menjelaskan bahwa metode yang selama ini mereka jalankan dalam musyawarah perencanaan pembangunan hanya dalam bentuk musyawarah tanpa menggunakan metode yang jelas dan terukur dalam menentukan prioritas-prioritas pembangunan.

Selanjutnya saya mencoba menggali hal tersebut dengan menanyakan :

Bagaimana cara untuk mengetahui dan menggali masalah dan kebutuhan riil masyarakat pada proses perencanaan pembangunan?

Jawab : Untuk menggali masalah dalam desa kita adakan yang namanya Musyawarah Musdus.

Proses penggalian masalah dan kebutuhan masyarakat tetap dilaksanakan dengan cara yang lazim pemerintah desa laksanakan yaitu musyawarah. Pelaksanaan musyawarah warga ini dilakukan mulai dari tingkatan dusun, selanjutnya ke tingkat desa untuk mengetahui masukan-masukan dari segenap masyarakat yang ada di Desa Carawali.

Siapa saja yang terlibat dan bagaimana mekanisme dalam pelaksanaan musyawarah warga dalam perencanaan pembangunan. Saya menanyakan kembali kepada Kepala Desa Carawali Bapak Abd. Hafid Mekka.

Bagaimana mekanisme perencanaan pembangunan di desa?

Jawab : Mekanisme pembangunan di desa melibatkan BPD (Badan Permusyawaratan Desa).

Apakah perencanaan pembangunan sudah berdasarkan masalah dan kebutuhan masyarakat?

Jawab : Menurut saya, sudah termasuk pembangunan yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat karena ini diputuskan dalam musyawarah desa.

Atas beberapa hasil wawancara dengan Kepala Desa Carawali dan tokoh masyarakat di Desa. Saya mendalaminya dan mengklarifikasi beberapa pertanyaan serupa kepada Kepala Bappeda Kabupaten Sidenreng Rappang Andi Muhammad Arsjad saat wawancara di ruang kerja beliau tanggal 5 Mei 2021 untuk membandingkan atas pertanyaan yang berkaitan menyangkut kompetensi atau kemampuan masyarakat. Berikut dapat dilihat hasil wawancara menyangkut indikator seperti cara-cara dan metode partisipatif pemerintah desa dalam melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan dengan memberikan kemampuan kepada masyarakat untuk dapat mengembangkan kapasitas, kompetensi, keterampilan dan kesadaran kritisnya.

Bagaimana kemampuan masyarakat dalam pemberdayaan musrenbang mengidentifikasi masalah kebutuhan mereka ataukah hanya sekedar

diintervensi dari kepala desa sehingga tidak muncul kompetensi dalam melahirkan program mereka?

Jawab : ada satu dua orang yang tahu kondisi dan paham atas permasalahan diwilayahnya itu yang sering mengikuti kegiatan musrenbang...masalahnya karena berjenjang dari desa sampai ke kabupaten, mungkin mereka jenuh, jadi dari yang dilegasi yang perwakilannya mereka memang memiliki kompetensi tentang itu, tetapi tidak semua mereka memiliki kompetensi yang sama.

Kepala Bappeda Kabupaten Sidenreng Rappang Andi Muhammad Arsjad juga menjelaskan bahwa dimasyarakat kemampuan mereka dalam mengidentifikasi masalah dan kebutuhan mereka tidak merata. Di tingkat desa biasanya ada 1 atau 2 orang yang sangat mengetahui permasalahan diwilayahnya. Hanya saja saat program-program diusulkan ketingkat atas hal ini terputus. Masyarakat mulai jenuh untuk terus mengikuti prosesnya ketingkat yang lebih tinggi misalnya kecamatan dan kabupaten. Hal ini tidak terlepas dari seringnya program-program prioritas yang mereka usulkan di tingkat desa, akhirnya tidak menjadi prioritas lagi di tingkat atasnya.

Peneliti menanyakan kepada pihak pemerintah daerah, apakah sudah ada upaya dalam meningkatkan kompetensi masyarakat ini :

Bagaimana upaya meningkatkan kompetensi mereka dengan hambatan-hambatan yang dimiliki?

Jawab : Tiap tahun kami membuat buku pedoman musrenbang yang menjadi petunjuk dan metode yang dilaksanakan di musrenbang ke

kecamatan dan kelurahan, jadi dari pemerintah desa yang betul-betul di utus adalah yang paham.

Pemerintah daerah sudah berupaya meningkatkan kompetensi masyarakat dalam upaya pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan pembangunan dengan membuat buku pedoman musrenbang yang berisi petunjuk dan metode dalam pelaksanaan musrenbang.

Bagaimana respon masyarakat kalau kita melaksanakan kegiatan musrenbang ?

Jawab : Pengalaman kami respon masyarakat pesimis tetapi antusias pada usulannya, meskipun tidak terealisasi, yahh terkadang ramai menghadiri.

Kemudian, apakah perencanaan pembangunan bisa mengakomodir semua sumbangan pemikiran dari masyarakat ?

Jawab : Usulan program dari masyarakat yang masuk semua diakomodir dalam program kerja pada dokumen perencanaan tapi dalam buku tersebut yang di usulkan tergantung pada anggaran yang diberikan.

Nampak bahwa masyarakat selalu antusias mengikuti musyawarah-musyawarah pembangunan untuk mengajukan program-program mereka. Tetapi mereka selalu pesimis terhadap hasilnya. Pemerintah daerah pun tetap mengajukan keseluruhan program-program yang diusulkan oleh masyarakat walaupun nantinya tidak seluruh program yang akan didanai.

Seperti apa metode yang dijalankan oleh pemerintah daerah dalam menjalankan musyawarah perencanaan pembangunan di masyarakat. Peneliti

menanyakan kepada Kepala Bappeda Kabupaten Sidenreng Rappang Andi Muhammad Arsjad.

Metode seperti apa yang dijalankan dalam musyawarah perencanaan pembangunan selama ini?

Jawab : Metode sudah diatur dalam permendagri, lengkap dengan pembobotannya. Bahkan kami tuangkan dalam buku panduan untuk ke desa. Ditingkat desa mereka punya mekanisme tersendiri.

Pemerintah daerah nampaknya telah memiliki metode partisipatif dalam pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan yang diatur dalam permendagri dan memiliki pembobotan sebagai alat ukur yang bisa dipertanggungjawabkan. Hanya saja setelah dikonfirmasi mengenai metode seperti apa, Kepala Bappeda Kabupaten Sidenreng Rappang Andi Muhammad Arsjad juga tidak mengerti metode partisipatif tersebut. Hal ini bisa dilihat pada wawancara dibawah.

Apakah musyawarah rencana pembangunan di desa mereka sudah jalankan dari tingkatan terbawah?

Jawab : Ada mekanismenya dalam buku panduan, tetapi kami tidak mengetahui dengan persis apakah ditingkat desa sudah melalui proses dari tingkatan lingkungan/dusun seperti itu. Kami hanya menerima dari desa saja.

Ketika ditanyakan salah satu metode partisipatif yang digunakan dalam musyawarah warga seperti PRA, ternyata informan tidak mengetahui tentang hal ini. Ini dapat dilihat dari pertanyaan yang saya ajukan dibawah ini.

Apakah pernah dengar metode PRA? Bagaimana menjalankan dimasyarakat dengan metode-metode partisipatif seperti itu?

Jawab : Tidak pernah mendengarnya. Tapi pembobotan untuk menjadi prioritas ada dalam petunjuk-petunjuk buku.

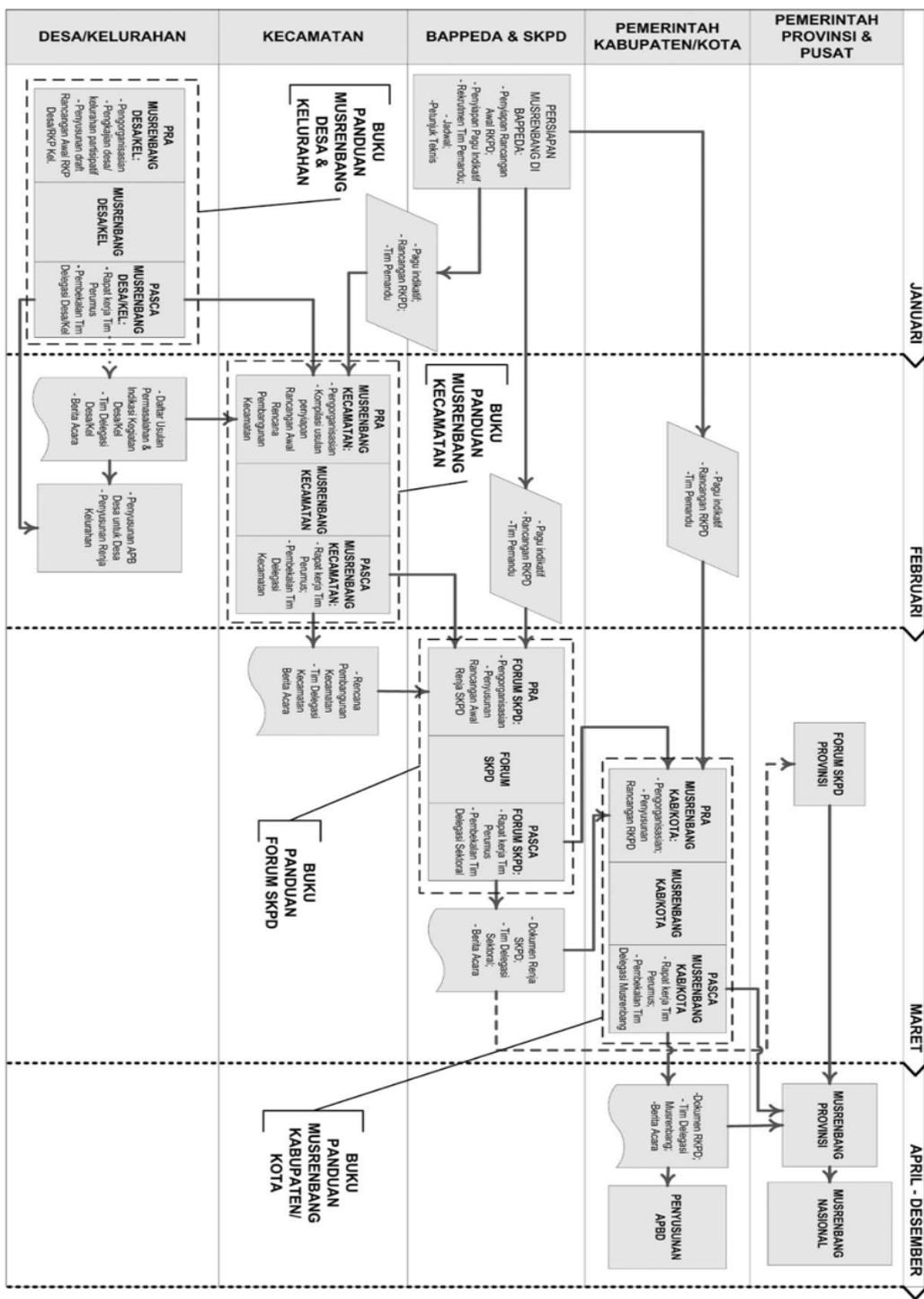
Menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, bahwa pembangunan desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Perencanaan pembangunan desa merupakan suatu panduan atau model penggalian potensi dan gagasan pembangunan desa yang menitik beratkan pada peranserta masyarakat dalam keseluruhan proses pembangunan. Konsep ini dilandasi oleh nilai-nilai dan semangat gotong royong yang telah mengakar dalam budaya masyarakat Indonesia. Gotong royong bertumpu pada keyakinan bahwa setiap warga mempunyai hak untuk memutuskan dan merencanakan apa yang terbaik bagi diri dan lingkungan serta cara terbaik dalam upaya mewujudkannya.

Perencanaan pembangunan desa merupakan suatu panduan atau model penggalian potensi dan gagasan pembangunan desa yang menitikberatkan pada peranserta masyarakat dalam keseluruhan proses pembangunan. Perencanaan pembangunan desa tersebut di lakukan dengan metode partisipatif. Perencanaan partisipatif adalah usaha yang dilakukan masyarakat untuk memecahkan masalah yang dihadapi agar mencapai kondisi yang diharapkan berdasarkan kebutuhan dan kemampuan secara mandiri.

3. Model Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan

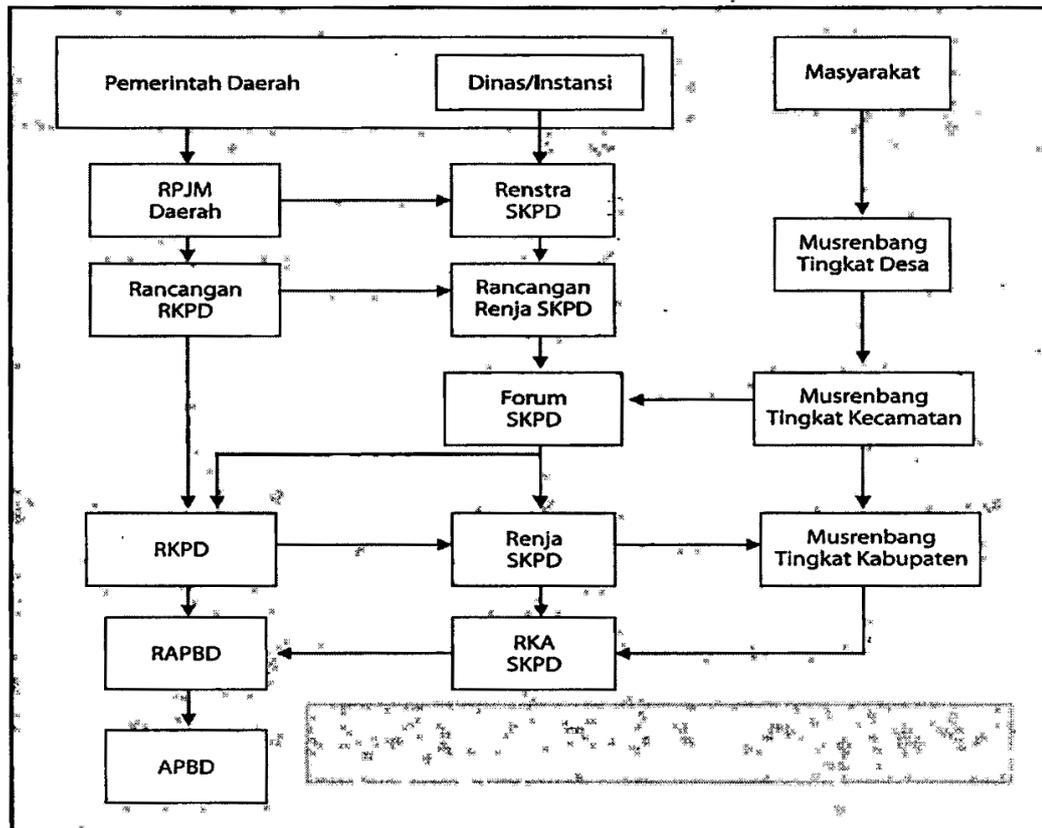
Model pemberdayaan masyarakat dalam proses musyawarah perencanaan pembangunan di Desa Carawali tidak terlepas pada model standar yang dipergunakan di banyak daerah di Indonesia. Sebagai penekanan dan pengulangan bahwa musyawarah perencanaan pembangunan yang saya maksud disini bukan hanya musyawarah perencanaan pembangunan yang dikenal sebagai musrenbang tersebut. Tetapi lebih dari pada itu adalah setiap musyawarah-musyawarah yang dilakukan di masyarakat berkaitan dengan program-program, kegiatan-kegiatan perencanaan yang berhubungan dengan pembangunan di Desa Carawali. Dari hasil-hasil wawancara sebelumnya dan pengamatan yang peneliti lakukan bahwa model umum dalam musyawarah perencanaan pembangunan yang ada di Desa Carawali Kabupaten Sidenreng Rappang tidak terlepas dari model dan tahapan musyawarah perencanaan pembangunan mulai dari tingkat desa sampai di tingkat nasional umumnya.

Model musyawarah perencanaan pembangunan dari tingkat desa sampai tingkat nasional dapat dilihat pada tahapan gambar 4.2 di bawah ini.



Gambar 4.2. Model Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Desa Sampai Tingkat Nasional

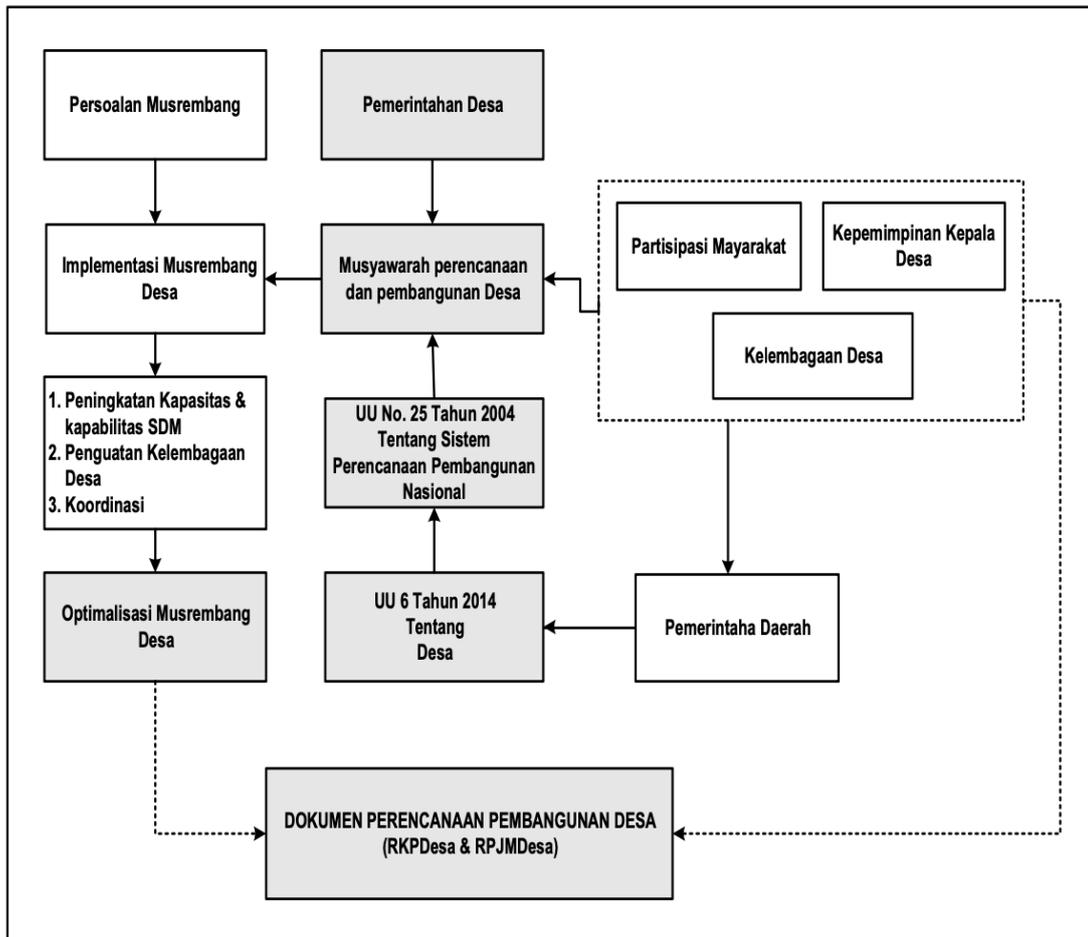
Sedangkan model musyawarah perencanaan pembangunan dari tingkat desa sampai tingkat kabupaten dapat dilihat pada tahapan gambar 4.3 di bawah ini.



Gambar 4.3. Model Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Desa Sampai Tingkat Kabupaten

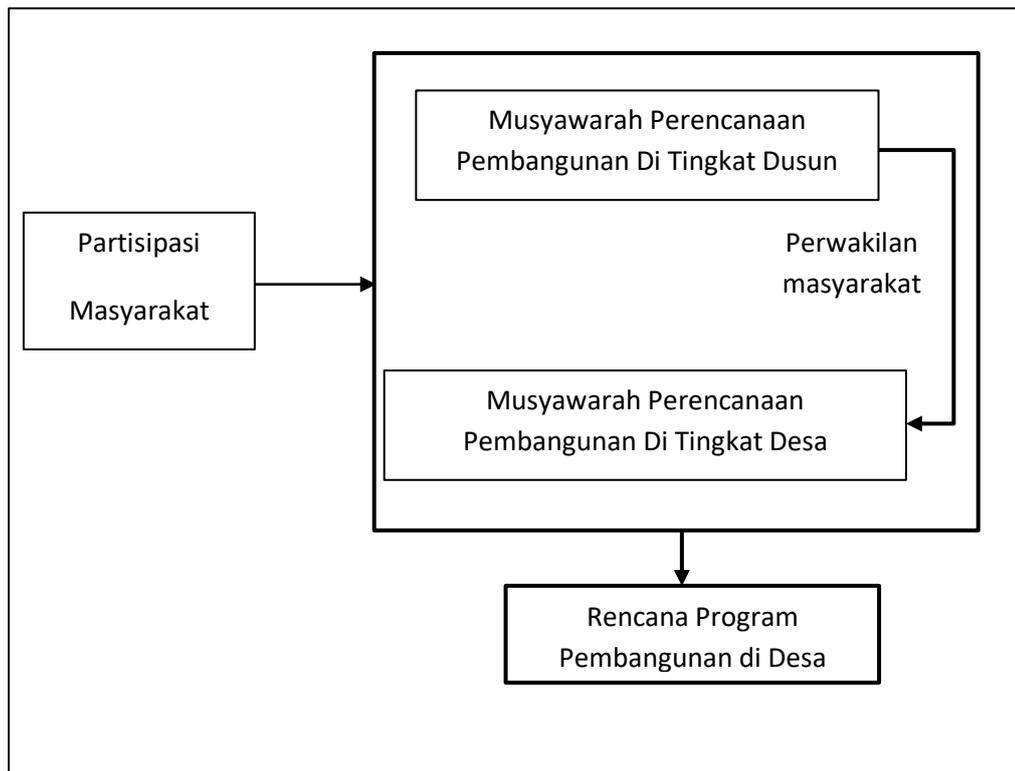
Musyawah perencanaan pembangunan sebagai forum musyawarah bagi pihak yang berkepentingan di tingkat desa dalam menyepakati rencana tahunan pembangunan menjadi sebuah hal yang penting dalam menjaring aspirasi masyarakat. Dari mekanismenya hasil-hasil pertemuan dalam forum tingkat desa ini yang diteruskan pada tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten bagi pemerintah setempat dalam menetapkan rencana-rencana pembangunan.

Selanjutnya model musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat desa dapat dilihat pada tahapan gambar 4.4 di bawah ini.



Gambar 4.4. Model Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Desa

Sekalipun demikian model musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat desa diluar kegiatan musrenbang yaitu musyawarah-musyawarah yang dilakukan di masyarakat berkaitan dengan program-program, kegiatan-kegiatan perencanaan yang berhubungan dengan pembangunan di Desa Carawali. Memiliki model yang lebih sederhana seperti dilihat pada gambar 4.5 dibawah ini.



Gambar 4.5. Model Musyawarah Perencanaan Pembangunan Lainnya Tingkat Desa

C. Pembahasan Penelitian

Sebagaimana yang telah di uraikan pada bab sebelumnya pemberdayaan masyarakat yang dimaksudkan adalah pelibatan masyarakat sebagai upaya memberdayakan masyarakat sebagai subjek pembangunan, upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan berdasarkan teori yang ada.

Berdasarkan hasil penelitian pada bab sebelumnya peneliti akan membahasnya dengan melihat pada variabel-variabel dibawah.

1. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan

Dengan melihat tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan khususnya kehadiran masyarakat dalam musyawarah-musyawarah yang membicarakan perencanaan pembangunan serta masyarakat sebagai subjek atau pelaku utama dalam kegiatan perencanaan pembangunan.

Nampak bahwa beberapa pertemuan musyawarah warga dihadiri oleh cukup warga masyarakat Desa Carawali. Tetapi temuan peneliti masyarakat yang hadir bukanlah merupakan representasi perwakilan kelompok warga jika melihat warga yang hadir dalam pertemuan. Bahkan jika kita melihat persentasi dari jumlah warga Desa Carawali secara keseluruhan nampak masih sangat minim. Representasi atau perwakilan warga yang hadir dalam berbagai kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan sesuai dengan hasil wawancara, nampak adalah hanya perwakilan dusun dan bukan perwakilan kelompok yang ada di Desa Carawali. Sekalipun dalam hasil wawancara dengan Kepala Desa dan Ketua

BUMDes setempat menyebutkan dalam musyawarah perencanaan pembangunan diwakili oleh kelompok-kelompok yang ada dalam masyarakat. Selain itu secara faktual temuan peneliti, musyawarah-musyawarah perencanaan pembangunan yang dilaksanakan langsung di tingkat dusun atau desa, tidak dilaksanakan melalui musyawarah di tingkat kelompok-kelompok terbawah yang ada di desa.

Padahal berdasarkan (K. D. Negeri, 2007) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 Tentang Perencanaan Pembangunan Desa dan Peraturan Kemendagri Nomor 050-187/Kep/Bangda/2007 (D. J. B. P. D. D. D. Negeri, 2007) tentang Pedoman Penilaian dan Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Departemen Dalam Negeri. Stakeholder yang dilibatkan dalam musrenbang adalah perwakilan kelompok masyarakat, yang kalau diartikan merupakan perwakilan-perwakilan masyarakat yang ada di daerah atau desa tersebut. Senada dengan hal tersebut sesuai hasil penelitian yang dilakukan oleh (Iman Sulaiman *et al.*, 2015) bahwa Stakeholder yang terlibat dalam Musrenbang desa/kelurahan untuk merumuskan dan menghasilkan kesepakatan program pembangunan adalah unsur staf pemerintah desa/kelurahan, tokoh masyarakat seperti tokoh agama (ulama/ustadz), tokoh pendidikan (guru) dan pelaku seni, perwakilan organisasi masyarakat seperti ketua Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), kepala dusun/lingkungan, ketua dan pengurus Karang Taruna, Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Posyandu, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Pelibatan stakeholder atau pihak-pihak yang ada di desa dalam musyawarah yang membahas perencanaan pembangunan sedapatnya memang tidak hanya atau tidak dimulai dilakukan melalui perwakilan RT/RW atau Dusun, karena didalam setiap lingkup wilayah tersebut berbagai macam persoalan dan kebutuhan yang hanya dapat di sampaikan secara tepat oleh mereka yang merupakan perwakilan dari kelompok-kelompok yang ada dalam masyarakat di lingkup wilayah tersebut. Aspirasi yang perlu disampaikan di tingkat kelompok atau akar rumput inilah yang nantinya bisa menjadi usulan program di tingkat RT/RW atau Dusun.

Apalagi pelibatan masyarakat di tingkat kelompok terbawah atau akar rumput ini sejalan dengan dua prinsip dasar yang selayaknya dianut dalam proses pemberdayaan. Prinsip-prinsip dasar yang dimaksud adalah :

1. Menciptakan ruang atau peluang bagi masyarakat untuk mengembangkan dirinya secara mandiri dan menurut cara yang dipilihnya sendiri.
2. Mengupayakan agar masyarakat memiliki kemampuan untuk memanfaatkan ruang atau peluang yang tercipta.

Dengan pelibatan atau partisipasi masyarakat di tingkat kelompok terbawah atau akar rumput inilah yang akan memberikan peluang atau partisipasi kepada mereka untuk menyampaikan aspirasi, permasalahan dan kebutuhan kaitannya dalam perencanaan pembangunan.

Selain itu pelibatan atau partisipasi masyarakat di tingkat kelompok terbawah atau akar rumput sejalan dengan pengertian pemberdayaan masyarakat yang merupakan upaya untuk memberikan energi atau daya kepada masyarakat, khususnya masyarakat yang rentan atau lemah yang ditujukan agar masyarakat

tersebut bisa mengakses seluas-luasnya yang menjadi haknya demi tercapainya suatu kondisi sosial, ekonomi, dan kualitas kehidupan yang lebih baik. Pemberdayaan adalah memberikan energi agar yang bersangkutan mampu untuk bergerak secara mandiri, membantu orang-orang yang tidak berdaya memandang diri mereka sebagai individu-individu yang mampu, mau dan mampu mengendalikan kehidupan mereka, selaku pelaku aktif yang menggunakan pengaruhnya pada perumusan kebijakan, keputusan, dan proses yang mempengaruhi kehidupan mereka. Pelibatan masyarakat selaku pelaku aktif artinya memberdayakan masyarakat agar menjadi subyek dari perencanaan pembangunan. Atas prinsip dasar yang selayaknya dianut dalam proses pemberdayaan agar masyarakat dapat memanfaatkan ruang atau peluang yang tercipta dalam berpartisipasi pada perencanaan pembangunan.

Penelitian lain yang dilakukan Agus Harto Wibowo (2009) Analisis Perencanaan Partisipatif (Studi di Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang) seperti yang di terangkan oleh Hariyanto Usia dan Ulung Pribadi dalam Penelitiannya Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Tahunan di Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula (2014) (Usia and Pribadi, 2014b) bahwa perencanaan partisipatif belum optimal dalam perencanaan pembangunan karena tidak terwakilinya seluruh stakeholder dalam perencanaan pembangunan. Padahal upaya pemberdayaan dapat dipercepat melalui proses penyiapan masyarakat dengan berbagai cara dan pendekatan yang mampu mewadahi seluruh komponen sumber daya manusia dan kelembagaan. Proses yang dilakukan melibatkan masyarakat dan *stakeholders* agar perencanaan dan proses

pemberdayaan berjalan secara terpadu. Selain itu tujuan dari perencanaan partisipatif tidak hanya untuk menginformasikan kepada masyarakat tentang kegiatan yang direncanakan tetapi juga untuk bekerjasama dengan masyarakat dan untuk berbagi pengetahuan dan gagasan dalam masyarakat.

Wahjuddin Sumpeno (Sumpeno, 2011a) mengemukakan secara khusus tujuan dari perencanaan pembangunan di desa dapat dilihat sebagai berikut :

1. Meningkatkan kemampuan kelembagaan masyarakat ditingkat desa dalam menyusun perencanaan pembangunan secara partisipatif.
2. Meningkatkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam memberikan makna dalam perencanaan pembangunan.
3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pembangunan
4. Menghasilkan keterpaduan antarbidang/sector dan kelembagaan dalam kerangka

Secara garis besar perencanaan pembangunan di desa menurut Sumpeno (Sumpeno, 2011b) mengandung pengertian sebagai berikut;

1. Perencanaan sebagai serangkaian kegiatan analisis mulai dari identifikasi kebutuhan masyarakat hingga penetapan program pembangunan.
2. Perencanaan pembangunan lingkungan; semua program peningkatan kesejahteraan, ketentraman, kemakmuran dan perdamaian masyarakat di lingkungan pemukiman dari tingkat RT/RW, dusun dan desa
3. Perencanaan pembangunan bertumpu pada masalah, kebutuhan, aspirasi dan sumber daya masyarakat setempat.

4. Perencanaan desa menjadi wujud nyata peran serta masyarakat dalam membangun masa depan.
5. Perencanaan yang menghasilkan program pembangunan yang diharapkan dapat memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan, kemakmuran dan perdamaian masyarakat dalam jangka panjang.

Dengan demikian perencanaan pembangunan desa yang melibatkan partisipasi masyarakat ini adalah usaha dari masyarakat untuk dapat memecahkan masalah yang ada pada mereka berdasarkan kebutuhan, kemampuan, pengetahuan dan gagasan dalam masyarakat tersebut. Perencanaan partisipatif ini tidak dapat diintervensi dari luar tetapi tetap membutuhkan masukan-masukan dari luar atas kesepakatan masyarakat dalam penentuan keputusannya.

Tingkat partisipasi masyarakat dalam menghadiri berbagai macam musyawarah warga dalam kegiatan perencanaan pembangunan berdasarkan data dan hasil penelitian juga masih minim jika dilihat dari persentase jumlah warga di Desa Carawali seperti yang ada dalam data pada bagian hasil penelitian. Apalagi jika kita menganut sistem perwakilan terbuka dalam pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan tersebut maka partisipasi masyarakat terlihat sangat minim.

Dalam sebuah tulisan berdasarkan hasil risetnya Sutiyo and K.L. Maharjan dalam Buku *Decentralization and Rural Development in Indonesia*. Chapter 10 *Community Participation in Rural Development* terbitan Springer Nature Singapore Pte Ltd. 2017 (Sutiyo and Maharjan, 2017) menuliskan dan mempertanyakan

bahwa desentralisasi bertujuan untuk menggantikan pembangunan pedesaan yang dipimpin secara sentralistik yang sebelumnya diterapkan. Namun, setelah hal tersebut diterapkan, pertanyaannya apakah sistem tersebut dapat benar-benar memfasilitasi partisipasi masyarakat? Beberapa peraturan yang dibuat secara lokal dianggap telah menyimpang dari semangat pengembangan partisipatif yang diamanatkan oleh peraturan nasional. Tidak adanya pedoman tentang bagaimana melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan telah menghasilkan perbedaan jenis musyawarah perencanaan. Beberapa desa menerapkan pertemuan terbuka, sementara yang lain menerapkan pertemuan perwakilan. Dalam implementasinya, keterlibatan masyarakat sangat menonjol, namun sistem tidak dapat sepenuhnya menghapuskan praktik mobilisasi paksa sumber daya lokal oleh pemerintah desa. Pada tahap evaluasi, masyarakat tidak banyak terlibat dalam mengevaluasi program dan akuntabilitas pemerintah lemah. Masyarakat tidak memiliki kekuatan untuk mengakses laporan anggaran dan meminta pertanggungjawaban pemerintah desa. Kepala desa masih mengarahkan akuntabilitasnya kepada pemerintah kabupaten.

Sebagai perbandingan dan contoh riset sebelumnya yang dilakukan oleh Sutiyo and K.L. Maharjan (Sutiyo and Maharjan, 2017) ini dilakukan ketika peraturan nasional tentang prosedur partisipasi masyarakat adalah Peraturan Pemerintah No 72 / 2005. Peraturan ini merupakan rujukan pelaksanaan utama desentralisasi yang secara spesifik mengatur pemerintah desa dalam pembangunan pedesaan. Pada prinsipnya, peraturan tersebut mengamanatkan bahwa perencanaan desa harus partisipatif (Pasal 63.1). Kepala desa harus memberikan laporan

anggaran kepada pemerintah kabupaten dan dewan desa, dan harus memberi tahu penduduk desa (Pasal 15.2). Peraturan tersebut tidak menguraikan mekanisme untuk melibatkan penduduk desa, tetapi peraturan tersebut mengamanatkan pemerintah kabupaten untuk membuat panduan bagi pemerintah desa (Pasal 66).

Berdasarkan hal tersebut, riset yang dilakukan oleh Sutiyo and K.L. Maharjan (Sutiyo and Maharjan, 2017) pada Pemerintah Kabupaten Purbalingga menyebutkan bahwa Pemerintah daerah setempat mengeluarkan panduan yang salah satu isiannya ditetapkan bahwa pertemuan desa harus dilakukan dengan melibatkan setidaknya semua anggota BPD, Kepala Desa dan satu anggota yang berurusan dengan urusan pembangunan, staf desa, kepala lingkungan dan tokoh masyarakat terkemuka. Di sini, ada kontradiksi antara peraturan nasional dan panduan yang dibuat oleh pemerintah kabupaten. Semangat pembangunan partisipatif yang diamanatkan oleh peraturan No 72/2005 tidak didefinisikan secara tepat oleh panduan pelaksana, yang mempersempit keterlibatan masyarakat hanya pada beberapa lembaga tertentu. Lembaga informal, seperti kelompok tani, kelompok agama, dan banyak kelompok tradisional lainnya di mana modal sosial dalam komunitas yang ada, tidak terlibat. Mekanisme ini juga membuat warga desa tidak mungkin dilibatkan sebagai individu, bukan mewakili kelompok, dalam proses pengambilan keputusan desa. Interpretasi yang tidak tepat seperti itu pada prinsip partisipasi mungkin disebabkan oleh diskusi yang terbatas sebelum menetapkan panduan dan fakta bahwa proses perumusannya eksklusif dengan melibatkan hanya beberapa birokrat terpilih dari badan-badan kabupaten. Inilah

realitas yang juga ada di Desa Carawali berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan.

Dari hasil wawancara pada hasil penelitian kepada Kepala Desa, Tokoh Masyarakat dan Ketua BUMDes setempat, memang semua mengatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan tinggi. Akan tetapi hasil pengamatan dan analisa dari peneliti itu hanya akan dibenarkan, jika dilaksanakan dengan sistem perwakilan perdusun dan langsung dilaksanakan ditingkat dusun dan atau desa. Jadi tidak dilaksanakan dengan sistem perwakilan terbuka yang memberikan kesempatan dan peluang yang lebih besar kepada individu masyarakat sebagai ruang atau peluang yang tercipta dalam berpartisipasi pada perencanaan pembangunan sesuai dengan teori-teori yang ada.

Beberapa pertimbangan yang disampaikan berdasarkan wawancara, faktor utama yang menyebabkan sehingga pemerintah desa tidak menerapkan rapat terbuka adalah inefisienannya dalam hal anggaran. Menurutnya, rapat terbuka membutuhkan lebih banyak biaya operasional untuk menyediakan logistik seperti makanan ringan dan minuman bagi peserta yang hadir, sesuatu yang dianggap boros di tengah kelangkaan anggaran desa. Namun, dikatakan di sini bahwa efisiensi anggaran tidak cukup kuat untuk menjadi alasan utama mengurangi jumlah peserta pertemuan. Padahal ini bisa terbantahkan jika melihat hasil penelitian yang dilakukan oleh Sutiyo and K.L. Maharjan (Sutiyo and Maharjan, 2017) pada daerah Serang Jawa Barat, di mana kepala desa melibatkan lebih banyak penduduk desa dalam pertemuan tersebut, yang menurut Kepala Desa Serang tersebut, dia lebih

suka mengundang banyak penduduk desa untuk meningkatkan legitimasi keputusan dan meminimalkan keluhan dari masyarakat.

Pada akhirnya, jelas bahwa keputusan apakah akan menerapkan pertemuan terbuka atau sistem perwakilan tidak bisa dibenarkan jika hanya didasarkan oleh penghematan biaya. Pembangunan pedesaan, serta mekanisme untuk melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan desa, dilaksanakan secara praktis di lingkungan di mana kepala desa telah memutuskan mekanisme yang dianggap lebih melibatkan penduduk desa. Peraturan tersebut, terlepas dari kelemahannya, tidak selalu diterapkan. Modifikasi peraturan diterapkan di setiap desa, di mana beberapa mengarah pada partisipasi yang lebih baik dengan mengundang lebih banyak penduduk desa sementara yang lain menyebabkan partisipasi yang lebih buruk dengan mengundang lebih sedikit orang ke pertemuan daripada yang diinginkan. Praktik seperti ini sangat umum terjadi karena lemahnya kontrol oleh pemerintah kabupaten terhadap kualitas pertemuan, jumlah peserta, dan lembaga yang diundang ke pertemuan tersebut.

2. Upaya Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan

Upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Diukur melalui indikator seperti cara-cara dan metode partisipatif pemerintah desa dalam melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan dengan memberikan kemampuan kepada masyarakat untuk dapat mengembangkan kapasitas, kompetensi, keterampilan dan kesadaran kritisnya.

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada beberapa informan seperti yang telah di sampaikan pada bagian hasil penelitian. Nampak bahwa di Desa Carawali upaya-upaya dan metode-metode pemerintah desa dalam memberikan kemampuan kepada masyarakat untuk dapat mengembangkan kapasitas, kompetensi, keterampilan dan kesadaran kritisnya masih sangat minim dan standar. Saat wawancara dengan Ketua BUMDes, BPD dan Kepala Desa Carawali upaya-upaya yang telah dilakukan dalam mengembangkan kapasitas, kompetensi, keterampilan dan kesadaran kritis masyarakatnya adalah pelatihan dan peningkatan kapasitas BPD dan Kepala Dusun serta edukasi dalam bentuk pengarahan dalam musyawarah-musyawarah warga. Metode yang digunakan pemerintah desa dalam melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan hanya dalam bentuk-bentuk musyawarah warga. Disitulah segala hal yang berkaitan dengan permasalahan dan kebutuhan perencanaan pembangunan dari warga masyarakat di bahas.

Saat dikonfirmasi dalam wawancara kepada Kepala Bappeda Kabupaten Sidenreng Rappang tentang upaya pemberdayaan masyarakat dengan memberikan kemampuan kepada masyarakat untuk dapat mengembangkan kapasitas, kompetensi, keterampilan dan kesadaran kritisnya pada saat pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan di desa. Pihak pemerintah daerah hanya membuat buku pedoman musrenbang sebagai rujukan dalam pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan didesa.

Sedangkan metode partisipatif yang digunakan oleh pemerintah daerah dalam menggali aspirasi program dari masyarakat hanya didasarkan pada buku

pedoman yang mana dalam buku pedoman tersebut sudah memberikan bobot penilaian dari setiap usulan program masyarakat. Saat dikonfirmasi kepada Kepala Bappeda Kabupaten Sidenreng Rappang apakah pernah mendengar istilah *Participatory Rural Appraisal (PRA)* sebagai salah satu metode partisipatif (tools) yang digunakan dalam musyawarah perencanaan pembangunan beliau tidak mengetahuinya. Padahal *Participatory Rural Appraisal (PRA)* merupakan metode yang ada dalam panduan penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan desa (Djohani, 2008).

Penggunaan metode partisipatif seperti *Participatory Rural Appraisal (PRA)* justru digunakan oleh peneliti saat memfasilitasi beberapa kegiatan musyawarah warga dalam beberapa program yang masuk ke desa Carawali seperti Program Holistik Pembinaan dan Pemberdayaan Desa (PHP2D) saat mendampingi kelompok tani “Sipatuodeceng” dan kelompok pembudidaya ikan Celli’e sebagai kelompok pembudidaya ikan air tawar tahun 2021.

Inisiatif penggunaan metode partisipatif dalam melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan dengan memberikan kemampuan kepada masyarakat untuk dapat mengembangkan kapasitas, kompetensi, keterampilan dan kesadaran kritisnya oleh pemerintah desa dan pemerintah daerah minim dan terabaikan. Peneliti saat mengikuti dan menghadiri kegiatan musrenbang RKAD hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 di Desa Carawali mengamati bahwa penggunaan metode partisipatif seperti *Participatory Rural Appraisal (PRA)* tidak digunakan. Saat mencoba menanyakan hal ini kepada perwakilan dari pemerintah daerah yang hadir, mereka mengetahui dengan persis

Participatory Rural Appraisal (PRA) sebagai metode yang dapat menjadi rujukan dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (musrenbang) tetapi tidak menggunakannya karena menganggap bahwa usulan perencanaan program dari desa sudah cukup. Tinggal dimusyawarahkan saja rencana program yang akan dibawa ke tingkat kecamatan dan kabupaten.

Pengabaian terhadap penggunaan metode partisipatif seperti *Participatory Rural Appraisal (PRA)* sebenarnya sangat disayangkan padahal dalam salah satu riset Asep Supriatna (Supriatna, 2014a) yang artikelnya telah di publish dengan judul Relevansi Metode *Participatory Rural Appraisal (PRA)* Dalam Mendukung Implementasi Undang-Undang Pemerintah Desa disitu dijelaskan Tujuan penerapan metode *Participatory Rural Appraisal (PRA)* adalah untuk memberikan dukungan yang efektif dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan dengan berwawasan lingkungan serta berbasis konteks lokal. Dalam konteks UU Desa maka PRA dapat memberikan pemahaman kepada para aparatur pemerintahan desa dalam melakukan proses identifikasi potensi dan permasalahan di desanya. Lanjut dalam riset ini disebutkan salah satu pendekatan yang cukup relevan dalam melakukan pengkajian kondisi wilayah pedesaan adalah *Participatory Rural Appraisal (PRA)* karena cukup ampuh untuk mengidentifikasi potensi, mengidentifikasi permasalahan serta merumuskan alternatif solusi yang tepat secara partisipatif.

Di penelitian lain Edi Indrizal (Indrizal, 2014) dalam jurnal yang berjudul Pengkajian Keadaan Perdesaan Secara Partisipatif *Participatory Rural Appraisal (PRA)*: Suatu Pengantar Pengenalannya menjelaskan metode PRA pada dasarnya

memang dimaksudkan untuk diterapkan dalam kegiatan pengembangan pemberdayaan atau penguatan masyarakat sebagai bagian inheren dari paradigma, model dan pendekatan pembangunan partisipatif.

Tujuan PRA dapat dibagi ke dalam tujuan strategis dan tujuan praktis. Dari segi tujuan strategis pada dasarnya tujuan PRA itu ialah untuk mencapai pemberdayaan masyarakat dan perubahan sosial melalui pengembangan masyarakat dengan menggunakan pendekatan pembelajaran. Sedangkan tujuan praktisnya adalah sebagai berikut :

1. Untuk mendapatkan informasi dan gambaran tentang keadaan, masalah, kebutuhan dan potensi (masyarakat dan wilayah) perdesaan secara menyeluruh (holistic).
2. Mendorong partisipasi masyarakat perdesaan dalam menggali dan memahami situasi, kondisi dan potensi daerah serta kebutuhannya sehingga meningkatkan kepedulian, kemampuan dan keberdayaan mereka dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pembangunan sesuai posisinya sebagai penerima manfaat utama pembangunan.
3. Meningkatkan efisiensi dalam mengidentifikasi dan menggali informasi tentang situasi, kondisi dan potensi wilayah perdesaan dengan selalu mempertimbangkan akurasi data/informasi yang dihimpun.
4. Agar masyarakat juga memahami dan terampil dalam menggunakan alat-alat (instrumen) dan teknik PRA untuk menganalisis pengetahuan mereka tentang keadaan wilayah, keadaan kehidupan dan segenap potensi

pembangunan sehingga nantinya mampu menerapkan secara mandiri untuk keperluan pembangunan di daerah/ wilayah masing-masing

5. Menyamakan persepsi bahwa PRA merupakan suatu pendekatan, metode dan alat (instrumen) yang dapat digunakan secara efektif dan efisien untuk menggali dan menganalisis informasi, situasi, kondisi dan potensi daerah/wilayah perdesaan dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan masyarakat dan daerah perdesaan.

PRA sebagai metode partisipatif yang menekankan pengetahuan lokal dan memungkinkan masyarakat setempat untuk melakukan penilaian, analisis dan perencanaan mereka sendiri. PRA menggunakan visualisasi dan latihan untuk memfasilitasi berbagi informasi, analisis dan tindakan antara para stake holders. PRA memberikan ruang yang luas kepada masyarakat sebagai pelaku aktif atau subjek dalam mengambil inisiatif, melaksanakan proses dan aksi tindak. Dengan kata lain “menyerahkan pengelolaan kepada orang dalam”, peran orang luar sebagai “fasilitator dan katalisator” proses di komunitas yang siap melakukan perubahan (Uddin and Anjuman, 2014) (Mustanir and Lubis, 2017) (Mustanir, Ahmad; Barisan, Barisan; Hamid, 2017).

The World Bank Explained that PRA is a process which extends into analysis, planning and action. defines PRA as a 'family of participatory approaches and methods which emphasize local knowledge and enable local people to do their own appraisal, analysis, and planning. PRA adalah sebuah proses dalam menganalisis, perencanaan dan tindakan. Bank Dunia mendefinisikan PRA sebagai metode partisipatif yang menekankan pengetahuan lokal dan memungkinkan

masyarakat setempat untuk melakukan penilaian, analisis dan perencanaan mereka sendiri (Mustanir and Lubis, 2017). *PRA is the most suitable and appropriate method to indentify the existing situation of the community*. Bahwa PRA merupakan metode yang paling cocok dan sesuai untuk mengidentifikasi situasi yang ada di masyarakat (Alam and Ishan, 2012).

Robert Chambers (Chambers, 1994) memperkenalkan metode *PRA* sebagai alternative bagi para praktisi pembangunan yang memerlukan sebuah metodologi ‘penelitian’ yang bisa membantu mereka memahami masyarakat secara cepat, dengan informasi aktual, dan biaya murah, serta bisa mengajak masyarakat sebagai pelaku penelitian itu sendiri.

PRA dikembangkan berdasarkan suatu pengalaman, tradisi dan metode yang telah dikembangkan sebelumnya. Kepopuleran metode ini tidak lepas dari kritik dari berbagai kalangan akademisi maupun praktisi serta pengujian terhadap kehandalan dan kekinian sebagai suatu cara/metode dalam perencanaan pembangunan berbasis masyarakat. Perjalanan panjang dalam suatu proses pengembangan metodologi, *PRA* mengalami perubahan dari segi konsep dan penerapan di lapangan (Sumpeno, 2011b).

PRA dibangun diatas tiga landasan yaitu; (a) Berbagi peran, pengetahuan dan pengalaman, (b) Sikap dan perilaku, serta (c) Metode dan teknik. *PRA* mendorong optimalisasi keterlibatan masyarakat dalam berbagai peran dan tindakan, pengetahuan dan pengalaman merupakan proses belajar yang dilakukan untuk meningkatkan kapasitas pemahaman tentang apa yang ingin diketahui, pengalaman apa yang dimiliki, siapa saja yang terlibat, informasi apa yang

dibutuhkan, dan pelajaran apa yang bermanfaat untuk menentukan solusi dan alternatif tindakan yang diperlukan (Sumpeno, 2011b).

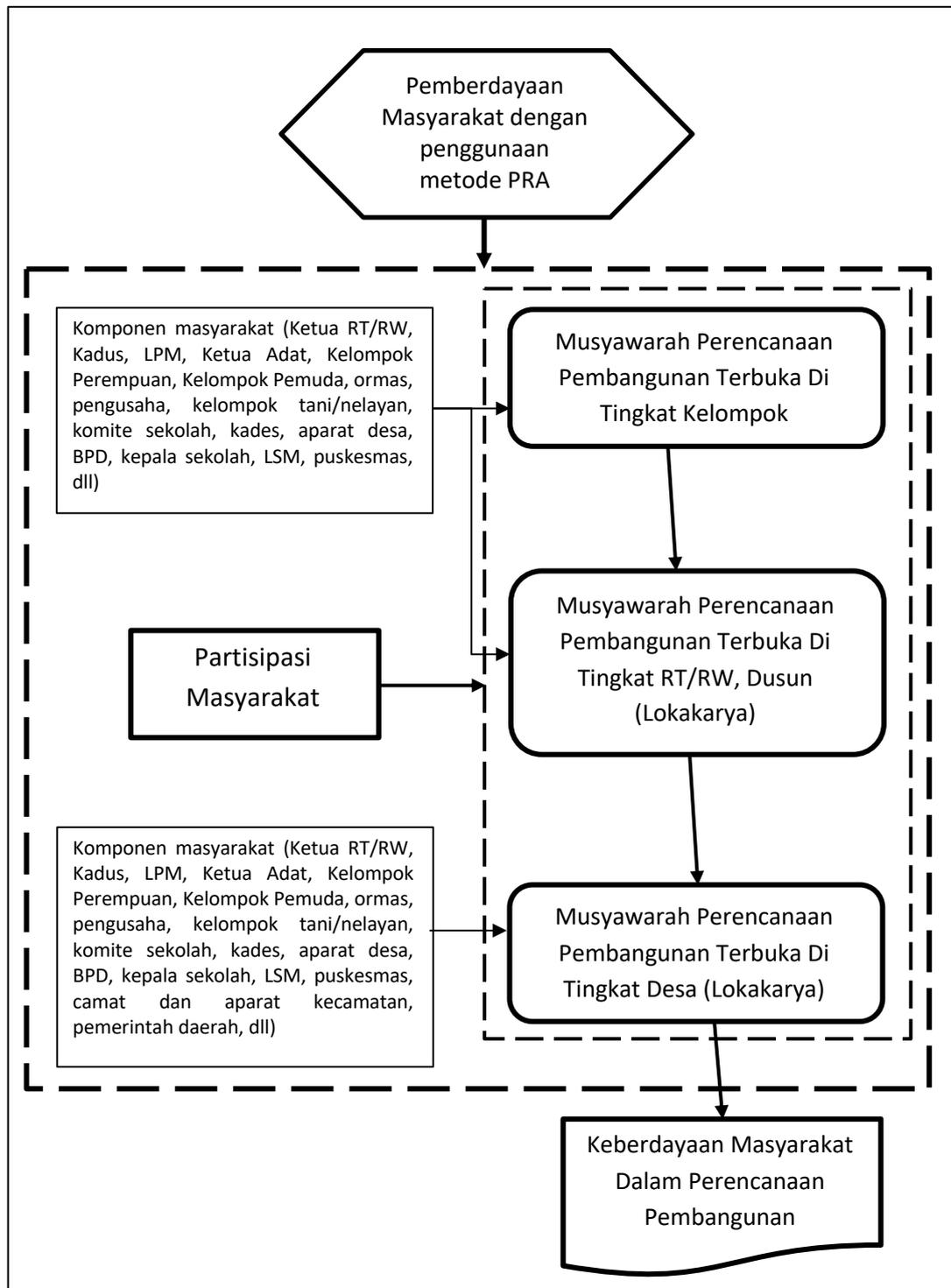
PRA dalam proses perencanaan bermanfaat untuk membangun kebersamaan dan kesamaan pandangan masyarakat tentang keputusan yang akan diambil melalui forum diskusi atau interaksi pelaku yang merepresentasikan seluruh elemen yang ada dalam masyarakat itu. Pada tahap perencanaan, penerapan PRA dilakukan untuk hal-hal berikut :

1. Memformulasikan usulan dan prioritas kegiatan pembangunan
2. Menyediakan informasi yang lebih rinci tentang kelayakan kegiatan yang diusulkan masyarakat.
3. Menyediakan informasi untuk menetapkan strategi atau bentuk intervensi berdasarkan kebutuhan dan masalah yang telah teridentifikasi.
4. Menentukan aksi bersama baik dalam aspek pencapaian strategis jangka pendek maupun jangka panjang.

3. Model Baru Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan

Model baru pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan pembangunan yang mana model baru ini lahir dari proses hasil riset setelah memperoleh konsep pemberdayaan masyarakat dan konsep perencanaan pembangunan. Model baru disini adalah gambaran temuan pemberdayaan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan di Desa Carawali dan rekomendasi ideal model baru

pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan pembangunan di desa. Model baru tersebut dapat dilihat pada gambar 4.6 dibawah ini :



Gambar 4.6. Model Baru Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Di Desa

Model baru pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan pembangunan seperti pada gambar 4.6 diatas lahir dari proses hasil riset setelah memperoleh konsep pemberdayaan masyarakat dan konsep perencanaan pembangunan. Model baru disini adalah gambaran temuan pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Desa Carawali dan rekomendasi ideal model baru pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan pembangunan di desa dengan memperhatikan bagian pembahasan.

Penjelasan pada gambar 4.6 diatas bahwa dalam memberdayakan masyarakat pada perencanaan pembangunan khususnya pada kegiatan musyawarah warga dalam pembahasan program rencana pembangunan harus melibatkan semua partisipasi stake holder dan partisipasi seluruh masyarakat yang ada di desa tanpa terkecuali. Pelaksanaan musyawarah warga ini haruslah dilaksanakan di tingkatan terendah yang ada di desa, yaitu tingkatan kelompok-kelompok warga. Pelaksanaan harus dilaksanakan secara terbuka dan bukan perwakilan, seperti yang selama ini dijalankan pada banyak daerah-daerah di Indonesia. Hal ini agar legitimasi keputusan menjadi lebih kuat dan meminimalkan keluhan dari masyarakat atas pelibatan mereka dalam partisipasi perencanaan pembangunan. Ini juga dilakukan sebagai upaya memberdayakan masyarakat yang selama ini masih sangat minim dan belum optimal.

Pada pelaksanaan di tingkat terbawah atau kelompok, teknis dilaksanakan sebanyak kelompok-kelompok yang ada di desa, dengan mengundang berbagai stake holder yang ada di desa seperti Ketua RT/RW, Kadus, LPM, Ketua Adat, Kelompok Perempuan, Kelompok Pemuda, ormas, pengusaha, kelompok

tani/nelayan, komite sekolah, kades, aparat desa, BPD, kepala sekolah, LSM, puskesmas dan lain sebagainya. Pelaksanaannya menggunakan metode *Participatory Rural Appraisal (PRA)* dengan seluruh alat kaji yang ada dalam metode PRA tersebut di sesuaikan dengan permasalahan dan kebutuhan yang ada dalam kelompok masyarakat tersebut.

Pada pelaksanaan di tingkat RT/RW dan Dusun, teknis dilaksanakan sesuai tingkatan yang ada di desa. Jika di desa memiliki RT/RW maka terlebih dahulu dilaksanakan di tingkatan tersebut sebelum dilaksanakan di tingkatan atasnya yaitu dusun. Agak berbeda dengan pelaksanaan di tingkatan terbawah atau kelompok-kelompok masyarakat. Maka pelaksanaan di tingkat ini dilakukan dengan sistem lokakarya musyawarah perencanaan pembangunan, dimana program-program yang telah diusulkan di tingkat terbawah atau kelompok itulah yang dibahas untuk mendapatkan prioritas usulan program ke tingkat musyawarah di atasnya. Pelaksanaan di tingkat ini tetap menggunakan metode *Participatory Rural Appraisal (PRA)* agar prioritas usulan program di tingkatan ini benar-benar sesuai kebutuhan dan bukan sekedar memenuhi daftar keinginan saja. Penggunaan metode PRA juga agar usulan program sesuai pembobotan yang dikehendaki masyarakat. Pelaksanaan dengan tetap mengundang berbagai stake holder yang ada di desa seperti Ketua RT/RW, Kadus, LPM, Ketua Adat, Kelompok Perempuan, Kelompok Pemuda, ormas, pengusaha, kelompok tani/nelayan, komite sekolah, kades, aparat desa, BPD, kepala sekolah, LSM, puskesmas dan lain sebagainya.

Pada pelaksanaan tingkat desa, teknis dilaksanakan dengan tetap mengundang berbagai stake holder yang ada di desa seperti Ketua RT/RW, Kadus,

LPM, Ketua Adat, Kelompok Perempuan, Kelompok Pemuda, ormas, pengusaha, kelompok tani/nelayan, komite sekolah, kades, aparat desa, BPD, kepala sekolah, LSM, puskesmas serta di tambah perwakilan kecamatan dan pemerintah daerah. Pelaksanaan di tingkat desa ini juga dilakukan dengan sistem lokakarya musyawarah perencanaan pembangunan, dimana program-program yang telah diusulkan di tingkat bawahnya itulah yang dibahas untuk mendapatkan prioritas usulan program ke tingkat musyawarah di atasnya atau dibawa ke musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kecamatan. Jika pun hanya untuk pelaksanaan pembangunan tingkat desa dengan bukan siklus pada musrenbang, maka usulan program dapat di gunakan untuk program-program pembangunan lainnya di desa. Pelaksanaan di tingkat ini tetap menggunakan metode *Participatory Rural Appraisal (PRA)* agar prioritas usulan program di tingkatan ini benar-benar sesuai kebutuhan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan melihat variabel dan indikator yang disampaikan pada bab sebelumnya serta berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan :

1. Masyarakat kurang diberdayakan khususnya dalam kegiatan musyawarah warga dalam rangka penggalian potensi dan gagasan pembangunan desa karena masyarakat yang hadir bukan merupakan representasi perwakilan warga secara keseluruhan. Secara prosentasi dari jumlah warga masih sangat minim. Pelaksanaan kegiatan musyawarah warga dalam perencanaan pembangunan tidak dilaksanakan mulai dari tingkatan terbawah sehingga program-program yang ada di tingkat desa bukan merupakan cerminan usulan warga yang berbasis tingkatan terbawah. Bahkan program-program yang dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan tingkat desa adalah program yang sudah ada di atas kertas yang dibawa oleh dinas terkait kabupaten serta berasal hanya dari musyawarah tingkat dusun saja.
2. Upaya-upaya dan metode pemerintah desa dalam memberikan kemampuan kepada masyarakat untuk dapat mengembangkan kapasitas, kompetensi, keterampilan dan kesadaran kritisnya masih sangat minim dan standar. Upaya hanya berupa pelatihan dan peningkatan kapasitas BPD dan Kepala Dusun serta edukasi dalam bentuk pengarahan dalam musyawarah-

musyawarah warga. Metode yang digunakan pemerintah desa dalam melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan hanya dalam bentuk-bentuk musyawarah warga. Metode partisipatif yang digunakan oleh pemerintah daerah dalam menggali aspirasi program dari masyarakat hanya didasarkan pada buku pedoman yang mana dalam buku pedoman tersebut sudah memberikan bobot penilaian dari setiap usulan program masyarakat bukan sebuah metode partisipatif seperti PRA yang ada dalam berbagai pedoman.

3. Model baru pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan pembangunan khususnya pada kegiatan musyawarah warga dalam pembahasan program rencana pembangunan harus melibatkan semua partisipasi stake holder/masyarakat yang ada di desa tanpa terkecuali. Pelaksanaan musyawarah warga ini haruslah dilaksanakan di tingkatan terendah yang ada di desa, yaitu tingkatan kelompok-kelompok warga. Pelaksanaan harus dilaksanakan secara terbuka dan bukan perwakilan. Pelaksanaan menggunakan metode *Participatory Rural Appraisal (PRA)* dengan seluruh alat kaji yang ada dalam metode PRA tersebut di sesuaikan dengan permasalahan dan kebutuhan yang ada dalam kelompok masyarakat tersebut.

B. Saran dan Rekomendasi

1. Saran

Berdasarkan kesimpulan maka peneliti memberikan saran dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Pemerintah Desa Carawali lebih memberdayakan masyarakat dalam perencanaan pembangunan dengan menjadikan masyarakat sebagai subjek perencanaan pembangunan, melibatkan warga secara keseluruhan secara terbuka bukan perwakilan, serta melaksanakan kegiatan musyawarah warga dalam perencanaan pembangunan mulai dari tingkatan terbawah (kelompok).
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dan Pemerintah Desa Carawali lebih mengupayakan dan konsisten dalam pemberian kemampuan kepada masyarakat untuk dapat mengembangkan kapasitas, kompetensi, keterampilan dan kesadaran kritisnya pada musyawarah perencanaan pembangunan dengan penggunaan metode partisipatif seperti *Participatory Rural Appraisal (PRA)*.
3. Penggunaan model baru pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan pembangunan khususnya pada kegiatan musyawarah warga dalam pembahasan program rencana pembangunan.

2. Rekomendasi

Akhirnya berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah melalui uji metode dalam bentuk Focus Group Discussion (FGD) berupa pembahasan dalam pertemuan dengan tokoh-tokoh masyarakat di Desa Carawali. Memperhatikan kesimpulan dan saran dalam disertasi ini. Maka peneliti memberikan sebuah rekomendasi kebijakan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dan Pemerintah Desa Carawali dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan di daerahnya berdasarkan temuan penelitian. Rekomendasi berupa sebuah model baru pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan pembangunan dan bagaimana upaya memberdayakan masyarakat dalam perencanaan pembangunan.

Rekomendasi dalam memberdayakan masyarakat pada perencanaan pembangunan khususnya pada kegiatan musyawarah warga dalam pembahasan program rencana pembangunan adalah:

1. Penggunaan model baru pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan pembangunan khususnya pada kegiatan musyawarah warga harus melibatkan semua partisipasi masyarakat dan stake holder yang ada di desa tanpa terkecuali.
2. Pelaksanaan musyawarah warga ini haruslah dilaksanakan di tingkatan terendah yang ada di desa, yaitu tingkatan kelompok-kelompok warga.
3. Pelaksanaan harus dilaksanakan secara terbuka dan bukan perwakilan, seperti yang selama ini dijalankan pada banyak daerah-daerah di Indonesia. Hal ini agar legitimasi keputusan menjadi lebih kuat dan meminimalkan

keluhan dari masyarakat atas pelibatan mereka dalam partisipasi perencanaan pembangunan.

4. Pada pelaksanaan di tingkat terbawah atau kelompok, teknis dilaksanakan sebanyak kelompok-kelompok yang ada di desa, dengan mengundang berbagai stake holder yang ada di desa seperti Ketua RT/RW, Kadus, LPM, Ketua Adat, Kelompok Perempuan, Kelompok Pemuda, ormas, pengusaha, kelompok tani/nelayan, komite sekolah, kades, aparat desa, BPD, kepala sekolah, LSM, puskesmas dan lain sebagainya.
5. Pelaksanaannya menggunakan metode *Participatory Rural Appraisal* (PRA) dengan seluruh alat kaji yang ada dalam metode PRA tersebut di sesuaikan dengan permasalahan dan kebutuhan yang ada dalam kelompok masyarakat tersebut.
6. Pada pelaksanaan di tingkat RT/RW dan Dusun, teknis dilaksanakan sesuai tingkatan yang ada di desa. Jika di desa memiliki RT/RW maka terlebih dahulu dilaksanakan di tingkatan tersebut sebelum dilaksanakan di tingkatan atasnya yaitu dusun. Agak berbeda dengan pelaksanaan di tingkatan terbawah atau kelompok-kelompok masyarakat. Maka pelaksanaan di tingkat ini dilakukan dengan sistem lokakarya musyawarah perencanaan pembangunan, dimana program-program yang telah diusulkan di tingkat terbawah atau kelompok itulah yang dibahas untuk mendapatkan prioritas usulan program ke tingkat musyawarah di atasnya. Pelaksanaan di tingkat ini tetap menggunakan metode *Participatory Rural Appraisal* (PRA)

agar prioritas usulan program di tingkatan ini benar-benar sesuai kebutuhan dan bukan sekedar memenuhi daftar keinginan saja.

7. Penggunaan metode PRA juga agar usulan program sesuai pembobotan yang dikehendaki masyarakat. Pelaksanaan dengan tetap mengundang berbagai stake holder yang ada di desa seperti Ketua RT/RW, Kadus, LPM, Ketua Adat, Kelompok Perempuan, Kelompok Pemuda, ormas, pengusaha, kelompok tani/nelayan, komite sekolah, kades, aparat desa, BPD, kepala sekolah, LSM, puskesmas dan lain sebagainya.
8. Pada pelaksanaan tingkat desa, teknis dilaksanakan dengan tetap mengundang berbagai stake holder yang ada di desa seperti Ketua RT/RW, Kadus, LPM, Ketua Adat, Kelompok Perempuan, Kelompok Pemuda, ormas, pengusaha, kelompok tani/nelayan, komite sekolah, kades, aparat desa, BPD, kepala sekolah, LSM, puskesmas serta di tambah perwakilan kecamatan dan pemerintah daerah. Pelaksanaan di tingkat desa ini juga dilakukan dengan sistem lokakarya musyawarah perencanaan pembangunan, dimana program-program yang telah diusulkan di tingkat bawahnya itulah yang dibahas untuk mendapatkan prioritas usulan program ke tingkat musyawarah di atasnya atau dibawa ke musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kecamatan. Jika pun hanya untuk pelaksanaan pembangunan tingkat desa dengan bukan siklus pada musrenbang, maka usulan program dapat di gunakan untuk program-program pembangunan lainnya di desa. Pelaksanaan di tingkat ini tetap menggunakan metode

Participatory Rural Appraisal (PRA) agar prioritas usulan program di tingkatan ini benar-benar sesuai kebutuhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adamson, D. and Bromiley, R. (2013) 'Community empowerment: Learning from practice in community regeneration', *International Journal of Public Sector Management*, 26(3), pp. 190–202. Available at: <https://doi.org/10.1108/IJPSM-08-2011-0105>.
- Afriansyah *et al.* (2023) *Pemberdayaan Masyarakat*. Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi. Available at: www.globaleksekutifteknologi.co.id.
- Ahfan, R., Asrori, A. and Sipahutar, H. (2015) 'Pemberdayaan Masyarakat Pada Program PNPM MP, Desa Peradaban, CSR dan Posdaya (Konteks Lahirnya UU No 6 Tahun 2014)', *Jurnal Bina Praja*, 7(1), pp. 89–100.
- Ahmad, M. and Muhammad, R. (2019) 'Participatory Rural Appraisal (PRA) Sebagai Sarana Dakwah Muhammadiyah Pada Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Sidenreng Rappang', *Prosiding Konferensi Nasional Ke-8 Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyiyah (APPPTMA)*, pp. 467–475. Available at: <http://asosiasipascaptm.or.id/index.php/publikasi/prosiding-konferensi-nasional-appptma-ke-8>.
- Akadun (2011) 'Revitalisasi Forum Musrenbang sebagai Wahana Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Daerah', *MIMBAR*, XXVII(2), pp. 183–191.
- Akbar, M.F., Suprpto, S. and Surati, S. (2018) 'Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Jatimulya Kabupaten Boalemo', *Publik: (Jurnal Ilmu Administrasi)*, 6(2), pp. 135–142. Available at: <https://doi.org/10.31314/pjia.6.2.135-142.2017>.
- Aklamavo, M. *et al.* (2000) 'Village Participation in Rural Development', in *The African Network on Participatory Approaches*. The World Bank, pp. 1–86.
- Alam, A. and Ishan, S. (2012) 'Role of Participatory Rural Appraisal in Community Development (A Case Study of Barani Area Development Project in Agriculture, Live Stock and Forestry Development in Kohat)', *Int. J. Acad. Res. Busi. & Soc. Sci.*, 2(8), pp. 25–38.
- Atikalani (2012) 'Perencanaan Pembangunan Desa Dalam Perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Studi Tentang Perencanaan Pembangunan Desa di Kabupaten Barito Selatan)', *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, XIII(1), pp. 130–140.
- Bancin, M.H. (2011) 'Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan (Studi Kasus: Bandung Barat)', *Journal of Regional and City Planning*, 22(3), p. 179. Available at: <https://doi.org/10.5614/jpwwk.2011.22.3.2>.

- Bandur, A. (2019) *Penelitian Kualitatif Studi Multi Disiplin Keilmuan Dengan NVivo 12 Plus*. Pertama. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Bungin, B. (2017) *Penelitian Kualitatif. Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*. Kedua. Jakarta: Kencana.
- Chambers, R. (1994) 'Participatory rural appraisal (PRA): Challenges, potentials and paradigm', *World Development*, 22(10), pp. 1437–1454. Available at: [https://doi.org/10.1016/0305-750X\(94\)90030-2](https://doi.org/10.1016/0305-750X(94)90030-2).
- Chambers, R. (2012) 'Sharing and Co-generating Knowledges: Reflection on Experiences with PRA and CLTS', *IDS Bulletin*, 43(3), pp. 71–87.
- Chaudhuri, A. (2016) 'Understanding "Empowerment"', *Journal of Development Policy and Practice* [Preprint]. Available at: <https://doi.org/10.1177/2455133315612298>.
- Cislaghi, B., Gillespie, D. and Mackie, G. (2016) *Values Deliberation & Collective Action Community Empowerment in Rural Senegal*. Springer Nature. Available at: <https://doi.org/10.1007/978-3-319-33756-2>.
- Creswell, J.W. (2013) *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Djohani, R. (2008) *Panduan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan*. Bandung.
- Enos, P. (2013) 'Perencanaan Pembangunan Partisipatif: Studi Tentang Efektivitas Musrenbang Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara', *Jurnal Paradigma*, 2(1), pp. 10–25.
- Erdiaw-Kwasie, M.O. and Acheampong, M.Y. (2018) 'Empowerment and community salience in multi-party collaboration: empirical lessons for development planning', *Development in Practice*, 28(7), pp. 932–942. Available at: <https://doi.org/10.1080/09614524.2018.1486805>.
- Fadil, F. (2013) 'Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kotabaru Tengah', *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Lokal*, II(2), pp. 251–262.
- Green, G.P. (ed.) (2013) *Handbook of Rural Development*. Northampton - USA: Edward Elgar.
- Haryadi Ahmad (2016) 'Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan Silae Kecamatan Ulujadi Kota Palu', *Jurnal Administrasi Publik*, pp. 169–170.
- Hiernimawati, H., Nielwaty, E. and Aliyana, A. (2018) 'Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Sungai Buluh Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan', *Jurnal Niara*, 11(1), pp. 84–95.
- Holle, E.S. *et al.* (2023) *Otonomi Daerah*. Padang: Media Sains Indonesia.
- Iman Sulaiman, A. *et al.* (2015) 'Komunikasi Stakeholder dalam Musyawarah', *Mimbar: Jurnal Sosial dan Pembangunan*, 31(2), pp. 367–378.

- Indrizal, E. (2014) 'Pengkajian Keadaan Perdesaan Secara Partisipatif Participatory Rural Appraisal (Pra): Suatu Pengantar Pengenalannya', *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*, 15(2), p. 39. Available at: <https://doi.org/10.25077/jantro.v15i2.5>.
- Latif, A. *et al.* (2019) 'Village Government Leadership Towards Optimizing Society Participation in Development Planning', in. Banten: Atlantis Press, pp. 12–16.
- Latif, A., Irwan and Mustanir, A. (2019) 'pengaruh kepemimpinan terhadap partisipasi masyarakat pada perencanaan pembangunan', *J AKPP; jurnal analisis kebijakan dan pelayanan publik*, 5(2), pp. 144–164.
- Latif, A., Mustanir, A. and Irwan, I. (2019) *Kepemimpinan Pemerintahan Desa, Partisipasi Masyarakat dan Perencanaan Pembangunan*. Rappang: CV. Penerbit Qiara Media.
- Lewis, W.A. (2005) *Development Planning*. London & New York: Routledge Taylor & Francis Group.
- Luturmas, Y. *et al.* (2023) *Otonomi daerah, pemerintah daerah, desa & lembaga kemasyarakatan desa*. Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi.
- Maharjan, K.L. and Sutiyo, S. (2017) *Decentralization and Rural Development in Indonesia*. Bandung & Hiroshima: Springer Nature Singapore. Available at: <https://doi.org/10.1007/978-981-10-3208-0>.
- Mardikanto, T. and Soebiato, P. (2015) *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: CV Alfabeta.
- Mardiyanta, A. (2013) 'State of the art: Konsep Partisipasi Dalam Ilmu Administrasi Publik', *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, 26(4), pp. 227–242.
- Maryati, M., Isya, M. and Azmeri, A. (2018) 'Studi Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar', *Jurnal Arsip Rekayasa Sipil dan Perencanaan*, 1(1), pp. 81–89. Available at: <https://doi.org/10.24815/jarsp.v1i1.10373>.
- Moleong, L.J. (2006) *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mustanir, Ahmad; Barisan, Barisan; Hamid, H. (2017) 'Participatory Rural Appraisal As The Participatory Planning Method Of Development Planning', in P.K. Nanang Haryono, Agie Nugroho Soegiono, Putu Aditya Ferdy Ariawantara (ed.) *Indonesian Association for Public Administration (IAPA) International Conference Towards Open Government: Finding the Whole Government Approach*. Surabaya: The Faculty Of Social And Political Science Universitas Airlangga, pp. 77–84.
- Mustanir, A., Sellang, K., *et al.* (2018) 'Peranan Aparatur Pemerintah Desa Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa Tonrongnge Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang',

- Jurnal Ilmiah Clean Government (JCG)*, 2(1), pp. 67–84. Available at: <http://lonsuit.unismuhluwuk.ac.id/index.php/clean/article/view/213>.
- Mustanir, A., Yasin, A., *et al.* (2018) ‘Potret Irisan Bumi Desa Tonrong Rijang Dalam Transect Pada Perencanaan Pembangunan Partisipatif’, *MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 4(4), pp. 1–14.
- Mustanir, A. and Abadi, P. (2017) ‘Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Di Kelurahan Kanyuara Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang’, *Jurnal Politik Profetik*, 5(2), pp. 247–261. Available at: <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/jpp/article/viewFile/4347/3986%0Ahttp://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/jpp/issue/view/636>.
- Mustanir, A., Hamid, H. and Syarifuddin, rifni N. (2019) ‘PEMBERDAYAAN KELOMPOK MASYARAKAT DESA DALAM PERENCANAAN METODE PARTISIPATIF’, *Jurnal MODERAT*, 5(3), pp. 227–239.
- Mustanir, A., Hamid, H. and Syarifuddin, R.N. (2019) *Perencanaan Partisipatif Pada Pemberdayaan Masyarakat Kelompok Wanita Tani*. CV. Penerbit Qiara Media.
- Mustanir, A. and Lubis, S. (2017) ‘Participatory Rural Appraisal in Deliberations of Development Planning’, 163(Icodag), pp. 316–319. Available at: <https://doi.org/10.2991/icodag-17.2017.60>.
- Mustanir, A. and Razak, M.R.R. (2017) ‘Nilai Sosial Budaya Pada Partisipasi Masyarakat Etnik Towani Tolotang Dalam Musyawarah Rencana Pembangunan’, in *Prosiding Konferensi Nasional Ke-6 Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyiyah (APPPTMA)*. Pare Pare: Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, pp. 1–7.
- Mustanir, A. and Yasin, A. (2018) ‘Community Participation in Transect on Development Planning’, *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 8(2), p. 137. Available at: <https://doi.org/10.26858/jiap.v8i2.7994>.
- Narayanasamy, N. (2009) *Participatory Rural Appraisal Principles, Methods and Application*. Sage Publications.
- Negeri, D.J.B.P.D.D.D. (2007) *Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050-187/Kep/Bangda/2007*. Jakarta.
- Negeri, K.D. (2007) *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 Tentang Perencanaan Pembangunan Desa*. Jakarta.
- Punch, K. (2006) *Developing Effective Research Proposals*. Second Edi. Sage Publications.
- Quimbo, M.A.T., Perez, J.E.M. and Tan, F.O. (2018) ‘Community development approaches and methods: Implications for community development practice and research’, *Community Development*, 49(5), pp. 589–603. Available at: <https://doi.org/10.1080/15575330.2018.1546199>.

- Rezaul Islam, M. (2014) 'Non-governmental organizations' role for social capital and community empowerment in community development: Experience from Bangladesh', *Asian Social Work and Policy Review*, 8(3), pp. 261–274. Available at: <https://doi.org/10.1111/aswp.12039>.
- Sadikin, A., Marsuq, M. and Jamiah, J. (2019) 'Isu-Isu Strategis Pembangunan Partisipatif Melalui Musrenbang Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur', *Jurnal Administrasi Publik*, 1(1), pp. 105–125.
- Samad, Z., Mustanir, A. and Pratama, M.Y. (2019) 'Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Untuk Mewujudkan Good Governance Kabupaten Enrekang', *MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 5(4), pp. 377–393.
- Sugiyono (2015) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Sumpeno, W. (2011a) *Perencanaan Desa Terpadu*. Aceh: Reinforcement Action and Development. Available at: <https://id.b-ok.asia/book/15930989/25fcae>.
- Sumpeno, W. (2011b) *Perencanaan Desa Terpadu (Panduan Perencanaan Pembangunan Berbasis Masyarakat)*. Jakarta: CRS Indonesia.
- Supriatna, A. (2014a) 'Relevansi Metode Participatory Rural Appraisal Dalam Mendukung Implementasi Undang-Undang', *Jurnal Lingkungan Widyaiswara*, (1), pp. 39–45. Available at: http://juliwi.com/published/E0101/Paper0101_39-45.pdf.
- Supriatna, A. (2014b) 'Relevansi Metode Participatory Rural Appraisal Dalam Mendukung Implementasi Undang-Undang Pemerintahan Desa', *Jurnal Lingkar Widyaiswara*, 1(1), pp. 39–45.
- Sutiyo and Maharjan, K.L. (2017) *Rural Community Leadership in Decentralization, Decentralization and Rural Development in Indonesia*. Available at: https://doi.org/10.1007/978-981-10-3208-0_8.
- Uceng, A. et al. (2019) 'Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa Betao Riase Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang', *MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 5(2), pp. 18–32. Available at: <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat/article/view/2126>.
- Uddin, M.N. and Anjuman, N. (2014) 'Participatory Rural Appraisal Approaches: an Overview and an Exemplary Application of Focus Group Discussion in Climate Change Adaptation and Mitigation Strategies', *International Journal of Agricultural Research, Innovation and Technology*, 3(2), pp. 72–78. Available at: <https://doi.org/10.3329/ijarit.v3i2.17848>.
- Usadolo, S.E. and Caldwell, M. (2016) 'A Stakeholder Approach to Community Participation in a Rural Development Project', *SAGE Open*, 6(1). Available at: <https://doi.org/10.1177/2158244016638132>.

- Usia, H. and Pribadi, U. (2014a) 'Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Tahunan di Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula', *Jurnal Ilmu Pemerintahan & Kebijakan Publik*, 1(3), pp. 683–726. Available at: <https://doi.org/10.18196/jgpp.2014.0022>.
- Usia, H. and Pribadi, U. (2014b) 'Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Tahunan Di Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula', *Journal of Governance and Public Policy*, 1(3). Available at: <https://doi.org/10.18196/jgpp.2014.0022>.
- Widjajanti, K. (2011) 'Model Pemberdayaan Masyarakat', *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 12(1), pp. 15–27.
- Wijaksono, S. (2013) 'Pengaruh Lama Tinggal Terhadap Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Permukiman', *ComTech*, 4(1), pp. 24–32.
- Woodyard, C.D., Przybyla, S. and Hallam, J.S. (2015) 'A community health needs assessment using principles of community-based participatory research in a Mississippi Delta community: a novel methodological approach', *Community Development*, 46(2), pp. 84–99. Available at: <https://doi.org/10.1080/15575330.2015.1006240>.
- Wulandari, L. (2017) 'Strategi Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Sukaresik Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran', *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 3(3), pp. 55–66. Available at: <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat/article/view/752>.